

No.

Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan
Sekretariat Peningkatan Keefektifan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
untuk Keefektifan Pembangunan (A4DES)
Republik Indonesia

Republik Indonesia
Laporan Studi
Kerjasama Selatan-Selatan
(Draf Grand Design dan Cetak Biru)

Indonesia
Maret 2011

VOLUME I
LAPORAN UTAMA

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY
PT. INDOKOEI INTERNATIONAL

INO
JR
11-005

Republik Indonesia, Laporan Studi Kerjasama Selatan-Selatan,
(Draf Grand Design dan Cetak Biru)

Maret 2011



LAPORAN AKHIR

Studi Pendahuluan untuk Program Kerjasama Selatan-Selatan (*Basic Study for South-South Cooperation Program*)

DAFTAR ISI

RINGKASAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Studi.....	1-1
1.2 Tujuan Studi.....	1-2
1.3 Klien, Counterpart dan Lembaga Terkait.....	1-2
1.4 Detil Ruang Lingkup Studi	1-2
1.5 Waktu Pelaksanaan dan Tenaga Ahli	1-3
1.6 Struktur Organisasi	1-3

BAB 2

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

2.1 Pendekatan Studi.....	2-1
2.2 Metodologi Studi.....	2-2
2.2.1 Pengumpulan Data dan Informasi	2-2
2.2.2 Analisa dan Pemetaan	2-3
2.2.3 Konsultasi dan Pembahasan.....	2-4
2.2.4 Penyusunan Grand Desain Nasional dan Cetak Biru KSS Indonesia	2-4
2.2.5 Lokakarya.....	2-5
2.3 Rencana Kerja Studi	2-6

BAB 3

GRAND DESIGN DAN CETAK BIRU

3.1 Grand Design Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia (2011 – 2025)	3-1
3.2 Cetak Biru Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia (2011 – 2014)	3-2

BAB 4

DATABASE DAN SISTEM INFORMASI

4.1 Portal Sistem Informasi KSS Indonesia.....	4-1
4.2 Diagram Alir (<i>Flowchart</i>) Database	4-4
4.3 Input Database	4-5

4.4 Up-Load Sistem Informasi KSS	4-7
4.5 Buku Panduan	4-8

BAB 5**AKTIVITAS STUDI**

5.1 Aktivitas Terkait Penyusunan Grand Desain dan Cetak Biru	5-1
5.1.1 Aktivitas Bulan Januari 2011	5-1
5.1.2 Aktivitas Bulan Februari 2011	5-2
5.1.3 Aktivitas Bulan Maret 2011	5-7
5.2 Aktifitas Terkait Pengembangan Database	5-10
5.2.1 Pertemuan untuk Pembahasan Database	5-10
5.2.2 Kunjungan ke Institusi Pelaksana	5-11
5.2.3 Kendala	5-12

BAB 6**KESIMPULAN**

6.1 Faktor yang Mendukung Pelaksanaan KSS	6-1
6.2 Faktor yang Menghambat Pelaksanaan KSS	6-1
6.3 Kesimpulan	6-2
6.4 Pembelajaran (<i>Lesson Learned</i>) dari Pelaksanaan KSS	6-2

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Input Data berdasarkan Jenis Kegiatan	4-5
Tabel 4.2 Daftar Input Data berdasarkan Lembaga Pemerintah.....	4-6
Tabel 4.3 Daftar Input Data berdasarkan Lembaga Non-Pemerintah	4-7
Tabel 4.4 Daftar Input Data berdasarkan Universitas	4-7
Tabel 5.1 Daftar Kegiatan yang Dilaksanakan dalam Periode Studi	5-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Tim.....	1-4
Gambar 2.1 Pendekatan Studi	2-2

Gambar 2.2 Pedoman Penyusunan RPJMN	2-5
Gambar 2.3 Rencana Kerja Studi	2-7
Gambar 4.1 Portal Web KSS Indonesia.....	4-1

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran – 1	Grand Design Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia 2011 - 2025
Lampiran – 2	Cetak Biru Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia 2011-2014
Lampiran – 3	<i>Flowchart</i> Informasi KSS Indonesia dan Daftar Input Data
Lampiran – 4	Notulen Rapat
Lampiran – 5	Dokumentasi

1. Outline Proyek	
Negara: Indonesia	Skema Kerjasama: Kerjasama Teknik
Judul Proyek : Studi Pendahuluan untuk Program Kerjasama Selatan-Selatan (<i>Basic Study for South-South Cooperation Program</i>)	
<p>1-1. Latar Belakang Studi</p> <p>Partisipasi Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dapat dirunut mulai dari Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, yang merupakan dasar pembentukan Gerakan Non Blok (GNB). Gerakan politik tersebut yang kemudian didukung dengan pembentukan Kelompok-77 yang lebih menekankan pada kerjasama ekonomi untuk memperkuat kepercayaan diri kolektif negara-negara berkembang.</p> <p>Partisipasi aktif Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan pada sepuluh tahun terakhir dan kemampuan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi krisis keuangan telah menarik perhatian anggota Kelompok-20. Dengan posisi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah dan juga sebagai anggota Kelompok-20, Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani kepentingan negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju.</p> <p>Dengan meningkatnya peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan, Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya untuk memformulasi strategi KSS yang lebih proaktif dan efektif dalam rangka mengantisipasi tren KSS saat ini dan untuk memformulasikan strategi kerjasama pembangunan yang lebih efektif. Reformulasi dan revitalisasi KSS Indonesia merupakan sebuah mandat yang sah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. RPJMN dengan jelas menegaskan bahwa untuk memperkuat KSS, Indonesia harus memformulasi KSS Indonesia dengan cara meningkatkan kemampuan dan membentuk sebuah entitas yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan pelaksanaan KSS Indonesia.</p> <p>Dalam melaksanakan mandat tersebut, Bappenas meminta agar JICA membantu upaya-upaya tersebut dengan melakukan sebuah studi mengenai pelaksanaan KSS Indonesia termasuk kebijakan nasional. Untuk merespon permintaan tersebut, JICA telah menugaskan CEACoS untuk melakukan studi dan mengembangkan prototipe database KSS Indonesia. Studi ini menghasilkan suatu formulasi tentang kebijakan dan masukan serta rekomendasi untuk penguatan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia. Hasil tersebut kemudian dipresentasikan dalam sebuah Seminar Nasional di bulan Agustus 2010. Berdasarkan hasil rekomendasi Seminar tersebutlah, maka Pemerintah kemudian membentuk Tim Koordinasi KSS yang terdiri dari pemangku kepentingan utama yaitu Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Bappenas dan sebagainya.</p> <p>Salah satu tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi KSS ini adalah untuk mengembangkan strategi dalam melaksanakan KSS melalui penyusunan Grand Design dan Cetak Biru KSS. Tim ini juga diberi mandat untuk lebih lanjut mengembangkan database yang telah dibangun oleh CEACoS.</p> <p>1-2. Tujuan Studi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk mendukung dan memfasilitasi Pemerintah Indonesia dalam memformulasi kerangka kebijakan KSS Indonesia dalam bentuk Grand Design/Cetak Biru, termasuk mekanisme kelembagaan, menganalisa program-program prioritas dan mekanisme pembiayaan. 2) Untuk mengembangkan prototipe sistem database yang telah dibuat oleh CEACoS, dan memungkinkan untuk di up-load pada website Komitmen Jakarta. <p>1-3. Gambaran Proyek</p> <p>Studi Pendahuluan untuk Program Kerjasama Selatan-Selatan (<i>The Basic Study for South-South Cooperation Program</i>) ini merupakan lanjutan dari dukungan dari JICA dalam memformulasikan Grand Design dan Cetak Biru KSS Indonesia serta untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada Tim Koordinasi dalam rangka penguatan KSS Indonesia.</p> <p>Penyusunan Grand Design, Cetak Biru dan Sistem Informasi dilakukan dengan berkoordinasi secara erat dan intensif dengan pemangku kepentingan inti (Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan dan Bappenas) serta Kementerian and lembaga pemerintahan lainnya. Dalam melaksanakan studi ini, Tim melakukan</p>	

serangkaian pertemuan dan lokakarya yang melibatkan anggota Tim Koordinasi KSS, instansi pemerintah terkait dan swasta. Kunjungan ke Kementerian dan instansi serta organisasi terkait juga dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam memformulasikan dan mengembangkan database. Selain itu, beberapa aktivitas dilakukan dengan berkoordinasi dengan donor lainnya seperti dengan Proyek ECBAM – UNDP.

Table berikut memperlihatkan daftar aktivitas yang telah dilaksanakan selama periode studi.

No.	Daftar Aktifitas	Date	Venue	Financing Sources
1.	Pertemuan Tim Teknis	13 Jan 2011	BAPPENAS	ECBAM-UNDP
2.	Pertemuan Tim Teknis	14 Jan 2011	Hotel Swiss-bel Bandung	ECBAM-UNDP
3.	Pertemuan Tim Teknis	4 Feb 2011	Hotel Mandarin, Jakarta	JICA
4.	Pertemuan Tim Teknis	16 Feb 2011	Hotel Nikko, Jakarta	JICA
5.	Lokakarya Regional Kerjasama Triangular: Menuju Kemitraan Horizontal, tapi bagaimana?	27 Feb – 1Mar 2011	Hotel Sanur Paradise, Bali	GIZ, UNDP, ADBI, dan JICA
6.	Pertemuan Tim Pengarah	8 Feb 2011	Hotel Four Season, Jakarta	JICA
7.	Pertemuan Tim Teknis	11 - 12 Mar 2011	Hotel Aston, Bogor	ECBAM-UNDP
8.	Lokakarya Nasional	31 Mar 2011	Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta	JICA dan ECBAM-UNDP

1-4. Output

1. Formulasi Grand Design KSS Indonesia periode 2011-2025
2. Formulasi Cetak Biru KSS Indonesia periode 2011-2015
3. Pengembangan Sistem Informasi KSS Indonesia dan meng-upload ke website KSS Indonesia yaitu <http://www.ssc-indonesia.org>

2. Tim Studi:

Anggota Tim Studi:

- PT. Indokoei International
- Mr. Adik Bantarso Bandoro (Advisor for South-South Cooperation)

Periode Studi

Mulai 12 Januari sampai 31 Maret 2011

Tipe Studi:

Studi Pendahuluan (*Basic Study*)

3-1. Ringkasan Hasil Studi

(1) Grand Design KSS Indonesia 2011-2025

Bab I - menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, tujuan, kerangka waktu, prinsip dan arah kebijakan termasuk visi dan misi KSS Indonesia.

Visi KSS Indonesia adalah “Kemitraan yang Lebih Baik untuk Kesejahteraan” dengan misi:

- a. Memajukan peran Indonesia dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan untuk kepentingan nasional Indonesia;
- b. Meningkatkan solidaritas dan kemandirian bersama Selatan-Selatan melalui kemitraan dengan memanfaatkan potensi nasional;
- c. Memperkuat kerjasama pembangunan yang inovatif dan meningkatkan kesejahteraan;
- d. Mengembangkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara Selatan;
- e. Mengembangkan kerjasama teknik, sosial-budaya dan iptek dengan negara-negara Selatan;
- f. Meningkatkan pelaksanaan diplomasi Indonesia dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral, regional, multilateral dalam berbagai bidang untuk mencapai kepentingan nasional;
- g. Memainkan peran sentral sebagai *emerging economics*.

Bab II: - Kondisi Lingkungan dan Dinamika Kerjasama Selatan-Selatan: menjelaskan tentang kondisi lingkungan kerjasama Selatan-Selatan yang meliputi lingkungan strategis Indonesia, global, regional, multilateral, modal dasar dan peran Indonesia dalam KSS serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh KSS Indonesia.

Bab III – Cakupan dan Ruang Lingkup: menjelaskan tentang cakupan dan ruang lingkup dari KSS Indonesia yang pada dasarnya meliputi kerjasama ekonomi, teknis, sosial-budaya dan kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bab IV- Tahapan dan Skala Prioritas: menjelaskan tentang rencana prioritas yang harus dicapai oleh KSS Indonesia dalam kurun waktu 25 tahun pembangunan, dibagi 3 tahapan rencana prioritas yaitu Rencana Prioritas Periode I : 2011-2014, Periode II: 2015-2019 dan Periode III :2020-2025.

Bab V- Sumber Pembiayaan: menjelaskan tentang sumber-sumber pembiayaan dari program-program KSS Indonesia yang berasal dari APBN, Kerjasama Bilateral, Mitra Kerjasama, serta Swasta dan Perbankan.

Bab VI – Program Kerjasama: menjelaskan tentang arah dari program-program indikatif KSS Indonesia dalam kerangka kerjasama teknik, sosial budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pencapaian target di tahun 2025.

Bab VII - Kawasan: menjelaskan tentang perspektif kawasan yang akan diprioritaskan dalam kerangka pelaksanaan KSS Indonesia di masa mendatang.

Bab VIII - Monitoring dan Evaluasi: menjelaskan tentang pentingnya untuk mendesain dan melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif sebagai upaya dan sarana untuk menganalisis dampak dari program terhadap lembaga pelaksana yang merupakan *center of excellent* dengan mengedepankan kepentingan nasional.

Bab VIII - Penutup: menyimpulkan bahwa KSS merupakan aspek penting dalam kerangka kerjasama pembangunan internasional (*international development cooperation architecture*) dan sebagai komplemen dari Kerjasama antara Utara-Selatan. Dan oleh karena itu, Grand Desain sangat penting dan menjadi acuan bagi penyusunan peta perjalanan KSS Indonesia yang lebih komprehensif untuk kurun waktu 2011-2025 dalam pencapaian kepentingan nasional.

(2) Cetak Biru KSS Indonesia 2011-2014

Cetak Biru Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia untuk periode 2011-2014 pada dasarnya berisi penjelasan rinci termasuk rencana langkah tindak untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia pada periode lima tahun pertama. Sedangkan untuk Kerjasama Ekonomi disinergikan dengan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan untuk periode 2010-2014. Selain itu, sebagai benang merah terhadap pencapaian visi dan misi yang tercantum dalam Grand Design, Cetak Biru KSS Indonesia dengan jelas merincikan bentuk kerjasama yang harus dilaksanakan dalam pencapaian target.

Isi dari Draf ke-4 Cetak Biru Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia untuk periode 2011-2014:

Bab I – Pendahuluan: menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan hasil yang diharapkan (langkah tindak yang komprehensif dan terpadu) dalam KSS Indonesia dalam rencana pembangunan lima tahun ke depan (2011-2014).

Bab II – Penguatan Kerangka Hukum: menjelaskan tentang pentingnya kerangka hukum KSS Indonesia untuk memberikan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan KSS Indonesia serta mekanisme koordinasi antar instansi Pemerintah yang bersangkutan, lembaga non-pemerintah, mitra kerjasama internasional, swasta serta LSM dan OMS. Bagian ini juga menjelaskan tentang rencana langkah tindak dalam mencapai sasaran rencana jangka menengah.

Bab III – Penguatan Kelembagaan: menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan KSS adalah kurangnya koordinasi antara para pemangku kepentingan KSS Indonesia (lembaga pelaksana dan lembaga koordinasi) dan kemungkinan untuk berevolusi melalui masa transisi ke arah pembentukan nasional *focal point* KSS Indonesia di tahun 2014, termasuk rencana langkah tindak konkrit untuk tujuan pencapaian tersebut.

Bab IV – Pembiayaan Kerjasama: menjelaskan tentang modalitas pembiayaan KSS yang mungkin melibatkan Anggaran Pemerintah (APBN), Mitra Kerjasama Internasional, Kerjasama, Triangular, Swasta dan Lembaga Pembiayaan, termasuk kemungkinan untuk menyediakan dana pembangunan bagi negara-negara Selatan.

Bab V – Program Kerjasama: menjelaskan tentang program dan produk pilihan, program unggulan di masing-masing jenis kerjasama (kerjasama ekonomi, teknis, sosial-budaya, iptek), termasuk rencana langkah tindak konkretnya masing-masing.

Bab VI – Promosi dan Publikasi: menjelaskan tentang pentingnya penyebaran informasi tentang program dan kegiatan

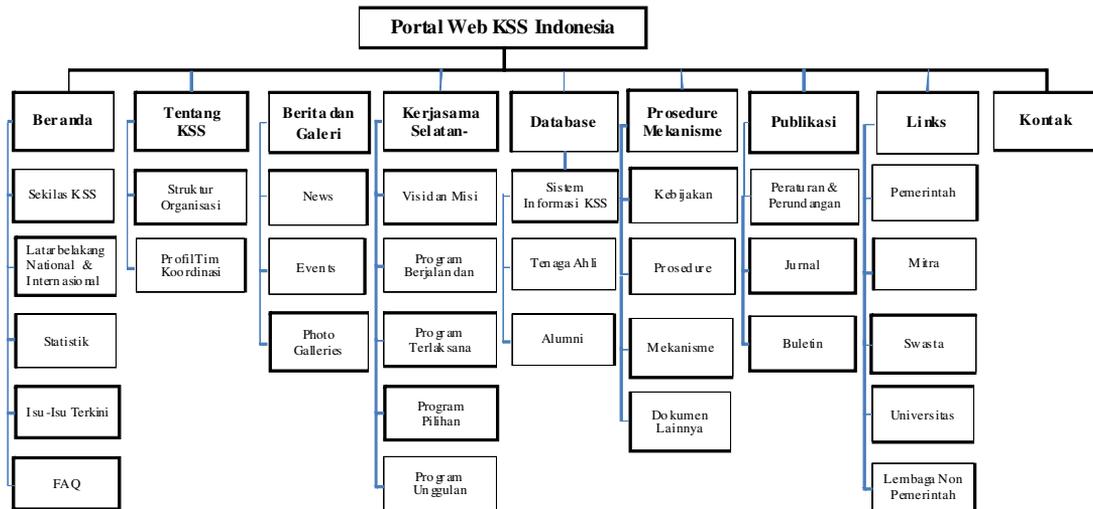
KSS melalui media massa, seminar, lokakarya, atau melalui tokoh masyarakat, untuk diketahui secara nasional dan global sebagai cara untuk mempromosikan program KSS Indonesia secara luas dan rencana langkah tindak konkret untuk pencapaiannya.

Bab VII - Monitoring dan Evaluasi: menjelaskan tentang langkah tindak konkret yang harus dilaksanakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang menyeluruh terhadap program-program dan kegiatan KSS Indonesia.

Bab VIII-Penutup

(3) Pengembangan Sistem Informasi KSS Indonesia

Prototipe database dikembangkan menjadi Sistem Informasi KSS Indonesia dan dengan portal web berikut yang dikemas dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris). Portal ini sudah di-upload dengan nama domain: <http://www.ssc-indonesia.org>.



Selain itu, database sistem tersebut didesain dengan menggunakan 3 lapis keamanan: 1) pengguna umum yang hanya bisa melihat data; 2) instansi pelaksana KSS yang dapat meng-update datanya dan tenaga ahli yang ingin mendaftar secara online menjadi tenaga ahli KSS dan 3) administrator yang akan mengoperasikan dan memelihara web dan database.

3-2. Faktor yang Mendukung Pelaksanaan KSS

Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan utama (Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan dan Bappenas) merupakan fase penting dalam mereformulasi dan merevitalisasi KSS Indonesia. Fase ini akan berubah secara perlahan menuju suatu entitas konkrit seperti yang diamanatkan oleh RPJM. Fase ini merupakan jembatan bagi terbentuknya *Focal Point* KSS Indonesia. Koordinasi yang erat antar berbagai instansi pemerintah dan komitmen mereka merupakan factor yang mendukung keberhasilan KSS Indonesia. Hal tersebut juga memberikan support dalam penyusunan Grand Design dan Cetak Biru.

3-3. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan KSS

- Data dan informasi mengenai kerjasama ekonomi terkait dengan KSS yang telah dilaksanakan oleh Indonesia sangat terbatas, sementara KSS Indonesia akan difokuskan pada kerjasama ekonomi.
- Tidak adanya dasar hukum untuk mengakomodasi mekanisme pembiayaan khususnya untuk memfasilitasi peran Indonesia sebagai negara donor.
- Belum memadainya aturan dan fasilitasi untuk mendukung perdagangan ke negara-negara Selatan.
- Tersebarnya data dan information mengenai program-program KSS yang telah dilaksanakan karena sebelumnya dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh institusi pelaksana di masing-masing Kementerian sehingga menyulitkan untuk melakukan pengumpulan data agar data-data tersebut terpusat di bawah koordinasi Sekretariat Tim Koordinasi KSS Indonesia.

3-4 Kesimpulan

- Pada prinsipnya Tim Koordinasi KSS sudah berhasil dalam memformulasi Grand Design dan Cetak Biru KSS Indonesia dalam waktu yang relatif singkat.
- Koordinasi yang erat antar para pemangku kepentingan, JICA dan juga mitra pembangunan lainnya seperti UNDP selama masa pelaksanaan studi juga ikut membantu dalam pencapaian output yang terbaik.

- Kelanjutan dari proses ini setelah masa studi ini sangat penting dalam pencapaian tujuan KSS Indonesia yang telah ditetapkan.

3-5 Pembelajaran (*Lesson Learned*)

- Kerjasama antar institusi terkait (instansi pelaksana, lembaga koordinasi, swasta dan OMS) sangat penting untuk meningkatkan pengembangan KSS Indonesia dan karenanya sangatlah penting untuk membentuk suatu *national focal point* sebagai satu-satunya institusi yang akan mengelola dan mengkoordinasikan KSS Indonesia di masa yang akan datang.
- Masing-masing *center of excellent* harus meningkatkan kemampuannya terutama dalam menangani isu-isu global yang baru muncul.
- Keberadaan kerangka hukum dan peraturan yang terkait diperlukan guna memfasilitasi peningkatan perdagangan internasional dan diplomasi Indonesia di masa yang akan datang.
- Penetapan suatu standar nasional mengenai monitoring dan evaluasi sangat diperlukan karena akan sangat membantu dalam meningkatkan pelaksanaan program-program KSS di masa mendatang.

Bab - 1

PENDAHULUAN

BAB 1

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG STUDI

Partisipasi Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dapat dirunut mulai dari Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, yang merupakan dasar pembentukan Gerakan Non Blok (GNB). Gerakan politik tersebut yang kemudian didukung dengan pembentukan Kelompok-77 yang lebih menekankan pada kerjasama ekonomi untuk memperkuat kepercayaan diri kolektif negara-negara berkembang.

Partisipasi aktif Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan pada sepuluh tahun terakhir dan kemampuan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi krisis keuangan telah menarik perhatian anggota Kelompok-20. Dengan posisi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah dan juga sebagai anggota Kelompok-20, Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani kepentingan negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju.

Dengan meningkatnya peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan, Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya untuk memformulasi strategi KSS yang lebih proaktif dan efektif dalam rangka mengantisipasi tren KSS saat ini dan untuk memformulasikan strategi kerjasama pembangunan yang lebih efektif. Reformulasi dan revitalisasi KSS Indonesia merupakan sebuah mandat yang sah sebagaimana tercantum dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014. RPJM dengan jelas menegaskan bahwa untuk memperkuat KSS, Indonesia harus memformulasi KSS Indonesia dengan cara meningkatkan kemampuan dan membentuk sebuah entitas yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan pelaksanaan KSS Indonesia.

Dalam melaksanakan mandat tersebut, Bappenas meminta agar JICA membantu upaya-upaya tersebut dengan melakukan sebuah studi mengenai pelaksanaan KSS Indonesia termasuk kebijakan nasional. Untuk merespon permintaan tersebut, JICA telah menugaskan CEACoS untuk melakukan studi dan mengembangkan prototipe database KSS Indonesia. Studi ini menghasilkan suatu formulasi tentang kebijakan dan masukan serta rekomendasi untuk penguatan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia. Hasil tersebut kemudian dipresentasikan dalam sebuah Seminar Nasional di bulan Agustus 2010. Berdasarkan hasil rekomendasi Seminar tersebutlah, maka Pemerintah kemudian membentuk Tim Koordinasi KSS yang terdiri dari pemangku kepentingan utama yaitu Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Bappenas dan sebagainya.

Salah satu tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi KSS ini adalah untuk mengembangkan strategi dalam melaksanakan KSS melalui penyusunan Grand Design dan Cetak Biru KSS. Tim ini juga diberi amanat untuk mengembangkan database yang telah dibangun oleh CEACoS.

Tim Koordinasi KSS kemudian meminta JICA untuk melanjutkan dukungannya bagi upaya-upaya Pemerintah dalam pengembangan KSS dengan menugaskan Konsultan untuk mengembangkan dan memformulasi Grand Design dan Cetak Biru KSS Indonesia.

1.2 TUJUAN STUDI

Tujuan dari studi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mendukung dan memfasilitasi Pemerintah Indonesia dalam memformulasi kerangka kebijakan KSS Indonesia dalam bentuk Grand Design/Cetak Biru, termasuk mekanisme kelembagaan, menganalisa program-program prioritas dan mekanisme pembiayaan.
- 2) Untuk mengembangkan prototipe sistem database yang telah dibuat oleh CEACoS, dan memungkinkan untuk di up-load pada website Komitmen Jakarta.

1.3 KLIEN, COUNTERPART DAN LEMBAGA TERKAIT

Klien, counterpart dan pemangku-kepentingan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

- Klien : JICA Indonesia Office
- Counterpart : Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan lain-lain.
- Lembaga Terkait : BPS, Kementerian PU, dan lain-lain.

Konsultan sudah melakukan koordinasi yang erat dan konsultasi intensif dengan Klien, Counterpart dan lembaga terkait.

1.4 DETIL RUANG LINGKUP STUDI

Studi ini mencakup:

- 1) Formulasi Grand Design/Cetak Biru
 - Formulasi Grand Design/Cetak Biru dilaksanakan mulai tanggal 12 Januari hingga 31 Maret 2011.
 - Memuat isu-isu tentang kerangka kelembagaan, mekanisme kelembagaan, program-program prioritas dan sistem pendanaan.
 - Kerangka hukum: draf regulasi tentang dasar hukum yang solid, pengalokasian dana dan APBN.
 - Mekanisme Kelembagaan: terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran, monitoring dan evaluasi KSS, koordinasi antar pemangku-kepentingan, pengembangan kelembagaan donor, struktur organisasi, dan sebagainya.
 - Program Prioritas: Pemetaan KSS Indonesia dan prioritas pada pengembangan ekonomi.
 - Sistem Pendanaan: mekanisme pendanaan pelaksanaan KSS, sinergi pendanaan, dan sebagainya.

2) Pengembangan Sistem Database

- Pengembangan Sistem Database dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan Grand Design/Cetak Biru, yaitu mulai 12 Januari hingga 31 Maret 2011.
- Analisa mengenai pengembangan database dilaksanakan melalui serangkaian diskusi, dan studi mengenai sistem data dan informasi yang telah dikembangkan oleh Sekretariat Negara (<http://isstc.setneg.go.id>) serta melakukan kajian terhadap proses pengembangan prototipe database yang sebelumnya telah dibangun oleh CEACoS UI.
- Hasil dari analisa sistem database tersebut berupa rekomendasi mengenai model kerangka, flowchart, dan usulan sistem database, termasuk bahasa program dan engine yang dipakai dalam pengembangan database.
- Database ini diharapkan bisa diakses secara online dalam waktu riil yang minimum dengan keamanan standar yang menggunakan bahasa program dan engine yang telah disetujui bersama.
- Mengumpulkan data tentang KSS Indonesia yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga/Pemangku Kepentingan dengan mengunjungi langsung Kementerian/Institusi terkait tersebut, pertemuan-pertemuan formal ataupun via email.
- Entri data yang telah dikumpulkan dari berbagai Kementerian/Lembaga/Pemangku Kepentingan tersebut termasuk meng-upload sistem informasi tersebut ke dalam domain website yang telah disepakati.

1.5 WAKTU PELAKSANAAN DAN TENAGA AHLI

Studi ini dilaksanakan dalam waktu 2,5 bulan dari tanggal 12 Januari hingga akhir Maret 2011; dengan total 9,5 orang-bulan dengan komposisi satu (1) orang Team Leader, satu (1) orang Koordinator, satu (1) orang *System Analyst*, dan satu orang (1) Programmer serta 45 hari kerja bagi Adik Bantarso Bandoro sebagai Penasehat (*Advisor*) KSS.

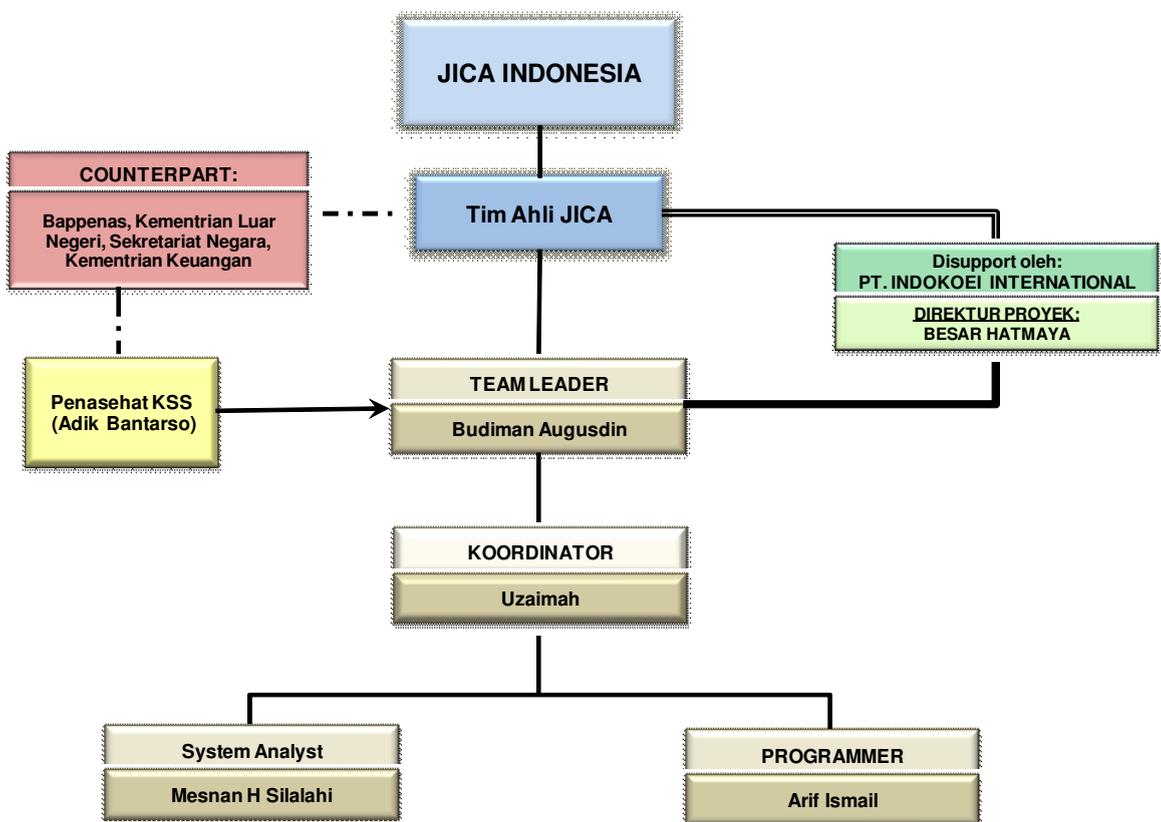
1.6 STRUKTUR ORGANISASI

Agar pelaksanaan Studi berjalan secara efektif dan efisien, suatu organisasi untuk pelaksanaan studi dibentuk dengan pertimbangan untuk memudahkan koordinasi antara JICA, Konsultan dan institusi terkait lainnya.

Konsultan akan membantu JICA dalam melaksanakan tugasnya seperti ditetapkan dalam cakupan ruang lingkup Studi. Tenaga Ahli dari Konsultan akan membentuk suatu Tim di bawah arahan dan pimpinan Penasehat KSS. Sementara, pihak Manajemen Konsultan terus melakukan koordinasi dengan JICA dan membantu Tim dalam hal-hal yang terkait dengan kontrak, pendanaan dan administrasi.

Organisasi dari Tim dibentuk seperti pada **Gambar 1.1** dengan pertimbangan aspek penting berikut:

- Organisasi harus berfungsi secara efektif dalam mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda.
- PT. Indokoei International akan mendukung penuh Tim Studi.
- Tim Studi dibentuk berdasarkan kemampuan teknis, kemampuan manajemen, pengalaman untuk melakukan koordinasi dan berhubungan dengan berbagai pihak serta mampu untuk bekerjasama dalam Tim dengan anggota Tim lainnya.
- Alokasi penugasan anggota Tim dibuat untuk memenuhi kebutuhan Studi dengan pertimbangan pengalaman mereka dalam melakukan studi-studi sejenis.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Tim

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

BAB 2

Pendekatan dan Metodologi

2.1 PENDEKATAN STUDI

Penyusunan Grand Design/ Cetak Biru merupakan proses kolaboratif yang melibatkan Kementerian terkait, sektor publik dan swasta serta Organisasi Non-Pemerintah (LSM). Grand Design dan Cetak Biru ini diformulasi berdasarkan penelitian yang ekstensif, pengumpulan data, dan upaya pendekatan publik terutama dilakukan melalui diskusi kelompok dan lokakarya.

Penyusunan Grand Design/Cetak Biru dimulai dengan pengumpulan data secara komprehensif dan kajian yang mendalam mengenai kebijakan KSS yang ada, program-program prioritas, mekanisme pendanaan serta sistem database yang ada.

Informasi yang dikumpulkan terkait dengan isu-isu kebijakan kunci dan indikator kuantitatif untuk beberapa studi kasus akan dipergunakan untuk mengembangkan strategi dalam rangka penguatan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia. Strategi yang diterapkan tetap berdasarkan kerangka tata pemerintahan global tetapi dengan relevansi spesifik negara-negara Selatan.

Dalam merancang Konsep Cetak Biru sangatlah penting untuk mempertimbangkan bagaimana aplikasi Rencana Aksi berbasis negara dapat memberikan kontribusi kepada para pengambil keputusan tentang bagaimana cara untuk meningkatkan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan meningkatkan Perdagangan Internasional dan Diplomasi Indonesia.

Aspek kunci dari proses penyusunan Grand Desain / Cetak Biru meliputi:

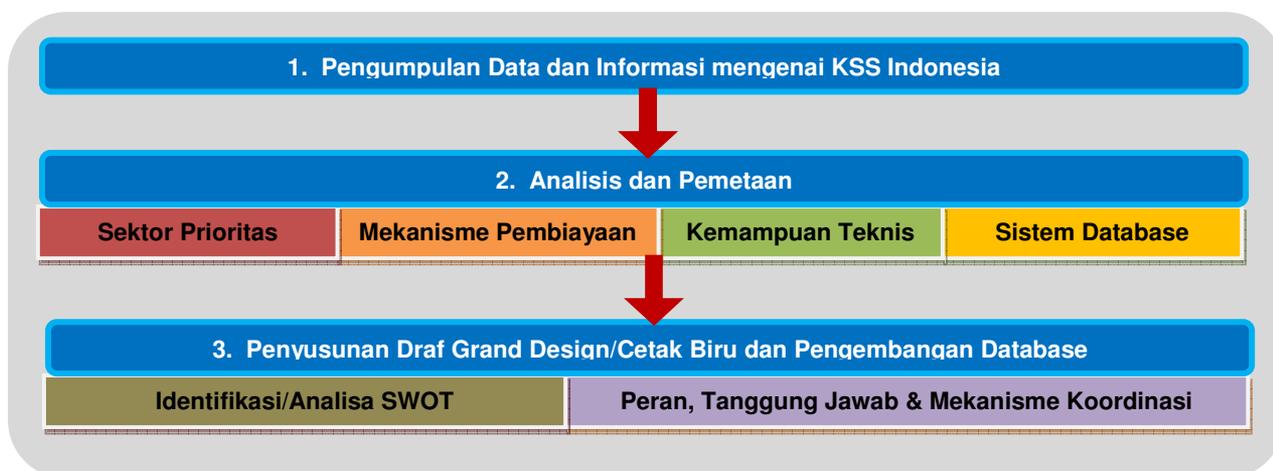
- Tinjauan lebih mendalam tentang kebijakan yang ada, program-program prioritas dan mekanisme pendanaan melalui kerjasama triangular atau multilateral / mekanisme kerjasama bilateral.
- Diskusi yang ekstensif mengenai isu-isu kunci terkait dengan Lingkungan Bisnis dan Daya Saing.
- Mengambil pelajaran dari pengalaman tentang *best practices* nasional dan internasional.
- Mengkaji Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
- Melakukan diskusi kelompok (*focus group discussion*) dengan Kementerian terkait, Tim Koordinasi, Donor, pihak swasta dan LSM berdasarkan bidang keahlian mereka dan paparan profesional dan mempertimbangkan dan memasukkan saran dan input dari mereka.
- Ikut berpartisipasi dan menyelenggarakan lokakarya nasional dan internasional terkait dengan KSS untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik dan *best practices* dalam menyusun Grand Design dan Cetak Biru KSS Indonesia.

Akses yang luas terhadap informasi merupakan mekanisme pemberdayaan dan partisipatif untuk tata pemerintahan yang baik. Mekanisme ini membutuhkan dukungan dan konsensus Tim Koordinasi KSS di level yang lebih tinggi untuk menjamin bahwa informasi yang dapat diakses tersebut dapat dipelihara untuk mencapai tujuan KSS Indonesia. Setelah keputusan positif akan akses tersebut dibuat dan didukung oleh Tim Koordinasi, maka perlu ditetapkan pertimbangan mengenai privasi, keamanan dan akses publik serta strategi akses. Akses terhadap informasi publik harus *up-to-date*, jelas, dan dapat diandalkan.

Dialog publik dan keterbukaan informasi antar sektor pemerintah menjadi penting. Peningkatan akses, berbagi informasi dan dialog sangat membantu dalam menentukan kebijakan pengembangan database. Kualitas dan keandalan data pada arena publik memerlukan kontrol pada level tertentu dalam hal pemeliharaan dan penyebaran data.

Oleh karena itu peran, tanggung jawab dan kewajiban pengelola data dan informasi harus jelas, baik di pihak sektor publik dan swasta. Kebijakan dalam hal akses dan diseminasi untuk penggunaan data selanjutnya harus diskusikan untuk menjadi pertimbangan pada level yang lebih tinggi.

Dalam tulisan ini, kami menyajikan konsep-konsep kunci dari studi ini dan pendekatannya. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini dalam rangka mencapai Tujuan Studi ini diringkas dalam **Gambar 2.1 Pendekatan Studi**.



Gambar 2.1 Pendekatan Studi

2.2. METODOLOGI STUDI

2.2.1. PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

Konsultan mengumpulkan data mengenai Kerjasama Selatan-Selatan yang diperlukan untuk mempertajam formulasi dan penyusunan Grand Design/Cetak Biru dan pengembangan sistem database, seperti:

1. Laporan Studi yang dilaksanakan oleh CEACoS (*Center for East Asian Cooperation Studies*), Universitas Indonesia.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015.
3. Cetak Biru ASEAN.
4. Renstra dan kebijakan nasional lainnya yang dapat membantu dalam penyusunan Grand Design dan Cetak Biru seperti Renstra Kementerian Perdagangan, Kebijakan Luar dan Dalam Negeri Indonesia, dan sebagainya.
5. Data mengenai Kerjasama Teknik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.
6. Data terkait lainnya dari Kementerian dan Lembaga seperti peraturan, juklak, jurnal, dan sebagainya.
7. Data dan informasi mengenai pengembangan sistem database.
8. Data dan informasi mengenai KSS lainnya yang terdapat di website.

2.2.2. ANALISA DAN PEMETAAN

Sebuah kajian mengenai data dan informasi yang telah tersedia dan dikumpulkan adalah metode untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sebuah subjek kajian sebelum dimulainya konsultasi, fokus diskusi kelompok dan lokakarya. Kajian tersebut difokuskan pada kebijakan dalam dan luar negeri Indonesia saat ini, terutama pada kerjasama teknis dan ekonomi, untuk memperoleh informasi yang komprehensif tentang kerjasama luar negeri yang telah atau sedang dilaksanakan oleh kementerian dan pemangku-kepentingan terkait, sistem jejaring antar para pemangku kepentingan, proses pengambilan keputusan mengenai isu-isu terkait dengan Kerjasama Selatan-Selatan di Indonesia atau yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.

Analisa tentang Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT) diperlukan dalam menentukan visi dan strategi untuk KSS Indonesia. Dengan mengetahui dengan jelas kekuatan dan kelemahan, sangat membantu untuk menentukan visi tentang bagaimana strategi yang harus dilakukan dan untuk mengidentifikasi strategi dan hubungan kolaboratif yang mengarah pada peningkatan kinerja KSS Indonesia.

Sebuah kajian yang komprehensif tentang RPJMN 2010-2014 juga harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dengan RPJMN 2010-2014.

Selain itu, kajian atas database yang ada sebagaimana telah dikembangkan oleh Sekretaris Negara dan CEACOS UI dilakukan oleh Konsultan pada model, diagram alur, bahasa pemrograman dan *engine database*. Konsultan akan merekomendasikan alternatif untuk mengembangkan sistem yang ada untuk memungkinkan untuk dapat diakses secara *online* dalam waktu yang riil dengan menggunakan sistem keamanan yang handal.

2.2.3. KONSULTASI DAN PEMBAHASAN

Konsultan membantu Tim Koordinasi Kerjasama Selatan-Selatan serta para pemangku-kepentingan terkait dan melakukan komunikasi dan koordinasi yang erat dengan anggota Tim untuk mempercepat perumusan Grand Desain dan Cetak Biru tersebut.

Selain itu, Konsultan juga melaksanakan konsultasi dan diskusi secara langsung dengan nara sumber (*resource persons*) untuk memperoleh input yang lebih banyak dan untuk mempercepat pelaksanaan penyusunan Grand Design dan Cetak Biru nasional.

2.2.4. PENYUSUNAN GRAND DESAIN NASIONAL DAN CETAK BIRU KSS INDONESIA

Salah satu alasan utama dalam penyusunan Grand Desain dan Cetak Biru Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia adalah bahwa KSS telah tercantum dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Selain itu, sebuah studi dan kajian terhadap arah kebijakan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia telah dilaksanakan dengan dukungan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) pada tahun 2010, merekomendasikan beberapa rencana tindak (*action plan*) untuk dilaksanakan, antara lain adalah melalui penyusunan Grand Design dan Cetak Biru sebagai arah kebijakan untuk Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia di masa mendatang .

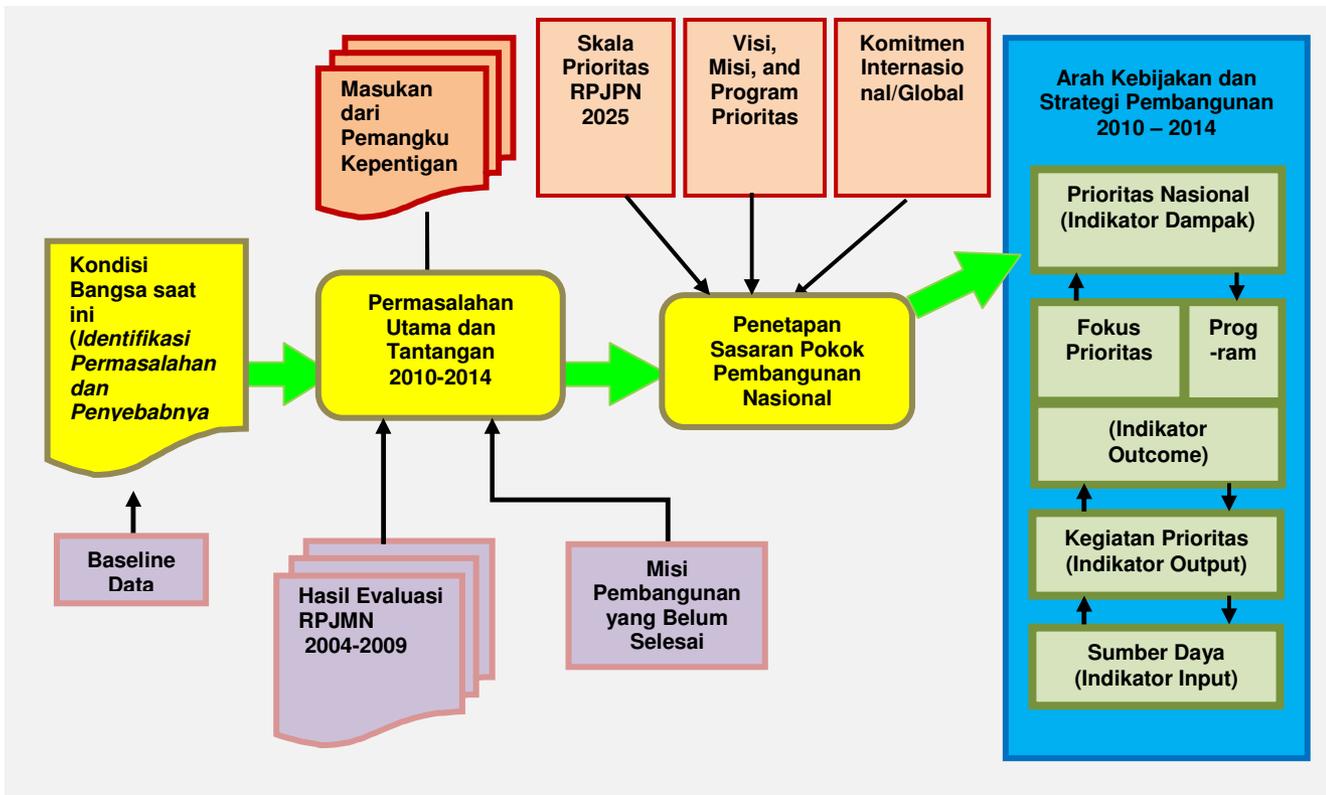
Selain itu, peran Indonesia pada tatanan masyarakat global seperti menjadi anggota Kelompok-20, Ketua ASEAN pada tahun 2011, dll dan pada beberapa forum Internasional yang menggaris-bawahi pada komitmen untuk pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan seperti Summits, Konferensi PBB mengenai Kerjasama Selatan-Selatan, Deklarasi Paris, *Accra Agenda of Action* (AAA), Pertemuan Tingkat Tinggi (*High Level Event*) di Bogota, Kolumbia pada tahun 2010, juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk menaruh perhatian khusus pada pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia.

Penyusunan Grand Design Kerjasama Selatan-Selatan bertujuan untuk meletakkan landasan bagi penguatan dan peningkatan Kerjasama Selatan-Selatan yang lebih maju dan terintegratif serta meletakkan pada konstelasi global untuk mendukung pembangunan dan pemenuhan kepentingan nasional.

Grand Design dan Cetak Biru KSS Indonesia disusun dengan menggunakan proses konsultatif. Penyusunan ini membutuhkan komitmen antara pihak-pihak yang terkait dan menetapkan peran tiap pihak yang memungkinkan pencapaian tujuan dengan cara yang disepakati oleh semua pihak.

Dalam hal ini Konsultan berperan untuk memfasilitasi Tim Teknis yang diberi mandat dalam penyusunan Grand Design dan Cetak Biru dari Tim Pengarah KSS.

Kerangka untuk merumuskan Cetak Biru harus mengacu pada 'Pedoman Penyusunan RPJM' yang dikeluarkan oleh BAPPENAS sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 2.2 di bawah ini.



Gambar 2.2 Pedoman Penyusunan RPJMN

2.2.5 LOKAKARYA

Partisipasi Tim Studi dalam lokakarya terkait KSS seperti Lokakarya regional di Bali mengenai kerjasama triangular dan studi kasus penulis (*Writer Cases*) diharapkan dapat membantu dan mempertajam dalam penyusunan Grand Design dan Cetak Biru. Dengan berbagi informasi dan pengetahuan antar peserta dari berbagai negara dan kawasan serta pengalaman dari donor tradisional serta organisasi internasional dalam melaksanakan program-program KSS, sangat berguna dan diharapkan dapat menjadi *best practices* dalam pengembangan KSS Indonesia khususnya dalam penyusunan Grand Design dan Cetak Biru.

Selain itu, Konsultan juga akan menyelenggarakan sebuah lokakarya nasional bertempat di Jakarta, dengan menyajikan panelis dari Ahli dan Profesional terkait dengan bidang-bidang tertentu di KSS serta mengundang perwakilan dari donor sebagai nara sumber untuk mendapatkan input tambahan dalam penyusunan Grand Design dan Cetak Biru. Dengan diselenggarakannya lokakarya ini diharapkan dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang teridentifikasi sebagai bagian yang hilang dan belum terakomodasi dalam Grand Design dan Cetak Biru.

2.3 RENCANA KERJA STUDI

Berdasarkan diskusi dengan Bappenas, rencana kerja berikut (Gambar 2.3) dilaksanakan dalam studi ini.

Pada dasarnya, fasilitasi JICA untuk Studi Pendahuluan KSS (*Basic Study of South-South Cooperation*) ini mencakup:

- Pertemuan sehari penuh dengan Kementerian dan Instansi terkait sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Bandung, dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2011.
- Kunjungan ke Kementerian dan Lembaga terkait untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memperkuat pengembangan database.
- Pertemuan untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi dari Kementerian dan Lembaga terkait untuk Grand Design dan Database pada tanggal 16 Februari 2011.
- Pendanaan tiket dan akomodasi untuk dua (2) orang dari Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri untuk Lokakarya Regional di Bali.
- Partisipasi pada Lokakarya Regional di Bali pada tanggal 27 Februari - 1 Maret 2011.
- Rapat Tim Pengarah pada tanggal 8 Maret 2011 di Jakarta.
- Rapat Teknis untuk penguatan Grand Design, Cetak Biru dan Database KSS Indonesia, sebagai tindak lanjut dari arahan Tim Teknis dalam pertemuan sebelumnya yaitu pada tanggal 8 Maret 2011, dilaksanakan pada tanggal 11-12 Maret 2011 di Bogor.
- Lokakarya Nasional untuk Kerjasama Selatan-Selatan pada tanggal 31 Maret 2011, termasuk peluncuran Sistem Informasi SSC Indonesia.

Gambar 2.3 Rencana Kerja Studi

No	Deskripsi	Januari			Februari				Maret					
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	
Rencana Kerja untuk Grand Design KSS														
1	Penanda tangan kontrak	▲												
2	Perkenalan anggota Tim Studi kepada BAPPENAS	■												
3	Menghadiri Pertemuan Tim Teknis di BAPPENAS	■												
4	Menghadiri Pertemuan Tim Teknis di Bandung (Menyajikan draf ke-1 Grand Design)	■												
5	Revisi Draft ke-1		■	■										
6	Pertemuan Koordinasi dengan JICA & BAPPENAS		■	■										
7	Penyerahan Draft ke-2			■										
8	Pertemuan Konsultatif dengan Tim Koordinasi KSS untuk membahas draf ke-2				▲									
9	Penyerahan Laporan Bulanan No. 1 (Jan 2011)				▲									
10	Persiapan untuk Focus Group Discussion (FGD)				■	■	■							
11	Rangkaian pertemuan dan FGD dengan Kementerian terkait mengenai isu-isu mekanisme pembiayaan, kelembagaan, program, kerangka kelembagaan, dan sebagainya)					▲	▲							
12	Pertemuan Koordinasi untuk persiapan Pertemuan Bali						▲							
13	Pengaturan untuk partisipasi dalam Lokakarya Regional di Bali						■							
14	Menghadiri Lokakarya Regional di Bali						■	■						
15	Penyerahan Laporan Bulanan No. 2 (Feb 2011)							▲						
16	Pertemuan untuk koordinasi Draft Laporan Akhir										▲			
17	Persiapan Lokakarya Nasional dan Revisi Laporan Akhir										■	■	■	
18	Lokakarya Nasional												▲	
19	Penyerahan Laporan Akhir												▲	
Pengembangan Sistem Informasi (Database) KSS														
1	Survei Lapangan ke Kementerian/Instansi terkait					■	■	■	■	■	■	■	■	
2	Desain Database					■	■	■	■	■	■	■	■	
3	Protipe awal					■	■	■	■	■	■	■	■	
4	Desain Struktur Menu					■	■	■	■	■	■	■	■	
5	Pertemuan Konsultatif dengan Tim Teknis untuk pengembangan database						▲		▲					
6	Desain interface / template					■	■	■	■	■	■	■	■	
7	Desain Tipe Keamanan dan Pengguna					■	■	■	■	■	■	■	■	
8	Desain Format Data Input					■	■	■	■	■	■	■	■	
9	Desain Laporan					■	■	■	■	■	■	■	■	
10	Testing dengan Data Dummy					■	■	■	■	■	■	■	■	
11	Coordination Meeting with BAPPENAS Technical Team											▲		
12	Perbaikan berdasarkan input dari Pertemuan Konsultatif					■	■	■	■	■	■	■	■	
13	Entri data					■	■	■	■	■	■	■	■	
14	Penyelesaian masalah Bug dan Error					■	■	■	■	■	■	■	■	
15	Penyiapan Manual					■	■	■	■	■	■	■	■	
16	Instalasi					■	■	■	■	■	■	■	■	
17	Training Pengguna					■	■	■	■	■	■	■	■	
18	Launching Sistem Informasi KSS pada Lokakarya Nasional												▲	
19	Penyiapan Laporan Akhir												▲	

Bab - 3

GRAND DESIGN DAN CETAK BIRU

BAB 3

Grand Design dan Cetak Biru

3.1 GRAND DESIGN KERJASAMA SELATAN-SELATAN INDONESIA (2011-2025)

Sampai dengan akhir masa studi, Tim Studi dengan bekerjasama Tim Koordinasi telah menyiapkan Draft ke-5 Grand Design Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia untuk tahun 2011-2025 dan Draft ke-4 Cetak Biru Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia untuk tahun 2011-2014. Draft Grand Design seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran 1.

Grand Design Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia untuk tahun 2011-2025 mencakup:

- **Bab I - Pendahuluan:** menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, tujuan, kerangka waktu, prinsip dan arah kebijakan termasuk visi dan misi KSS Indonesia.
- **Bab II: - Kondisi Lingkungan dan Dinamika Kerjasama Selatan-Selatan:** menjelaskan tentang kondisi lingkungan kerjasama Selatan-Selatan yang meliputi lingkungan strategis Indonesia, global, regional, multilateral, modal dasar dan peran Indonesia dalam KSS serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi KSS Indonesia.
- **Bab III – Cakupan dan Ruang Lingkup:** menjelaskan tentang cakupan dan ruang lingkup dari KSS Indonesia yang pada dasarnya meliputi kerjasama ekonomi, teknis, sosial-budaya dan kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi.
- **Bab IV- Tahapan dan Skala Prioritas:** menjelaskan tentang rencana prioritas yang harus dicapai oleh KSS Indonesia dalam kurun waktu 25 tahun pembangunan, dibagi 3 tahapan rencana prioritas yaitu Rencana Prioritas Periode I : 2011-2014, Periode II: 2015-2019 dan Periode III :2020-2025.
- **Bab V- Sumber Pembiayaan:** menjelaskan tentang sumber-sumber pembiayaan dari program-program KSS Indonesia yang bisa berasal dari APBN, Kerjasama Bilateral, Mitra Kerjasama, serta Swasta dan Perbankan.
- **Bab VI – Program Kerjasama:** menjelaskan tentang arah dari program-program indikatif KSS Indonesia dalam kerangka kerjasama teknik, sosial budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pencapaian target di tahun 2025.
- **Bab VII - Kawasan:** menjelaskan tentang perspektif kawasan yang akan diprioritaskan dalam kerangka pelaksanaan KSS Indonesia di masa mendatang.
- **Bab VIII - Monitoring dan Evaluasi:** menjelaskan tentang pentingnya untuk mendesain dan melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif sebagai upaya dan sarana untuk menganalisis dampak dari program terhadap lembaga pelaksana yang merupakan *center of excellent* dengan mengedepankan kepentingan nasional.

- **Bab VIII - Penutup:** menyimpulkan bahwa KSS merupakan aspek penting dalam kerangka kerjasama pembangunan internasional (*international development cooperation architecture*) dan sebagai komplemen dari Kerjasama antara Utara-Selatan. Dan oleh karena itu, Grand Desain sangat penting dan menjadi acuan bagi penyusunan peta perjalanan KSS Indonesia yang lebih komprehensif untuk kurun waktu 2011-2025 dalam pencapaian kepentingan nasional.

Visi KSS Indonesia adalah “Kemitraan yang Lebih Baik untuk Kesejahteraan” dengan misi-misi sebagai berikut:

- a. Memajukan peran Indonesia dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan untuk kepentingan nasional Indonesia;
- b. Meningkatkan solidaritas dan kemandirian bersama Selatan-Selatan melalui kemitraan dengan memanfaatkan potensi nasional;
- c. Memperkuat kerjasama pembangunan yang inovatif dan meningkatkan kesejahteraan;
- d. Mengembangkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara Selatan;
- e. Mengembangkan kerjasama teknik, sosial-budaya dan iptek dengan negara-negara Selatan;
- f. Meningkatkan pelaksanaan diplomasi Indonesia dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral, regional, multilateral dalam berbagai bidang untuk mencapai kepentingan nasional;
- g. Memainkan peran sentral sebagai *emerging economics*.

3.2 CETAK BIRU KERJASAMA SELATAN-SELATAN INDONESIA (2011-2014)

Cetak Biru Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia untuk periode 2011-2014 pada dasarnya berisi penjelasan rinci termasuk rencana langkah tindak untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia pada periode lima tahun pertama. Sedangkan untuk Kerjasama Ekonomi disinergikan dengan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan untuk periode 2010-2014. Selain itu, sebagai benang merah terhadap pencapaian visi dan misi yang tercantum dalam Grand Design, Cetak Biru KSS Indonesia dengan jelas merincikan bentuk kerjasama yang harus dilaksanakan dalam pencapaian target. Draf Cetak Biru KSS Indonesia seperti tercantum dalam Lampiran 2.

Isi dari Draf ke-4 Cetak Biru Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia untuk periode 2011-2014:

- **Bab I - Pendahuluan:** menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan hasil yang diharapkan (langkah tindak yang komprehensif dan terpadu) dalam KSS Indonesia dalam rencana pembangunan lima tahun ke depan (2011-2014).
- **Bab II – Penguatan Kerangka Hukum:** menjelaskan tentang pentingnya kerangka hukum KSS Indonesia untuk memberikan pondasi yang kuat bagi pelaksanaan KSS Indonesia serta mekanisme koordinasi antar instansi Pemerintah yang bersangkutan, lembaga non-pemerintah, mitra kerjasama internasional, swasta serta LSM dan OMS. Bagian ini juga menjelaskan tentang rencana langkah tindak dalam mencapai sasaran rencana jangka menengah.

- **Bab III – Penguatan Kelembagaan:** menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan KSS adalah kurangnya koordinasi antara para pemangku kepentingan KSS Indonesia (lembaga pelaksana dan lembaga koordinasi) dan kemungkinan untuk berevolusi melalui masa transisi ke arah pembentukan nasional *focal point* KSS Indonesia di tahun 2014, termasuk rencana langkah tindak konkrit untuk tujuan pencapaian tersebut.
- **Bab IV- Pembiayaan Kerjasama:** menjelaskan tentang modalitas pembiayaan KSS yang mungkin melibatkan Anggaran Pemerintah (APBN), Mitra Kerjasama Internasional, Kerjasama, Triangular, Swasta dan Lembaga Pembiayaan, termasuk kemungkinan untuk menyediakan dana pembangunan bagi negara-negara Selatan.
- **Bab V- Program Kerjasama:** menjelaskan tentang program dan produk pilihan, program unggulan di masing-masing jenis kerjasama (kerjasama ekonomi, teknis, sosial-budaya, iptek), termasuk rencana langkah tindak konkretnya masing-masing.
- **Bab VI – Promosi dan Publikasi:** menjelaskan tentang pentingnya penyebaran informasi tentang program dan kegiatan KSS melalui media massa, seminar, lokakarya, atau melalui tokoh masyarakat, untuk diketahui secara nasional dan global sebagai cara untuk mempromosikan program KSS Indonesia secara luas dan rencana langkah tindak konkret untuk pencapaiannya.
- **Bab VII - Monitoring dan Evaluasi:** menjelaskan tentang langkah tindak konkret yang harus dilaksanakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang menyeluruh terhadap program-program dan kegiatan KSS Indonesia.
- **Bab VIII Penutup**

Program pilihan yang didefinisikan dalam Cetak Biru KSS Indonesia 2011-2014 diharapkan mampu untuk memberikan dampak langsung dan segera bagi penguatan dan perluasan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia dan dapat memberikan dukungan bagi program pembangunan nasional serta kebijakan politik luar negeri Indonesia. Penguatan dan perluasan kerjasama ekonomi sangat diharapkan dapat dikembangkan secara paralel dengan kerjasama teknis, kerjasama sosial-budaya dan kerjasama iptek.

Kriteria program dan produk unggulan:

1. Program yang telah terbukti berhasil dan mempunyai efek multiplier (*multiplier effect*) dan sebagai katalis pembangunan nasional;
2. Merupakan program yang mempunyai keunggulan komperatif Indonesia berdasarkan pengalaman Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan mendesak negara-negara Selatan seperti penanggulangan kemiskinan, kesehatan dan keluarga berencana, pendidikan dan ketahanan pangan;
3. Program yang dapat mendorong peningkatan kemampuan dan produktifitas.

Beberapa program unggulan yang teridentifikasi:

- a. Penguatan dalam Pengembangan Kemampuan Pusat Pelatihan Pertanian FARTC di Tanzania.
- b. Pelatihan mengenai Komunikasi Perubahan Perilaku pada Keluarga Berencana Training / Kesehatan Reproduksi;
- c. Pelatihan mengenai Pengembangan Kemitraan Strategis dengan Tokoh Ulama dan Lembaga Keagamaan dalam Keluarga Berencana;
- d. Pelatihan untuk Trainer mengenai Keamanan Komoditi Kesehatan Reproduksi.

Produk pilihan untuk dipromosikan di sektor perdagangan, industri dan investasi adalah:

- Perdagangan: tekstil dan produk tekstil, elektronika, karet dan produk karet, minyak kelapa sawit, hasil hutan, alas kaki, udang, kakao dan kopi.
- Industri: pupuk, pupuk termasuk non-urea, semen, peralatan listrik rumah tangga, pulp dan kertas, mesin listrik, otomotif, karet dan produk karet (ban), barang jadi rotan dan keramik.
- Investasi: makanan, pertanian, energi, energi terbarukan infrastruktur, farmasi dan petrokimia.

DATABASE DAN SISTEM INFORMASI

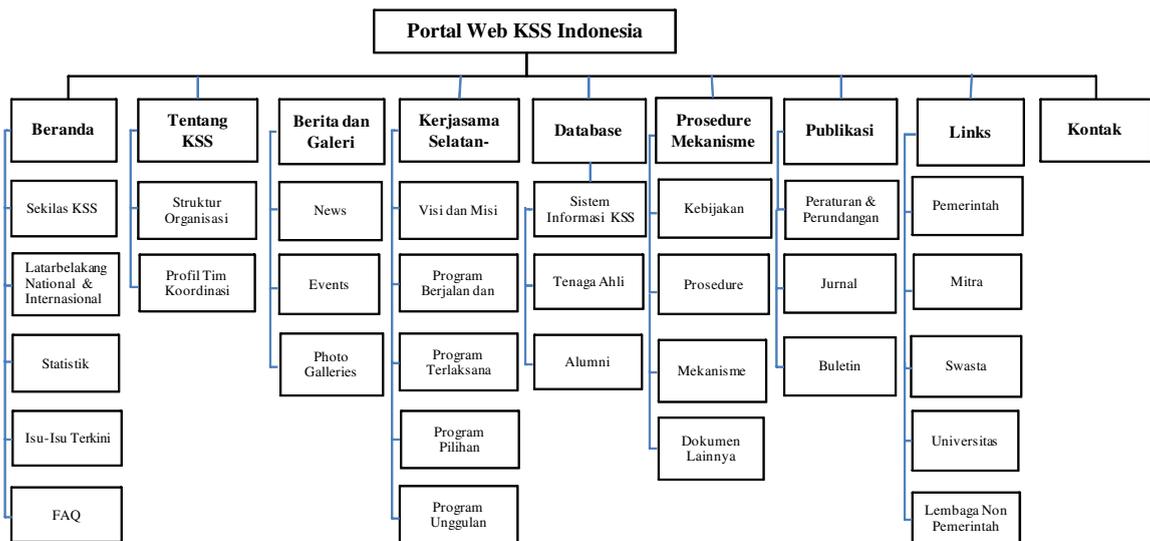
BAB 4

Database dan Sistem Informasi

4.1 PORTAL SISTEM INFORMASI KSS INDONESIA

Arsitektur dari sistem informasi Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia menggunakan Joomla sebagai *open-source* atas sistem manajemen konten (CMS) dan aplikasi MySQL untuk database. Apache Web Server digunakan untuk pengembangan dan pemeliharaan *open-source* HTTP server untuk sistem operasi modern termasuk UNIX dan Windows NT.

Portal web Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia seperti yang terlihat pada Gambar berikut:



Gambar 4.1. Portal web KSS Indonesia

Beranda:

Berisikan display halaman depan dari web. Menu ini memuat informasi tentang kegiatan dan berita-berita yang terkait dengan KSS Indonesia.

Menu ini terdiri dari sub-menu berikut:

- Sekilas KSS: menjelaskan sekilas tentang KSS dan proses dan perkembangannya.
- Latar belakang Nasional dan Internasional: menjelaskan tentang latar belakang proses pengembangan KSS baik lokal maupun secara global.

- Statistik: memuat tentang data-data statistik terkait dengan pelaksanaan KSS Indonesia.
- Isu-isu Terkini: mengakomodasi isu-isu terkini yang sedang dihadapi oleh negara-negara Selatan maupun global seperti penyakit menular, perubahan iklim, dan sebagainya.

Tentang KSS:

Memuat informasi tentang Tim Koordinasi, khususnya mengenai struktur organisasi dan profil tiap anggota Tim.

Menu ini terdiri dari sub-menu berikut:

- Struktur Organisasi: menjelaskan tentang struktur organisasi
- Profil Tim Koordinasi: menyajikan profil Tim Pengarah dan Tim Pelaksana

Berita dan Galeri:

Memuat artikel berita, *event* yang sudah dan akan dilaksanakan serta galeri foto yang terkait dengan kegiatan-kegiatan KSS dan kegiatan Tim Koordinasi dalam mengembangkan KSS seperti Pertemuan Tim Teknis dan Tim Pengarah serta galeri foto-foto untuk artikel berita dan aktifitas tersebut.

Menu ini terdiri dari sub-menu berikut:

- Berita: menempatkan tiap artikel berita yang terkait dengan KSS Indonesia termasuk kegiatan Tim Koordinasi dalam mengembangkan KSS Indonesia.
- *Event*: memperlihatkan *event* terbaru dan *event* yang akan dilaksanakan terkait dengan KSS.
- Galeri foto: dipersiapkan sebagai galeri untuk upload foto-foto terkait.

Kerjasama Selatan-Selatan:

Menu ini terdiri dari sub-menu berikut:

- Visi dan Misi: sesuai yang tercantum dalam Draf Grand Design.
- Program Berjalan dan Rencana: memperlihatkan program-program yang sedang berjalan dan rencana program yang akan dilaksanakan terkait dengan KSS.
- Program Terlaksana: memperlihatkan ringkasan kegiatan kerjasama ekonomi dan kerjasama teknik yang sudah dilaksanakan oleh tiap instansi pelaksana.
- Program Pilihan: memperlihatkan program-program pilihan pada tiap jenis kerjasama yaitu kerjasama ekonomi, teknik, sosial budaya dan iptek seperti yang tercantum di dalam Cetak Biru.
- Program Unggulan: memperlihatkan jenis program unggulan sebagai *quick win* yang tercantum dalam Draf Cetak Biru.

Database:

Menu ini terdiri dari 3 sub-menu:

- Sistem Informasi KSS: memperlihatkan database KSS yang telah terinput ke dalam sistem yang sudah dibangun.

Terdapat tiga lapis pengguna yang dapat masuk ke dalam database ini yaitu:

- Pengguna umum, yaitu pengguna yang hanya bisa melihat informasi yang disediakan dalam database dengan menggunakan *password* “*guest*”, tetapi mereka tidak dapat untuk meng-update atau merubah data yang disajikan.
- Pengguna dari institusi pelaksana, Kementerian, lembaga terkait dan tenaga ahli yang sudah terdaftar di web. Namun mereka hanya bisa memasukkan, mengubah dan meng-update data yang terkait dengan institusi mereka saja dengan menggunakan password yang telah diberikan oleh Administrator web.
- Administrator sebagai pengelola keseluruhan data dan web. Hanya Administrator saja memiliki hak untuk memasukkan data, mengubah atau mempertahankan data yang sudah tersedia serta bertanggung jawab untuk memelihara sistem secara keseluruhan.
- Tenaga Ahli: memperlihatkan daftar tenaga ahli yang sudah terdaftar dalam KSS Indonesia. Jika ada tenaga ahli yang ingin terdaftar sebagai tenaga ahli KSS Indonesia, beliau dapat mendaftar secara online. Tetapi, nama dan CV tenaga ahli tersebut akan tertera di dalam daftar tenaga ahli KSS Indonesia setelah mendapat otorisasi dari Administrator. Jadi dalam hal ini Administrator berfungsi juga sebagai penyaring apakah tenaga ahli tersebut layak dan memenuhi kriteria dan kompetensi yang diinginkan sebagai Tenaga Ahli KSS Indonesia.
- Alumni: memperlihatkan daftar alumni KSS Indonesia yang telah terdaftar di tiap instansi pelaksana. Melalui sub-menu ini, pengguna dapat juga mensortir nama-nama alumni per negara dan melihat aktivitas apa yang telah diikuti oleh alumni tersebut.

Prosedur dan Mekanisme

Menu ini terdiri dari sub-menu kebijakan, prosedur dan mekanisme serta dokumen lainnya terkait dengan KSS Indonesia:

- Kebijakan: menjelaskan tentang rencana prioritas KSS dalam pencapaian tujuan jangka panjang seperti yang terangkum dalam Grand Design. Rencana prioritas ini dibagi 3 tahap: Rencana Prioritas Periode I: untuk tahun 2011-2014; Rencana Prioritas Periode II: tahun 2015-2019 dan Rencana Prioritas Periode III: tahun 2020-2025.
- Prosedur: menginformasikan tentang prosedur dan juklak dalam melaksanakan suatu program KSS Indonesia.
- Mekanisme: menunjukkan mekanisme yang ada terkait dengan KSS.

- Lainnya: untuk mengakomodasi jika ada informasi lainnya.

Link:

Memuat link dengan web milik instansi Pemerintah, Mitra Kerjasama, pihak swasta yang terkait dengan KSS, Universitas, Lembaga Non-Pemerintah, dan sebagainya.

- Pemerintah (Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan nasional, dsb.)
- Mitra Kerjasama : JICA, UNDP, AusAID, CIDA, NAM-CSSTC, dsb.
- Swasta KADIN, Bank Exim, dsb.
- Universitas: UI, ITB, UGM, ITS, dsb.
- Lembaga Non-Pemerintah: MMTTC, CESS, dsb.

Kontak:

Memuat informasi tentang alamat kontak Sekretariat Tim Koordinasi KSS Indonesia:

Sekretariat Tim Koordinasi Kerjasama Selatan-Selatan

Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Bappenas

Jl. Taman Suropati No. 2, Lantai 6, Jakarta, 10310

Indonesia.

Phone : +62 21 3160159

Fax : +62 21 31934203

Email : info@ssc-indonesia.org

4.2 DIAGRAM ALIR (*FLOWCHART*) DATABASE

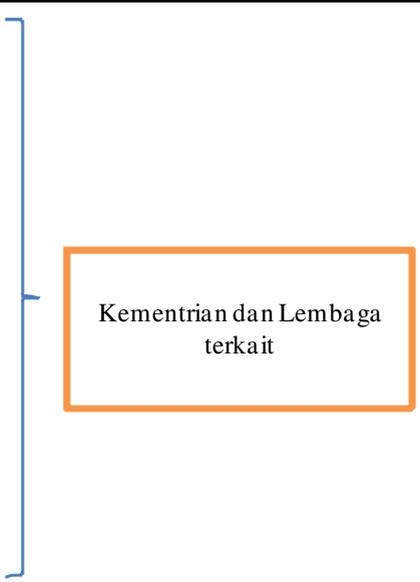
Flowchart untuk database disusun berdasarkan arahan, konsultasi, permintaan dan rekomendasi selama melakukan serangkaian pertemuan, diskusi internal dan sebagainya.

Pada prinsipnya struktur menu database terdiri dari 5 sub-menus: 1) Kerjasama; 2) Institusi; 3) Laporan; 4) Monitoring dan Evaluasi; dan 5) Exit. *Flowchart* dari sistem informasi yang dibangun oleh Tim Studi adalah seperti tertera dalam Lampiran 3-1.

4.3 INPUT DATABASE

Tim Studi telah melakukan input data untuk database KSS Indonesia. Sekitar 1,492 data telah diinput ke dalam database, termasuk 622 data tentang ekspor dan impor 10 produk terbesar ke negara-negara Selatan yang didapatkan dari Kementerian Perdagangan, dengan rincian seperti yang tertera pada Tabel 4.1. Sebagian besar dari data yang diinput merupakan data kerjasama teknik.

Tabel 4.1. Daftar Input Data Berdasarkan Jenis Kegiatan

No	Bentuk Aktivitas / Kerjasama	Total Data	Keterangan
1	Pelatihan	288	 <p>Kementerian dan Lembaga terkait</p>
2	Seminar/Lokakarya	71	
3	Studi Komparatif	35	
4	Peralatan	27	
5	Proyek Bersama	17	
6	Magang	14	
7	Pengiriman Tenaga Ahli	69	
8	Beasiswa	151	
9	Support Program	11	
10	Misi	5	
11	Konsultasi Kawasan	1	
12	Pertemuan Tingkat Tenaga Ahli	31	
13	Evaluasi	1	
14	Forum	111	
15	Pameran	38	
16	Perdagangan	622	Sumber: Kementerian Perdagangan (data per negara: Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Brunai Darusalam, Pakistan, Maladewa, Irak, Iran, Arab Saudi, dan Tunisia)
	Total	1.492	

Tabel-tabel berikut memperlihatkan daftar kegiatan / bantuan terkait KSS yang telah dimasukkan ke dalam database berdasarkan lembaganya, dibagi menjadi input data berdasarkan Lembaga Pemerintah, Lembaga Non-Pemerintah dan Swasta serta Universitas. Beberapa data yang terkumpul tidak dilengkapi dengan informasi mengenai data institusi pelaksananya, maka data-data seperti itu dimasukkan sebagai data Kementerian tersebut.

Tabel 4.2. Daftar Input Data Berdasarkan Lembaga Pemerintah

No	Institusi	Bentuk Aktivitas / Bantuan	Total	
I	Sekretariat Negara	1 Studi Komparatif	2	
		2 Peralatan	1	
		3 Pelatihan	22	
		<i>Sub-Total</i>	25	
II	Kementerian Luar Negeri	1 Magang	4	
		2 Proyek Bersama	1	
		3 Misi	1	
		4 Seminar/Lokakarya	9	
		5 Pelatihan	24	
<i>Sub-Total</i>	39			
III	Kementerian Kehutanan	1 Pelatihan	1	
IV	Kementerian Perindustrian	1 Pengiriman Tenaga Ahli	1	
		2 Pelatihan	2	
<i>Sub-Total</i>		3		
V	Kementerian Pendidikan Nasional	1 Studi Banding	4	
		2 Beasiswa	150	
		3 Pelatihan	6	
<i>Sub-Total</i>		160		
VI	Kementerian Sosial	1 Pelatihan	2	
VII	Kementerian Pehubungan	1 Seminar/Lokakarya	1	
VIII	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Studi Banding	1	
		2 Proyek Bersama	4	
		3 Beasiswa	1	
		4 Pelatihan	9	
		1. Sekolah Tinggi Multi Media (MMTC) Yogyakarta	1 Pelatihan	8
<i>Sub-Total</i>		23		
IX	Kementerian Pertanian	1 Studi Banding	2	
		2 Peralatan	20	
		3 Pengiriman Tenaga Ahli	62	
		4 Magang	6	
		5 Seminar/Lokakarya	1	
		6 Pelatihan	67	
		1. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	1 Studi banding	1
			2 Pelatihan	1
		2. Direktorat Jenderal Peternakan	1 Pelatihan	1
		3. Direktorat Jenderal Hortikultura	1 Pelatihan	7
		4. Direktorat Jenderal Pengelolaan Air dan Tanah	1 Pelatihan	6
		5. Sekretariat Jenderal	1 Peralatan	3
	2 Pengiriman Tenaga Ahli	1		
	3 Magang	1		
	4 Pelatihan	1		
6. Biro Pengembangan Pelatihan Pertanian	1 Magang	2		
7. Balai Besar Pelatihan Pertanian	1 Magang	1		
	2 Pelatihan	1		
8. Balai Besar Diklat Agribisnis Persuasion dan Teknologi Hasil Ternak (BBDAPHT), Batu, Jawa Timur	1 Pelatihan	1		
9. Badan Litbang Pertanian	1 Pelatihan	5		
10. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1 Pelatihan	5		
11. Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Malang	1 Pelatihan	3		
<i>Sub-1Sub-Total</i>		198		
X	Kementerian Pekerjaan Umum	1 Seminar/Workshop	2	
		2 Pelatihan	20	
		1. Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan	1 Peralatan	3
			2 Forum	1
			3 Proyek Bersama	2
			4 Misi	1
			5 Seminar/Lokakarya	6
			6 Pelatihan	2
		2. Pusat Penelitian and Pengembangan Permukiman	1 Pelatihan	1
		3. Pusat Pelatihan Sabo Yogyakarta	1 Pelatihan	14
<i>Sub-1Sub-Total</i>		52		
XI	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	1 Pelatihan	1	
XII	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	1 Studi Banding	24	
		2 Pertemuan Tingkat Tenaga Ahli	17	
		3 Seminar/Lokakarya	34	
		4 Pelatihan	27	
<i>Sub-Total</i>		102		
<i>Grand Total</i>		607		

Tabel 4.3. Daftar Input Data berdasarkan Lembaga Non-Pemerintah

No	Institusi	Bentuk Aktivitas / Bantuan		Total
I	Centre for Economic and Social Studies (CESS)	1	Pelatihan	1
II	Yayasan Dian Desa	1	Proyek Bersama	1
III	PT. Perkebunan Nusantara VIII	1	Pertemuan Tingkat Tenaga Ahli	1
IV	Yayasan Institut Bisnis & Ekonomi Kerakyatan (IBEKA)	1	Seminar/Lokakarya	1
V	NAM CSSTC	1	Evaluasi	1
		2	Pertemuan Tingkat Tenaga Ahli	13
		3	Proyek Bersama	1
		4	Misi	3
		5	Program Pendukung	11
		6	Konsultasi Regional	1
		7	Seminar/Lokakarya	17
		8	Pelatihan	30
	<i>Sub-Total</i>			77
	Grand Total			81

Tabel 4.4. Daftar Input Data berdasarkan Universitas

No	Institusi	Bentuk Aktivitas / Bantuan		Total
I	Institut Pertanian Bogor (IPB)	1	Proyek Bersama	8
		2	Pelatihan	7
	<i>Sub-Total</i>			15
II	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)	1	Pengiriman Tenaga Ahli	1
		2	Pelatihan	8
	<i>Sub-Total</i>			9
	Grand Total			24

Rincian informasi dan daftar aktivitas yang telah dilaksanakan oleh tiap institusi dapat dilihat dalam Lampiran 3.2 dan 3.3.

4.4 UP-LOAD SISTEM INFORMASI KSS

Sistem informasi yang telah dibangun sudah di-upload oleh oleh Tim Studi dengan menggunakan nama domain: <http://www.ssc-indonesia.org.>, sambil menunggu pembentukan lembaga koordinasi yang merupakan *national focal point* KSS Indonesia.

Setelah selesai pelaksanaan studi, perlu diingat bahwa sangatlah penting untuk tetap meng-update sistem informasi yang sudah di-upload ke publik, mengingat wadah ini bisa menjadi salah satu sarana promosi KSS Indonesia. Untuk memudahkan pekerjaan Administrator, sistem informasi ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga tiap instansi pelaksana (*center of excellent*) dimungkinkan untuk melakukan update data secara on-line dibawah koordinasi Tim Teknis dan Sekretariat Tim Koordinasi. Pedoman untuk melakukan update data sudah diakomodasikan dalam bentuk Buku Panduan.

4.5 BUKU PANDUAN

Tim Studi sudah menyiapkan dua jenis buku panduan, yaitu Buku Panduan untuk Data Entri dan Buku Panduan untuk Administrator. Buku Panduan untuk data Entri merupakan pedoman bagi Kementerian dan Institusi terkait sebagai institusi pelaksana KSS Indonesia untuk meng-update data dan informasi mereka masing-masing. Sementara, Buku Panduan untuk Administrator mencakup semua aspek pengelolaan termasuk untuk data entri dan keseluruhan sistem informasi.

Buku panduan untuk sistem informasi tersebut dijilid secara terpisah, yaitu Volume II: Buku Panduan untuk Data Entri dan Volume III: Buku Panduan untuk Administrator.

Bab – 5

AKTIVITAS STUDI

BAB 5

Aktivitas Studi

5.1 AKTIVITAS TERKAIT PENYUSUNAN GRAND DESIGN DAN CETAK BIRU

Setelah kontrak Studi antara Konsultan dan JICA ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2011, Tim Studi (Konsultan) langsung diperkenalkan kepada Ketua Tim Teknis yaitu Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Bappenas pada tanggal 12 Januari 2011. Dan karena masa kontrak Studi ini yang relatif sangat singkat yaitu hingga akhir Maret 2011, Tim Studi langsung diundang untuk menghadiri pertemuan Tim Teknis SSC khususnya untuk mendukung pengembangan database yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2011 dan pertemuan Tim Teknis pada tanggal 14 Januari 2011 di Bandung.

Selanjutnya, serangkaian pertemuan dilaksanakan dalam periode studi baik yang didanai oleh JICA maupun yang merupakan kerjasama dengan mitra kerjasama lainnya seperti UNDP. Hal tersebut sangat mendukung dalam penyusunan Grand Design, Cetak Biru dan pengembangan database KSS Indonesia. Ringkasan daftar kegiatan yang dilaksanakan selama periode studi ini adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5-1 berikut ini.

Tabel 5-1. Daftar Kegiatan yang dilaksanakan dalam Periode Studi

No.	Daftar Kegiatan	Tanggal	Tempat	Sumber Dana
1.	Pertemuan Tim Teknis	13 Januari 2011	BAPPENAS	ECBAM-UNDP
2.	Pertemuan Tim Teknis	14 Januari 2011	Hotel Swiss-bel, Bandung	ECBAM-UNDP
3.	Pertemuan Tim Teknis	4 Februari 2011	Hotel Mandarin, Jakarta	JICA
4.	Pertemuan Tim Teknis	16 Februari 2011	Hotel Nikko, Jakarta	JICA
5.	Lokakarya Regional mengenai Kerjasama Triangular: Menuju Kemitraan Horizontal, tetapi bagaimana?	27 Februari – 1 Maret 2011	Hotel Sanur Paradise, Bali	GIZ, UNDP, ADBI, dan JICA
6.	Steering Committee Meeting	8 Februari 2011	Hotel Four Season, Jakarta	JICA
7.	Pertemuan Tim Teknis	11 - 12 Maret 2011	Hotel Aston, Bogor	ECBAM-UNDP
8.	Lokakarya National	31 Maret 2011	Indonesia Kempinski Hotel, Jakarta	JICA dan ECBAM-UNDP

5.1.1 AKTIVITAS BULAN JANUARI 2011

A. Pertemuan Tim Teknis Tanggal 13 Januari 2011

Pertemuan Tim teknis yang diselenggarakan pada tanggal 13 Januari 2011 bertujuan untuk menjelaskan kepada anggota Tim Teknis dan Kementerian dan Lembaga terkait bahwa untuk mendukung pengembangan KSS Indonesia, Tim Teknis tengah melakukan penyusunan Grand Design dan sistem informasi untuk KSS Indonesia, karenanya, dengan dukungan dari JICA, Pemerintah

Indonesia akan mengumpulkan semua data dan informasi yang saat ini tersebar di tiap instansi pelaksana KSS untuk dikumpulkan pada suatu sistem database yang terpusat.

Notulen dari pertemuan ini disampaikan pada Lampiran 4-1.

B. Pertemuan Tim Teknis Tanggal 14 Januari 2011

Pertemuan Tim Teknis pada tanggal 14 Januari 2011 di Bandung dihadiri oleh sekitar 40 peserta dari Departemen dan Lembaga terkait (lihat Lampiran 4-2), berfokus pada penyusunan Grand Desain KSS Indonesia. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Dewo Broto Joko Putranto, Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Bappenas. Dalam pertemuan ini, Tim Studi telah menyiapkan tiga (3) draf dokumen:

- Bagian 1: Dokumen yang melatarbelakangi Penyusunan Grand Design KSS Indonesia;
- Bagian 2: Dokumen yang melatarbelakangi Penyusunan Cetak Biru dan Rencana Tindak;
- Bagian 3. Dokumen yang melatarbelakangi penguatan Kerangka Kelembagaan.

Dalam pertemuan ini, para peserta sepakat bahwa draf dokumen yang disusun oleh Tim Studi menjadi "Studi Empiris yang melatarbelakangi (*Background and Empirical Study*) Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia ", dan akan menjadi dokumen utama dan akan menjadi referensi dalam penyusunan grand desain KSS lebih lanjut. Para peserta juga akhirnya bermufakat untuk mengkonsolidasikan 3 draf dokumen tersebut ke dalam satu dokumen dengan format grand design yang telah disepakati. Pertemuan ini menghasilkan output yaitu visi dan misi KSS Indonesia, visi yang disepakati adalah "" Kemitraan yang lebih baik untuk kesejahteraan" dengan 4 misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan solidaritas dan kemandirian bersama Selatan-Selatan melalui kemitraan dengan memanfaatkan potensi nasional.
2. Mengembangkan kerjasama ekonomi dengan Negara-Negara Selatan.
3. Mengembangkan kerjasama teknik, sosial budaya dan iptek dengan Negara-Negara Selatan.
4. Meningkatkan pelaksanaan diplomasi Indonesia dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral, regional, multilateral dalam berbagai bidang untuk mencapai kepentingan nasional.

Berdasarkan masukan dan rekomendasi dari para peserta dalam pertemuan Bandung dan juga masukan dan komentar yang dikirimkan melalui email kepada Tim Studi dan juga dari Bappenas, maka Tim Studi memperbaiki draf dokumen menjadi Draft Dokumen ke-2.

5.1.2 AKTIVITAS BULAN FEBRUARI 2011

Pada Bulan Februari 2011, Tim Studi telah menyelenggarakan 2 (dua) Pertemuan Teknis dengan koordinasi oleh Bappenas (Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral) untuk mendiskusikan isi

Grand Design / Cetak Biru Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia (SSC) dan menghadiri lokakarya untuk Kerjasama Triangular: dengan tema “Menuju Kemitraan Horizontal, tapi bagaimana?” yang dilaksanakan di Bali dan diselenggarakan oleh Satuan Tugas Kerjasama Selatan-Selatan (*Task Team on South-South Cooperation*), bekerjasama dengan GIZ dan ADB Institut.

Selain itu, sesuai permintaan Tim Koordinasi, Konsultan akhirnya menyiapkan dua Draft Dokumen: Grand Design dan Cetak Biru. Sampai dengan akhir Februari 2011, Tim Studi telah menyusun Draft ke-4 Grand Design Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia untuk periode 2010-2025 dan draft ke-3 Cetak Biru Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia untuk periode 2011-2014.

A. Pertemuan Tim Teknis Tanggal 4 Februari 2011

Sebuah pertemuan Tim Teknis telah diselenggarakan pada tanggal 4 Februari 2011, bertempat di Hotel Mandarin, Jakarta, dipimpin oleh Dewo Broto Joko Putranto, Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas sebagai Ketua Tim Teknis. Pertemuan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari lokakarya di Bandung pada tanggal 14 -15 Januari 2011. Masukan dan rekomendasi yang dikumpulkan oleh Tim studi setelah lokakarya di Bandung, ditampung dan dirumuskan dalam Draft ke-2 Grand Desain (sebagai salah satu draft dokumen saja).

Thalib Puspokusumo, Wakil Ketua Komite Afrika KADIN dan Kelompok-15, memberikan masukan dan informasi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KADIN terkait dengan Kerjasama Selatan-Selatan, dengan fokus pada kegiatan KADIN di Afrika dan Kelompok-15. Beliau menggarisbawahi pentingnya kerjasama ekonomi pada KSS Indonesia harus sejalan dengan kerjasama teknis. Ia menyatakan pentingnya untuk memperkuat kerjasama ekonomi pada dekade ini, dalam bentuk kerjasama Pemerintah ke Pemerintah (G2G) atau Bisnis ke Bisnis (B2B). Dia lebih jauh mengungkapkan pentingnya peran Indonesia dalam Kelompok-20, yang mengharuskan Indonesia untuk berpikir dan bertindak secara global.

Di masa lalu, Indonesia telah melakukan berbagai kerjasama teknik melalui Kerjasama Teknis antar Negara-negara Berkembang (TCDC) dengan Asia dan negara-negara Afrika. Salah satu pembelajaran penting yang didapat dari TCDC Indonesia di masa lalu adalah bahwa beberapa negara yang memperoleh keterampilan dan pengetahuan dari Indonesia melalui TCDC tersebut justru lebih maju dari Indonesia saat ini khususnya pada beberapa bidang atau sektor tertentu. Hal ini berdampak pada berkurangnya daya saing Indonesia dalam bidang-bidang tertentu tersebut. Misalnya pada bidang inseminasi buatan, sekarang Malaysia justru menjadi pesaing kuat Indonesia.

Banyak permintaan datang dari negara-negara Afrika melalui KADIN untuk dapat belajar dari Indonesia pada bidang tertentu. Namun, Indonesia harus berhati-hati dan harus memperhatikan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Indonesia, harus menjaga kepentingan dan keuntungan dari kerjasama tersebut bagi Indonesia. Beberapa negara donor baru muncul di Asia seperti Malaysia, India dan Cina merupakan pesaing kuat Indonesia saat ini. Sebagai kompetitor, Cina dan India sudah bergerak lebih cepat dan secara intensif sudah memasuki negara-negara Afrika.

Pertemuan ini merupakan sarana pertukaran pandangan tentang kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama ekonomi Indonesia, dan menghasilkan suatu catatan bahwa diperlukan elaborasi lebih

lanjut tentang bidang kerjasama ekonomi yang menjadi prioritas kerjasama ekonomi Indonesia harus digarisbawahi dalam Grand Design. Pertemuan ini juga merefleksikan bahwa sangatlah sulit untuk memperoleh data dan informasi yang akurat tentang kegiatan ekonomi.

Dalam pertemuan ini, direkomendasikan untuk mengundang orang dari Kementerian dan institusi terkait untuk memperkuat Grand Design / Cetak Biru tentang kerjasama ekonomi dan skema pembiayaan. Risalah pertemuan dan daftar peserta pada pertemuan tanggal 4 Februari 2011 ini seperti yang ditunjukkan pada Lampiran 4-3.

B. Pertemuan Teknis tanggal 16 Februari 2011

Pertemuan kedua pada bulan Februari ini berlangsung pada tanggal 16 Februari 2011 di Hotel Nikko, Jakarta, untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai Draft Grand Design yang telah mengakomodasi masukan dan rekomendasi dari Pertemuan Teknis pada tanggal 4 Februari mengenai kerjasama ekonomi dan skema pembiayaan. Pertemuan ini dibagi menjadi dua (2) sesi, sesi pertama (pagi) membahas mengenai kerjasama ekonomi dan sesi kedua (sore) membahas tentang skema pembiayaan.

Dalam pertemuan ini, Tim Studi mempresentasikan draf ke-3 Grand Design sebagai penyempurnaan dari Draft dokumen ke-2. Kemudian, diikuti oleh presentasi Pak Thalib dari KADIN yang menjelaskan tentang kerjasama ekonomi dan forum-forum internasional yang telah dilaksanakan dan diikuti oleh Indonesia.

Dalam rapat ini, diinformasikan bahwa kerjasama ekonomi Indonesia pada dasarnya masih terfokus pada perdagangan bebas, dan pada produk-produk pertanian. Namun, saat ini Indonesia menghadapi masalah karena adanya pembatasan ekspor CPO ke negara-negara Uni-Eropa karena masalah ekologi dan penggunaan hutan tropis untuk penanaman pohon kelapa sawit.

Seperti yang diinformasikan oleh KADIN, Indonesia telah melaksanakan banyak kerjasama bilateral dengan berbagai mitra dari Negara-negara Selatan, seperti Pelatihan Petani (*Farmer Agriculture Rural Training*) dengan Madagaskar dan Tanzania sejak tahun 1982, kerjasama di bidang agro bisnis dan gula dengan Fiji, kerjasama pada sektor pertanian, terutama dalam bidang peternakan dengan Australia dan Belanda, minyak dan buah-buahan tropis dengan Malaysia, kerjasama perdagangan, industri dan pariwisata dengan Mesir, dan sebagainya. KADIN juga memfasilitasi pengusaha muda dari Zimbabwe yang ingin mengetahui lebih rinci tentang bidang tekstil, furniture, komunikasi, dan sebagainya dari Indonesia.

Kerjasama dengan Suriname ini dimulai sejak tahun 1991, dan sebagai tindak lanjut, pada tahun 1994, Presiden Suriname mengunjungi Indonesia dan memutuskan untuk mengimpor Crude Palm Oil (CPO) dari Indonesia. Sejak 1982-1995, Suriname telah berpartisipasi dalam program pelatihan di Indonesia di bidang pertanian, informasi, komunikasi massa, pertambangan dan energi, pekerjaan umum, sosial, perdagangan dan industri. Suriname juga meminta untuk diijinkan untuk berpartisipasi dalam pelatihan magang petani di sektor pertanian.

KADIN lebih lanjut menguraikan informasi tentang kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia dengan negara-negara Afrika. Pada tahun 1996, Indonesia bersama-sama dengan FAO telah membangun dua pusat pelatihan pertanian (Pusat Pelatihan Pertanian bagi Petani Pedesaan / ARFTC)

di Jenoi-Gambia untuk wilayah Afrika Barat dan di Tanzania untuk wilayah Timur Afrika. Pembangunan kedua pusat pertanian tersebut dibiayai oleh Asosiasi Petani di Indonesia. Sejak beroperasinya pada tahun 1998, Pusat Pelatihan Pertanian bagi Petani Pedesaan di Jenoi telah melatih lebih dari 1.500 petani Gambia dan petani dari 6 negara Afrika Barat seperti Senegal, Mali, Niger, Sierra Leone, Guinea Bissau dan Guinea Conakry.

Indonesia telah mengirimkan 10 unit traktor tangan dan menugaskan tiga (3) penyuluh pertanian ke Fiji. Indonesia telah melatih sekitar 50 mahasiswa dari Highlands Agriculture College, Mt. Hagen, Papua New Guinea (PNG), mengenai peternakan, perikanan, manajemen, penyuluhan, strategi pemasaran dan fasilitas kredit mikro untuk mendukung pengembangan pertanian. Indonesia juga telah mengirimkan ahli budidaya padi pada kegiatan Peningkatan Pengembangan Produksi Padi Rakyat, melalui kerjasama tripartit dengan JICA, pada tahun 2003-2004.

Menindaklanjuti kerjasama di sektor pertanian antara Indonesia dan Namibia, Universitas Gadjah Mada telah melaksanakan kerjasama budidaya padi dengan Universitas Namibia.

Indonesia juga telah melakukan kerjasama bilateral dengan Vanuatu sejak tahun 2001 melalui menandatangani kesepakatan dalam bentuk *Record of Discussion* antara Direktorat Jenderal Peternakan RI dan Direktorat Jenderal Pertanian, Karantina, Kehutanan dan Perikanan Republik Vanuatu. Selain itu, Indonesia telah menyumbangkan sekitar USD 40.000 pada tahun 2004, untuk membantu Vanuatu mengingat 40% dari lahan pertanian mereka rusak karena badai Ivy.

Terkait dengan posisi Indonesia dalam Kerjasama India Ocean Rim (IOR-ARC), Indonesia harus melakukan diversifikasi pasar dan pengembangan ekspor. Dalam posisi ini, Indonesia harus mengantisipasi dan mengembangkan lebih lanjut tentang manajemen perbankan dan menekankan pada kawasan perdagangan bebas (FTA). Juga perlu untuk memperkuat adanya jaminan atau kepastian hukum untuk melakukan bisnis di Indonesia. Selain itu, perlu juga peningkatan mengenai manajemen perbankan dan kemungkinan untuk menciptakan skema pembiayaan oleh lembaga keuangan Indonesia terhadap negara-negara berkembang. Berdasarkan pengalaman, beberapa Bank masih enggan untuk berurusan dengan LC dari beberapa negara berkembang yang dikategorikan sebagai negara berisiko tinggi seperti Iran. Oleh karena itu, keterlibatan Lembaga Pembiayaan dan Regulator bagi lembaga-lembaga tersebut diperlukan dalam memperkuat kerjasama ekonomi.

Pemerintah juga harus memfasilitasi sektor swasta untuk meningkatkan perdagangan internasional dan investasi Indonesia di luar negeri dengan melakukan pemetaan mengenai peluang, potensi dan cara untuk mengurangi bea masuk ke negara-negara yang dapat diakses oleh perusahaan Indonesia atau dukungan dalam menyiapkan kontrak karena beberapa Usaha Kecil Menengah (UKM) telah sukses memasuki pasar global.

Di sektor industri, beberapa perusahaan swasta dan produk Indonesia telah sukses memasuki pasar Afrika dan negara-negara berkembang lainnya, seperti tekstil, agro-industri, pabrik pupuk gas berbasis di Teheran (Iran). Dan sebagai hasil dari kunjungan Presiden RI ke India, suatu MoU untuk bekerjasama mengenai pupuk, gas dan pertambangan batubara telah ditandatangani. Ada keinginan dari Mozambik untuk bekerjasama dalam pengolahan kapas, karena Mozambik menghasilkan banyak sekali bahan baku kapas, dan Indonesia terkena bagus untuk tekstilnya.

Terkait dengan Palestina, sejak tahun 2010 ada dua batch pelatihan mengenai las (*welding*) yang telah dilaksanakan, difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian. Peserta yang berpartisipasi dalam pelatihan tersebut cenderung untuk berkurang (dari 12 orang di tahun 2010 menjadi 10 orang pada tahun 2011) karena sulitnya bagi warga Palestina untuk keluar dari negara mereka.

Pada sesi sore dibahas lebih lanjut mengenai skema pembiayaan. Dari informasi pada pembahasan diketahui bahwa pada dasarnya belum ada dasar hukum yang mengatur tentang peran Indonesia sebagai donor yang baru (*new emerging donor*) atau mekanisme yang jelas untuk mengalokasikan dana untuk kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan dalam Anggaran Nasional (APBN). Karena itu, sangatlah sulit untuk mengusulkan anggaran untuk program KSS ke Direktorat Anggaran, Kementerian Keuangan. Mekanisme pembiayaan yang ada mengharuskan memasukkan daftar kegiatan tersebut ke dalam rencana kerja (RKP), jika suatu kegiatan diusulkan untuk dibiayai oleh APBN. Yang menjadi permasalahan adalah jika kebutuhan untuk melaksanakan suatu kegiatan muncul di tengah-tengah pelaksanaan Tahun Anggaran, maka proses tersebut harus melalui revisi APBN (APBNP), sementara momentum untuk kebutuhan tersebut akan terlewat jika menunggu proses revisi lewat APBNP. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang jelas untuk dapat menjembatani kebutuhan aktifitas terkait dengan Kerjasama Selatan-Selatan. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan pentingnya pembentukan *nasional focal point*, termasuk pentingnya melibatkan Kementerian Keuangan dalam *nasional focal point* tersebut atau sebagai Tim Koordinasi (selama masa transisi) agar dapat mendukung pengusulan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBN.

Kriteria dan indikator program unggulan juga perlu ditetapkan. Namun, atas dasar arahan dari Tim Pengarah KSS Indonesia untuk menyertakan program unggulan sebagai *quick win*, maka diputuskan untuk memasukkan program yang benar-benar dikuasai oleh Indonesia seperti revitalisasi "Pusat Pelatihan Pertanian Petani Pedesaan/ARFTC" di Tanzania, program unggulan dari BKKBN, program untuk Palestina dan obat-obatan herbal (*herbal medicine*).

Selain itu, belajar dari pengalaman masa lalu Jepang dalam memberikan bantuan (*Overseas Development Assistance / ODA*) untuk Indonesia, awalnya hanya berfokus pada kerjasama ekonomi, namun sekarang Jepang fokus pada kerjasama teknis. Bantuan ODA Jepang juga terfragmentasi di banyak sektor. Dalam kerjasamanya dengan Indonesia, JICA bertindak sebagai fasilitator untuk meningkatkan strategi dan kebijakan Indonesia. Oleh karena itu, kerjasama Indonesia harus didasarkan pada prinsip global seperti solidaritas, kepercayaan, tulus, saling menghargai, dapat menerima dan percaya diri, sama seperti ketika Indonesia diposisikan sebagai negara penerima bantuan. Indonesia harus memulai kerjasama sebagai donor yang baru dengan sikap yang baik, perlahan tapi tetap berkelanjutan.

Selanjutnya, Pemerintah Jepang juga melakukan koordinasi dengan sektor publik dan swasta. Jepang memiliki Satgas (*Task Force*) untuk ODA pada Kedutaan di berbagai negara. Oleh karena itu, konsensus antara KADIN dan instansi terkait juga harus ditetapkan secara seksama dan harus dapat diterima oleh seluruh lembaga. Semua instansi terkait harus memiliki persepsi yang sama dan pola kerjasama yang disepakati dalam membawa nama Indonesia di luar negeri. Kemudian, kerjasama tersebut harus bersifat unik atau spesifik agar dapat diterima di pasar global. Ada beberapa akses yang telah tersedia, seperti Kelompok-15, Kelompok-20, dan sebagainya. Dan untuk mempromosikan investasi luar negeri Indonesia (FDI) di dalam maupun di luar negeri, Bank Indonesia harus mampu

memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang lainnya, dilengkapi dengan kesiapan regulator dan aturan-aturannya.

Notulen rapat dan daftar hadir pertemuan tanggal 16 Februari 2011 adalah sebagai terangkum dalam Lampiran 4-4.

C. Lokakarya Kerjasama Triangular tanggal 27 Februari – 1 Maret 2011

Tim Studi juga ikut berpartisipasi pada lokakarya "Kerjasama Traingular: Menuju Kemitraan Horizontal, tapi bagaimana? Lokakarya itu berlangsung pada tanggal 27 Februari - 1 Maret 2011 di Bali. Paralel dengan Lokakarya tersebut Pak Adik Bandoro juga menghadiri Lokakarya Selatan-Selatan untuk *Case Writers*.

Workshop ini bertujuan untuk mengumpulkan para praktisi dan pembuat kebijakan terutama yang berasal dari kawasan Asia untuk melakukan pembahasan tentang kerjasama triangular sebagai alat untuk kemitraan yang inovatif dan horizontal berdasarkan keadaan terkini. Lokakarya ini merupakan bagian dari lingkup kerja Satuan Tugas Kerjasama Selatan-Selatan (TT-SSC) dan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk persiapan Pertemuan Tingkat Tinggi (HLF) di Busan mengenai Efektifitas Bantuan dan juga bagi pertemuan atau forum lainnya terkait dengan Kerjasama Selatan-Selatan dan Kerjasama Triangular. Diharapkan juga, akan memberikan solusi bagi tantangan utama dan pembelajaran yang diidentifikasi menjelang HLF Busan dan merumuskan langkah konkrit dalam menghasilkan *good-practices*, khususnya dengan melakukan analisa mengenai kerjasama triangular. Lokakarya ini didukung oleh *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH* atas nama Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Federal Jerman (BMZ), Pemerintah Indonesia dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

Lebih dari 50 praktisi dan pembuat kebijakan yang terlibat dalam kerjasama triangular, mitra dan donor tradisional serta organisasi multilateral yang berpartisipasi dalam lokakarya tersebut. Peserta yang diundang berasal dari berbagai kawasan. Kriteria utama penyeleksian meliputi keterlibatan dalam *case stories* generasi pertama, partisipasi dalam proses HLE dan pengetahuan mengenai substansi kerjasama triangular dari sudut pandang *best practices*. Semua peserta diharapkan dapat berperan aktif, dengan membuat presentasi, memberikan catatan penting atau memfasilitasi diskusi meja bundar.

Notulen lokakarya tersebut seperti yang terangkum pada Lampiran 4-5.

5.1.3 AKTIVITAS BULAN MARET 2011

A. Pertemuan Tim Pengarah pada tanggal 8 Januari 2011

Dalam bulan Maret 2011, Konsultan telah menyelenggarakan satu pertemuan dengan Tim Pengarah KSS Indonesia pada tanggal 8 Maret 2011 di Hotel Four Season, Jakarta. Pertemuan itu dipimpin oleh Lukita Dinarsyah Tuwo (Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Wakil Kepala Bappenas) dan dihadiri juga oleh Triyono Wibowo (Wakil Menteri Departemen Luar Negeri), Bapak

Soemadi Brotodiningrat (mantan duta besar Indonesia untuk Jepang sebagai Resource Person), Ibnu Purna (Sekretaris Menteri Sekretariat Negara), dan anggota lain dari Tim Koordinasi dari BAPPENAS, Kemenlu, Kemenkeu dan Sekretariat Negara serta dari Kementerian lainnya yang terkait.

Dalam pertemuan ini, Dewo Broto (Direktur Pendanaan Multilateral, Bappenas) melaporkan kemajuan penyusunan Grand Desain dan Cetak Biru kepada Tim Pengarah, serta rencana untuk meluncurkan Grand Desain/Cetak Biru serta database (sistem informasi) pada sebuah lokakarya pada akhir Maret 2011.

Beberapa rekomendasi dari Tim Pengarah untuk perbaikan Grand Desain dan Cetak Biru Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia, antara lain:

- Karena Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia akan difokuskan pada kerjasama ekonomi yang menuju pada peningkatan perdagangan dan diplomasi internasional, maka Grand Desain harus secara jelas mendefinisikan mengenai pembangunan ekonomi dan diterjemahkan ke dalam rencana aksi praktis melalui suatu benang merah dalam Cetak Biru KSS Indonesia tentang bagaimana cara mencapai visi KSS Indonesia pada tahun 2025.
- Konsep Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia harus tidak lagi bercermin pada paradigma lama dan menekankan pada terciptanya peluang dan kesempatan bersama (*mutual oportunity*) di antara negara-negara Selatan.
- Kerjasama regional harus menjadi konsep dalam pengembangan KSS. Sebagai contoh, saat ini ASEAN sedang melakukan pembangunan komunitas. Di negara-negara Afrika, KSS banyak dilakukan melalui kerjasama regional. Selain itu, dalam hal kawasan, prioritasnya dapat diarahkan pada peningkatan diplomasi. Hal tersebut juga diperlukan guna meningkatkan industri Indonesia. Oleh karena itu, fleksibilitas mengenai prioritas kawasan diperlukan daripada hanya terfokus pada satu kawasan saja.
- Selain itu perlu juga untuk mengetahui potensi Indonesia dalam menangani isu-isu terkini dan dapat dipergunakan sebagai program unggulan dan program *quick win*.
- Disarankan untuk melaporkan keberadaan dan progres perkembangan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia kepada Presiden karena dapat digunakan sebagai sarana promosi bagi Presiden dalam membangun citra yang baik bagi Indonesia di mata masyarakat internasional. Setelah selesainya penyusunan Grand Design dan Cetak Biru ini, akan diteruskan untuk didiskusikan di Tingkat Menteri.
- Grand Design harus mencakup konsep berbasis peluang, fleksibilitas pada prioritas kawasan untuk memenuhi kepentingan nasional, penguatan koordinasi dengan melibatkan organisasi yang ada seperti NAM Center, dan sebagainya. Selain itu harus ada sinergi antara visi, misi serta sinergi antara Pemerintah, KADIN dan sektor swasta.

Notulen pertemuan ini ditampilkan dalam Lampiran 4-6.

B. Pertemuan Tim Teknis Tanggal 11-12 Maret 2011

Pertemuan Tim Teknis untuk mengakomodasi arahan dan rekomendasi dari Tim Pengarah dilaksanakan pada tanggal 11-12 Maret 2011 di Hotel Aston, Bogor. Pertemuan ini difasilitasi oleh UNDP (Proyek ECBAM).

Pertemuan ini pada dasarnya bertujuan untuk memahami Facebook masukan lebih lanjut dan rekomendasi untuk memperkuat Grand Desain Blueprint Indonesia Kerjasama Selatan-Selatan terutama pada kerjasama ekonomi.

Notulen rapat ini seperti ditampilkan pada Lampiran 4-7.

C. Lokakarya Nasional Tanggal 31 Maret 2011

Lokakarya Nasional yang difokuskan untuk membahas tentang kerjasama ekonomi dilaksanakan di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, pada tanggal 31Maret 2011 yang merupakan hari terakhir masa pelaksanaan Studi ini. Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk:

- a. Mendapatkan masukan bagi penyempurnaan Grand Design dan Cetak Biru KSS Indonesia terutama mengenai isu-isu ekonomi dalam kaitan dengan Kerjasama Selatan-Selatan.
- b. Memetik pembelajaran (*lessons learned*) dari kerjasama teknik yang sudah dilaksanakan dan bagaimana mengkaitkannya dengan kerjasama ekonomi.
- c. Memformulasi bentuk kerjasama ekonomi KSS Indonesia.
- d. Merekomendasikan pendekatan alternatif bagi kerjasama ekonomi Indonesia dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan.

Lokakarya ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kerjasama ekonomi dapat memberikan kontribusi terhadap Kerjasama Selatan-Selatan?
2. Dimanakah posisi kerjasama ekonomi dalam aspek kerjasama teknik Selatan-Selatan?
3. Bagaimana agar kerjasama ekonomi dan kerjasama teknik dalam kerangka KSS dapat dihubungkan secara efektif?
4. Bagaimanakah cara terbaik untuk mengelola kerjasama ekonomi dalam kerangka KSS?
5. Bagaimana agar pihak swasta dapat berkontribusi secara efektif dalam kerjasama teknik?

Ada tiga orang panelist ikut mempresentasikan makalahnya dalam lokakarya ini, yaitu:

1. Dennis Nkala (*Chief Asia Pacific South-South Cooperation Unit of UNDP*) yang mempresentasikan tentang Hubungan antara Kerjasama Ekonomi dan Teknik;

2. Martha Dhini (Direktur Bilateral dan Multilateral, BKPM), menyajikan tentang Tinjauan mengenai Penanaman Modal Asing dan Strategi Kebijakan Investasi di Masa Mendatang;
3. Edward (Direktur APEC dan Organisasi Internasional Lainnya, Kemendag) mempresentasikan tentang Strategi Perdagangan dan Investasi Indonesia dalam Kerangka Kerjasama Selatan-Selatan.

Selain itu, ada dua (2) responden yaitu Shigeki Nakazawa dari JICA dan Indrasari Wisnu W. (Direktorat Pasar dan Informasi Ekspor, BPEI) ikut meramaikan lokakarya dengan memberikan respon berdasarkan pengalaman praktis mereka.

Notulen dari Lokakarya ini serta daftar peserta yang hadir pada lokakarya ini seperti yang terangkum pada Lampiran 4-8.

5.2 AKTIVITAS TERKAIT PENGEMBANGAN DATABASE

5.2.1 PERTEMUAN UNTUK PEMBAHASAN DATABASE

Tim Studi langsung diundang oleh Bappenas untuk menghadiri pertemuan pertama pada tanggal 13 Januari 2011 dengan Kementerian dan Lembaga terkait guna untuk mempercepat pengembangan database. Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 30 peserta dan dipimpin langsung oleh Dewo Broto Joko Putranto, Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Bappenas, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim teknis KSS Indonesia. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas lebih lanjut tentang rencana pengembangan database dan mengumpulkan informasi yang terkait dengan KSS, yang saat ini tersebar di masing-masing Kementerian dan Lembaga terkait. Dalam kesempatan ini, Bappenas juga membagikan format isian untuk database yang harus diisi dan diserahkan oleh Kementerian dan Lembaga terkait dalam rangka pembangunan dan pengembangan database. Bappenas berencana untuk mengumpulkan data setidaknya data tentang kegiatan KSS pada 10 tahun terakhir yang telah dilaksanakan oleh tiap Kementerian dan Lembaga terkait.

Selain itu dalam rangka percepatan pengembangan database, Tim Studi sebagaimana yang diminta oleh Pak Dewo telah melakukan koordinasi yang cukup intensif dan berkomunikasi dengan staf Bappenas lainnya untuk membahas tentang *content* yang diharapkan ada pada database KSS Indonesia. Pertemuan kedua dengan Pak Dewo, staf dari Bappenas serta Pak Choesni dan stafnya dari A4DES dengan tujuan membahas tentang pengembangan database diadakan pada tanggal 21 Januari 2011. Dalam pertemuan ini, Tim Studi juga menyajikan progress pengembangan berdasarkan prototipe database yang telah dibangun oleh CEACoS. Dalam pertemuan ini akhirnya disepakati bahwa database KSS Indonesia akan ditempelkan pada prototipe yang dibangun oleh CEACoS, dan sementara akan dilekatkan pada website milik Bappenas.

Pertemuan internal ketiga dengan staf teknis Bappenas untuk membahas lebih lanjut tentang database dilakukan pada tanggal 28 Januari 2011 dan Tim Studi diminta untuk mempersiapkan struktur diagram alur (*flow chart*) database yang akan dibangun untuk disampaikan pada pertemuan tanggal 4 Februari 2011.

Dalam pertemuan teknis di Hotel Mandarin pada tanggal 4 Februari 2011, Tim Studi berkesempatan untuk mendiskusikan dan menunjukkan rencana kerja dan flowchart dari Sistem Informasi dan Database yang sedang dikembangkan. Tim Studi diminta untuk memberikan sampel input dengan mengunjungi langsung Kementerian dan Lembaga terkait dalam rangka mengumpulkan data dan Bappenas akan memfasilitasi kunjungan tersebut dengan menyiapkan surat kepada Kementerian dan Lembaga terkait.

Karena Sistem Informasi KSS tidak hanya akan dilihat oleh pengguna dari Indonesia, tetapi juga untuk mengekspos potensi Indonesia ke luar negeri terutama ke negara-negara Selatan, maka perlu juga dibuat dalam versi bahasa Inggris. Sistem Informasi KSS Indonesia ditargetkan akan diluncurkan pada Lokakarya Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2011. Karena singkatnya waktu pelaksanaan Studi, Tim Studi harus berkonsentrasi untuk menyiapkan database dalam versi Bahasa Inggris terlebih dahulu.

Tim Studi mempresentasikan kemajuan pengembangan Database KSS Indonesia pada pertemuan Tim Teknis tanggal 12 Maret 2010 dan beberapa saran dan permintaan yang menginginkan penekanan pada informasi kerjasama ekonomi dalam database muncul selama diskusi. Pada prinsipnya, Tim Studi berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaan tersebut.

Foto-foto dari tiap kegiatan dalam studi ini diperlihatkan dalam Lampiran 5.

5.2.2 KUNJUNGAN KE INSTITUSI PELAKSANA

Untuk memenuhi tuntutan dalam melakukan percobaan dalam melakukan pengembangan database dan untuk pengumpulan data untuk dapat diinput pada database tersebut, Tim Studi melakukan kunjungan ke beberapa instansi terkait untuk mengumpulkan data, dengan berbekal surat yang diterbitkan pada tanggal 8 Februari 2011 oleh Bappenas.

Tim Studi telah melakukan kunjungan ke BKKBN pada tanggal 10 Februari 2011, dan mengumpulkan informasi yang dapat dijadikan masukan sebagai sampel input database KSS Indonesia. Namun, Tim masih tidak dapat mengumpulkan data yang berhubungan dengan informasi

keuangan untuk kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh BKKBN sebagai lembaga pelaksana.

Selain itu, Tim Studi juga mengunjungi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian pada tanggal 25 Pebruari 2011. Untuk Kementerian Pekerjaan Umum, karena unit pelaksana kebanyakan berlokasi di Bandung, maka Tim dianjurkan untuk mengunjungi pusat-pusat mereka di Bandung. Tim Studi telah mengunjungi Pusat Perumahan dan Permukiman dan Jalan dan Jembatan Pusat di bawah Departemen Pekerjaan Umum di Bandung pada tanggal 9 Maret 2011.

Tim juga melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Kementerian Pertanian di Jakarta, dan mampu mengumpulkan beberapa data dan informasi yang terkait dengan kerjasama Selatan-Selatan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian karena sebagian besar pusat baik (unit pelaksana) dari Selatan-Selatan Kerjasama kegiatan sebagian besar tersebar secara nasional. Karena itu, ketika melakukan kunjungan ke Bandung, Tim mencoba untuk mengunjungi Pusat Pelatihan Pertanian (BBPP) di Lembang, Bandung.

Untuk mengakomodasi permintaan ke lebih mengekspos mengenai kerjasama ekonomi, Tim telah mengunjungi Kementerian Perdagangan pada tanggal 18 Maret 2011, dan berdiskusi dengan staf dari Direktorat APEC dan Organisasi Internasional Lainnya untuk mengumpulkan data pada ekspor komoditas Indonesia ke negara-negara Selatan atau Regional lainnya. Semua data yang dikumpulkan telah dimasukkan ke dalam database KSS Indonesia.

5.2.3 KENDALA

Kendala yang dihadapi oleh Konsultan terutama dalam mengakomodasi permintaan dari Bappenas untuk mengkompilasi informasi tentang seberapa besar kontribusi Indonesia dalam 10 tahun terakhir terkait dengan Kerjasama Selatan-Selatan. Karena data-data tersebut tersebar dan tidak dikompilasi secara terintegrasi oleh tiap institusi pelaksana, sangat sulit bagi Tim untuk akses informasi khususnya pada aspek keuangan.

Selain itu, dikarenakan tidak adanya mekanisme yang pasti dan jelas tentang alokasi anggaran dalam pelaksanaan program di tingkat instansi pelaksana, juga berdampak pada kesulitan dalam melacak informasi tersebut.

Bab- 6

KESIMPULAN

BAB 6

Kesimpulan

6.1 FAKTOR YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN KSS

Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Selatan-Selatan yang diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas tertanggal 2 Agustus 2010 merupakan salah satu faktor yang mendukung pengembangan KSS Indonesia. Keterlibatan empat Kaki sebagai pemangku kepentingan (Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan dan Bappenas) sangatlah penting dalam fase reformulasi dan revitalisasi KSS Indonesia.

Fase ini akan berkembang secara bertahap menjadi entitas yang lebih konkrit sebagaimana diamanatkan oleh RPJM. Fase ini merupakan fase penting yang berfungsi sebagai jembatan dalam pembentukan *Focal Point* KSS Indonesia. Koordinasi yang erat antar instansi pemerintah dan komitmen mereka terhadap KSS juga merupakan faktor yang turut mendorong berhasilnya pelaksanaan KSS Indonesia. Hal tersebut juga memberikan dukungan dan support dalam perumusan dan penyusunan Grand Design dan Cetak Biru KSS Indonesia.

6.2 FAKTOR YANG MENGHAMBAT PELAKSANAAN KSS

Tim Pengarah KSS Indonesia memberikan arahan bahwa Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia harus fokus pada pembangunan ekonomi yang mengarah ke perdagangan internasional dan penguatan diplomasi internasional. Dengan berbekal hal tersebut dan pertimbangan penekanan pada esensi kerjasama ekonomi yang memberikan peluang dan kesempatan yang sama (*mutual opportunity*) untuk semua yang diprioritaskan dalam memenuhi kepentingan nasional.

Namun, sangatlah sulit dalam merumuskan langkah kongkrit dan bentuk kerjasama ekonomi karena keterbatasan data dan informasi tentang kerjasama ekonomi yang telah dilaksanakan oleh Indonesia dalam kaitan Kerjasama Selatan-Selatan.

Faktor lain yang menghambat adalah kurang memadainya alokasi dana sebagai kunci utama untuk mendukung pelaksanaan KSS Indonesia. Sementara pembiayaan program yang selama ini berasal dari mitra kerjasama internasional cenderung mengalami penurunan. Karena itu, saat ini Indonesia harus meletakkan prioritas pada penggunaan dana dari APBN, melakukan kerjasama triangular dengan partner pembangunan lainnya atau melibatkan pihak swasta dalam mendanai kegiatan KSS Indonesia. Namun tidak adanya dasar hukum untuk mengakomodasikan mekanisme pembiayaan peran serta Indonesia sebagai negara donor masih membatasi Pemerintah dan pihak swasta untuk terlibat lebih jauh dalam KSS. Selain itu, Pemerintah Indonesia harus mampu memfasilitasi pihak swasta yang

ingin berinvestasi atau bekerjasama dengan negara-negara Selatan dengan memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai.

Data dan informasi mengenai program-program yang terkait dengan Kerjasama Selatan-Selatan dan telah dilaksanakan tersebar karena sebelumnya dilakukan secara independen oleh lembaga pelaksana di masing-masing Kementerian. Di beberapa lembaga data KSS tidak dikelola dan ditata dengan baik, terutama mengenai informasi pembiayaan, sebagian besar masih tersebar dan tidak dapat dikumpulkan selama pelaksanaan studi. Oleh karena itu, untuk tujuan pengelolaan dan pelaksanaan KSS yang baik, diperlukan adanya suatu pengelola data terpusat di bawah koordinasi Sekretariat Tim Koordinasi Kerjasama Selatan-Selatan.

6.3 KESIMPULAN

- Pada prinsipnya, Tim Koordinasi KSS telah sukses memformulasikan Grand Design dan Cetak Biru KSS Indonesia dalam waktu yang singkat.
- Koordinasi yang erat antar pemangku kepentingan, JICA dan mitra lainnya seperti UNDP selama pelaksanaan Studi telah ikut memberikan kontribusi yang baik terhadap output dari pencapaian Studi.
- Kelanjutan dari proses ini setelah berakhirnya Studi ini sangat penting demi mencapai tujuan dari KSS Indonesia.

6.4 PEMBELAJARAN (*LESSON LEARNED*) DARI PELAKSANAAN KSS

- Kerjasama antar institusi dan lembaga terkait (lembaga pelaksana, lembaga kordinasi, pihak swasta dan Organisasi Kemasyarakatan Sipil/CSO) sangat penting dalam meningkatkan pengembangan KSS Indonesia dan karenanya perlu dibentuk suatu *national focal point* sebagai satu-satunya institusi yang akan mengelola dan mengkoordinasikan KSS Indonesia di masa mendatang.
- Masing-masing lembaga pelaksana yang menjadi *center of excellent* harus meningkatkan kemampuannya dalam menangani isu-isu terbaru.
- Perlunya untuk membangun kerangka hukum dan peraturan untuk memfasilitasi peningkatan perdagangan internasional dan diplomasi Indonesia di masa mendatang
- Perlunya untuk menetapkan standar nasional untuk monitoring dan evaluasi yang akan sangat membantu dalam meningkatkan pelaksanaan program-program KSS Indonesia di masa mendatang.

Lampiran - 1

GRAND DESIGN KERJASAMA SELATAN-SELATAN INDONESIA

DRAF

GRAND DESIGN

KERJASAMA SELATAN-SELATAN INDONESIA

2011-2025

DRAF KE-5

31/03/11

DAFTAR ISI
GRAND DESIGN KERJASAMA SELATAN SELATAN INDONESIA
2011-2025

BAB I PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. DASAR HUKUM	3
3. TUJUAN	3
4. KERANGKA WAKTU	4
5. PRINSIP, VISI DAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN	4
a. Prinsip Kerjasama Selatan-Selatan	4
b. Visi Dan Misi	5
BAB II KONDISI LINGKUNGAN DAN DINAMIKA KERJASAMA SELATAN-SELATAN.....	6
1. KONDISI LINGKUNGAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN.....	6
a. Lingkungan Strategis Indonesia.....	6
b. Global.....	7
c. Regional	8
d. Multilateral.....	9
2. MODAL DASAR DAN PERAN INDONESIA.....	10
a. Modal Dasar	10
b. Peran Indonesia	11
3. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN	13
a. Permasalahan	13
b. Tantangan	14
BAB III CAKUPAN DAN RUANG LINGKUP	16
1. KERJASAMA EKONOMI	16
a. Perdagangan.....	17
b. Investasi	18
2. KERJASAMA TEKNIK	19
a. Program Pelatihan	19

b. Beasiswa.....	20
c. Bantuan Proyek.....	20
3. KERJASAMA SOSIAL BUDAYA.....	21
a. Pendidikan.....	21
b. Pariwisata.....	21
4. KERJASAMA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.....	22
5. KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH.....	23
6. KERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAINNYA.....	23
a. Swasta.....	23
b. Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi Masyarakat Sipil.....	24
c. Perguruan Tinggi.....	24
BAB IV TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS.....	25
1. RENCANA PRIORITAS PERIODE I : 2011-2014.....	25
2. RENCANA PRIORITAS PERIODE II : 2015-2019.....	26
3. RENCANA PRIORITAS PERIODE III : 2020-2025.....	27
BAB V SUMBER PEMBIAYAAN.....	28
1. APBN.....	28
2. KERJASAMA BILATERAL.....	29
3. MITRA KERJASAMA INTERNASIONAL.....	29
4. SWASTA DAN PERBANKAN.....	30
5. TRUST FUND.....	31
BAB VI PROGRAM KERJASAMA.....	31
BAB VII KAWASAN.....	33
1. KAWASAN PASIFIK.....	34
2. KAWASAN ASIA SELATAN DAN TENGAH.....	35
3. KAWASAN AFRIKA.....	36
4. KAWASAN AMERIKA SELATAN.....	37

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI.....38

BAB IX PENUTUP39

DRAFT

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) dapat dirunut dari gerakan dan sikap politik anti kolonialisme dan keinginan untuk melepaskan diri negara-negara bekas jajahan. Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 merupakan titik awal dari pergerakan politik dunia ketiga. Gerakan politik tersebut ditindaklanjuti dengan terbetuknya Gerakan Non Blok (GNB) yang dideklarasikan pada 1961 dan mendapat dukungan yang sangat besar dari negara-negara dunia ketiga yang ketika itu mewakili dua per tiga anggota PBB dan 55% penduduk dunia.

Munculnya Gerakan Non-Blok pada tahun 1961 dan terbentuknya Kelompok 77 yang menghasilkan "*Caracas Program of Action*" (CPA) pada tahun 1981, menandai bangkitnya gerakan bersama ("*collective actions*") negara-negara berkembang.

Seiring dengan menguatnya "*collectives actions*" dan perlunya peningkatan kerjasama antar negara berkembang, pada tahun 1978 delegasi dari 138 negara sepakat untuk mengadopsi sebuah rencana aksi untuk pelaksanaan dan peningkatan Kerjasama Teknik antar Negara Berkembang (KTNB/TCDC), yang kemudian di kenal dengan "*Buenos Aries Plan of Action (BAPA)*". BAPA merupakan "*milestones*" dalam kerjasama teknik karena memuat berbagai arahan dalam rangka mencapai kemandirian dalam kerjasama teknik antar negara berkembang.

Perkembangan hubungan antar negara berkembang pada tahun 1980-1990 yang tidak saja dinamis tetapi juga menghadapi berbagai kecenderungan dan tantangan yang mendorong negara-negara berkembang untuk meningkatkan kerjasama menghadapi berbagai isu-isu global yang dapat mempengaruhi mereka.

Kelompok-15 atau G-15 yang terbentuk tahun 1989 dan kehadiran kelompok D-8 (Developing-8) yang terbentuk pada tahun 1997, merupakan tanggapan terhadap perkembangan dunia. Tujuan dari Kelompok-kelompok tersebut adalah untuk meningkatkan posisi negara berkembang dalam percaturan perekonomian global, menciptakan dan mendiversifikasi kesempatan baru dalam perdagangan, investasi, dan teknologi dan meningkatkan peranan dalam pengambilan keputusan di forum internasional.

Kerjasama Selatan-Selatan semakin menguat dengan diadakannya "*South Summit*" yang pertama di Havana, Kuba, tahun 2000 dan *South Summit* kedua tahun 2005 di Doha, Qatar. Diterimanya Deklarasi Marrakesh on *South-South Cooperation* tahun 2003, dan UN Conference on *South-South Cooperation*, Nairobi Kenya, tahun 2009, menunjukkan bahwa KSS merupakan bentuk kerjasama yang tidak diragukan bagi kerjasama pembangunan di antara negara berkembang.

Perkembangan yang semakin pesat dalam Kerjasama Selatan-Selatan telah mendorong negara-negara berkembang untuk mereformulasikan KSS melalui peningkatan kemampuan lembaga yang mengkoordinir KSS. Reformulasi KSS dilakukan seiring dengan peningkatan posisi sebagian negara-negara berkembang menjadi "*middle income countries*". Posisi ini memungkinkan negara-negara berkembang untuk muncul sebagai "*new emerging donors*", seperti Brazil, Thailand

melalui TICA (Thailand International Cooperation Agency), *Malaysia Technical Cooperation Program* (MTCP) melalui pembentukan lembaga *Malaysian South-South Cooperation* (MASSCROP) yang mensinergikan KSS dalam bidang perdagangan dan investasi dan Afrika Selatan.

Dalam bidang ekonomi, ketidakseimbangan ekonomi global sebagai akibat dari krisis keuangan telah memicu terjadinya efek domino yang merata terhadap perekonomian dunia dan telah menimbulkan ketidak normalan pada sistem perbankan terutama berkaitan dengan fungsi sebagai pemberi pinjaman sehingga mempengaruhi perkembangan sektor riil.

Demikian pula dengan sektor perdagangan yang menjadi mesin perekonomian global dengan pertumbuhannya melebihi pertumbuhan output menyebabkan terjadinya penurunan permintaan global. Negara-negara dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh kekuatan ekspor terpukul karena pasar di negara-negara tujuan ekspor mengalami kontraksi, penurunan tingkat output, defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan, dan naiknya angka pengangguran. Hal ini berimbas pada lemahnya permintaan.

Selain itu dampak dari krisis tersebut telah mendorong kecenderungan negara-negara tujuan ekspor untuk melakukan langkah proteksi dengan penutupan akses pasar atau melakukan distorsi kompetisi. Kecenderungan tersebut telah semakin mempersulit akses ke pasar-pasar tujuan ekspor.

Kendati dampak dari krisis global membawa perubahan pada tatanan perekonomian dunia, namun krisis ini justru telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat di beberapa *emerging countries*, seperti China, India, Brasil dan Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir tumbuh dengan rata-rata di atas 7% per tahun. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju melambat 2-3% per tahun dan diikuti dengan meningkatnya angka pengangguran dan penduduk yang lanjut usia. Fenomena tersebut telah meningkatkan saling ketergantungan antara *advanced economies* dan *emerging economies*.

Hal ini merupakan peluang bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan perannya dalam tatanan ekonomi global yang baru dengan meningkatkan kerjasama ekonomi di negara berkembang sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain putaran negosiasi Doha, World Trade Organization (WTO) yang di harapkan dapat membantu pertumbuhan perekonomian dunia, namun kenyataannya terjadi stagnasi terutama adanya perbedaan mendasar pada Doha Development Agenda (DDA), pada tiga isu yaitu: 1) Pertanian; 2) Non Pertanian (Non-Agricultural Market Access); dan (3) Jasa (Services). Selain itu terdapat beberapa isu lainnya seperti: regulasi, fasilitasi perdagangan (trade facilitation), lingkungan perdagangan yang kondusif (trade and environment), dan lain-lain.

Krisis keuangan global yang melanda dunia tahun 2008, telah berhasil diatasi Indonesia melalui kebijakan makro-ekonomi yang sehat dan kuat. Pertumbuhan PDB Indonesia, ketika itu mencapai posisi yang positif dengan PDB mencapai sekitar 4 % pada periode 2008-2009, dan merupakan salah satu dari tiga negara yang tumbuh positif bersama China dan India. Sementara bila disandingkan dengan pertumbuhan PDB negara-negara anggota G-20 pada Semester I tahun 2009, pertumbuhan PDB Indonesia yang mencapai 4,2%, tercatat sebagai yang ketiga tertinggi di G-20.

Kendati Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih lebih kecil dari negara BRIC (Brazil, Rusia, India an Cina), namun dengan pertumbuh PDB yang berkisar 4 % telah menempatkan

Indonesia sebagai salah satu dari 20 kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Diperkirakan pada beberapa tahun ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 7 persen setahun. Sebuah studi yang dilakukan oleh *Standard Chartered: Super Cycle Report 2010*, menyebutkan bahwa posisi Indonesia pada tahun 2020 akan meningkat dan masuk dalam 10 kekuatan ekonomi dunia dan pada tahun 2030 akan masuk dalam 5 besar kekuatan ekonomi dunia.

Pertumbuhan PDB yang cukup kuat dan perkiraan mengenai potensi Indonesia yang dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia serta berbagai upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi isu lokal yang berdampak internasional seperti terorisme, telah menarik perhatian negara G-20.

Masuknya Indonesia sebagai anggota G-20 dapat memberikan kontribusi yang penting dengan menyuarakan pandangan negara-negara berkembang terhadap berbagai perkembangan dunia yang dapat mempengaruhi stabilitas dan pembangunan di negara berkembang.

2. DASAR HUKUM

Landasan bagi pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia dapat diletakkan dalam bingkai Pembukaan UUD 1945, yang menyebutkan "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Walau, secara eksplisit Kerjasama Selatan-Selatan belum tercantum dalam perundangan yang ada, tetapi dalam pelaksanaannya telah menjadi bagian dari kebijakan politik luar negeri Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.

Perundangan yang dapat digunakan sebagai rujukan dan landasan bagi KSS Indonesia adalah:

1. UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
2. UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
3. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal
5. Undang-Undang RI No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025; dan
6. Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2012-2014.

3. TUJUAN

"*Grand Design Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia*" bertujuan untuk meletakkan landasan bagi penguatan dan peningkatan Kerjasama Selatan-Selatan yang lebih maju dan terintegrasi serta meletakkannya dalam konstelasi global untuk mendukung pembangunan dan pemenuhan kepentingan nasional. Melalui "*Grand Design*" ini diharapkan:

- 1) Para pemangku kepentingan dapat memahami kebijakan dan pelaksanaan KSS dalam kaitannya dengan rencana pembangunan nasional.

- 2) Menghasilkan rumusan kebijakan Kerjasama Selatan-Selatan secara nasional dan berskala internasional yang dapat membawa dampak positif bagi pembangunan dan kepentingan nasional.
- 3) Terjalinnnya koordinasi, sinergi dan integrasi pelaksanaan KSS
- 4) Memberi dukungan bagi kebijakan luar negeri Indonesia
- 5) Merumuskan tantangan dan global isu dengan menciptakan peluang-peluang baru yang inovatif, kreatif dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai kecenderungan baru yang muncul.
- 6) Mendukung peningkatan kerjasama pembangunan yang berbasis pada kerjasama ekonomi, kerjasama social budaya, kerjasama teknik dan kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melalui “*Grand Design Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia*” para pemangku kepentingan secara bersama dapat berbagi tanggung jawab dalam memajukan KSS Indonesia dalam wadah koordinasi yang terintegratif. Dengan demikian KSS Indonesia dapat lebih terencana dan terkoordinasi dengan memanfaatkan secara optimal semua potensi dan sumber yang dimiliki Indonesia untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang dan memperkuat kerjasama Selatan-Selatan.

4. KERANGKA WAKTU

Kerangka waktu “*Grand Design Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia*” di selaraskan dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dengan tahapan lima tahunan agar arah, tujuan dan sasaran KSS Indonesia dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya Grand Design akan dirincikan ke dalam blueprint yang akan melingkupi tiga periode, sebagai berikut:

- 1) Periode I : 2011-2014
- 2) Periode II : 2015-2019
- 3) Periode III: 2020-2025

Grand Design dan Blueprint merupakan *living document* yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan yang muncul dalam pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan.

5. PRINSIP, VISI DAN MISI KERJASAMA SELATAN-SELATAN

a. Prinsip Kerjasama Selatan-Selatan

Prinsip utama Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia di dasarkan pada prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Prinsip ini merupakan modal dasar Indonesia dan telah terbukti menempatkan Indonesia pada posisi yang menguntungkan dalam membangun hubungan baik dengan berbagai negara-negara di dunia.

Secara umum tujuan dari Kerja sama Selatan-Selatan (KSS) adalah untuk saling membantu mewujudkan kemandirian bersama (*collective self reliance*), mempercepat pembangunan, serta menguatkan solidaritas antar negara berkembang. Pada dasarnya Kerjasama Selatan-Selatan

merupakan tanggung jawab negara selatan dan bahwa KSS didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati kedaulatan nasional, kepemilikan nasional (*ownership*) dan ketidak tergantungan (*independence*), kesetaraan, tidak-bersyarat (*non-conditionality*), tidak mencampuri urusan dalam negeri dan kemanfaatan bersama.

Bagi negara-negara berkembang, Kerjasama Selatan-Selatan merupakan aspek penting dalam kerangka kerjasama pembangunan internasional (*International Development Cooperation Architecture*) dan sangat berbeda dari model yang ada dalam kerangka kerja sama pembangunan Utara-Selatan. KSS bukan sebagai pengganti kerjasama tradisional yang selama ini ada, melainkan sebagai komplemen dari kerjasama antara Utara-Selatan.

Berdasarkan hal tersebut, KSS harus dilihat sebagai kerjasama yang didasarkan pada kemitraan dengan membuka kesempatan yang sama dan dilandasi oleh solidaritas. Dengan demikian prinsip-prinsip yang tertuang dalam kemitraan pembangunan dalam kerangka KSS adalah sebagai berikut :

- 1) Kepemilikan (*Ownership*)
- 2) Selaras dengan kebijakan pembangunan nasional
- 3) Kemitraan inklusif
- 4) Kesempatan yang sama (*mutual opportunity*)
- 5) Keunggulan komperatif
- 6) Prioritas negara berkembang (*demand-driven*)
- 7) Berkelanjutan
- 8) Fleksibilitas
- 9) Berbagi pengetahuan dan pengalaman
- 10) Akuntabilitas dan transparansi

b. Visi dan Misi

Visi

“Kemitraan yang lebih baik untuk kesejahteraan”

Misi

- a. Memajukan peran Indonesia dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan untuk kepentingan nasional Indonesia
- b. Meningkatkan solidaritas dan kemandirian bersama Selatan-Selatan melalui kemitraan dengan memanfaatkan potensi nasional.
- c. Memperkuat kerjasama pembangunan yang inovatif dan meningkatkan kesejahteraan
- d. Mengembangkan kerjasama ekonomi dengan Negara-negara selatan
- e. Mengembangkan kerjasama teknik, sosial budaya dan iptek dengan Negara-negara selatan

- f. Meningkatkan pelaksanaan diplomasi Indonesia dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral, regional, multilateral dalam berbagai bidang untuk mencapai kepentingan nasional
- g. Memainkan peran sentral sebagai *emerging economies*

BAB II

KONDISI LINGKUNGAN DAN DINAMIKA

KERJASAMA SELATAN-SELATAN

1. KONDISI LINGKUNGAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN

a. Lingkungan Strategis Indonesia

ASEAN merupakan lingkaran strategis pertama dalam Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia. Terbentuknya komunitas ASEAN yang terdiri dari 3 (tiga) pilar, yaitu komunitas politik-keamanan ASEAN, komunitas ekonomi ASEAN, dan komunitas sosial budaya ASEAN akan semakin mendorong kerjasama yang lebih kuat dalam rangka mencapai Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Isu-isu seperti bencana, *emerging new diseases*, dan masalah lingkungan seperti kebakaran hutan masih akan mempengaruhi lingkungan strategis Indonesia di tingkat kawasan ASEAN. Demikian pula dengan kerjasama yang tertuang dalam blueprint ASEAN seperti *ASEAN Economic Community Blueprint* dan *ASEAN Socio-Cultural Blueprint* yang memerlukan penyesuaian dengan program pembangunan dan peraturan perundangan nasional.

Kemitraan yang dibangun Indonesia dengan beberapa negara seperti Korea Selatan, Cina, Afrika Selatan dan Brazil yang merupakan upaya untuk memperkuat lingkungan strategis Indonesia secara bilateral. Kendati bangunan kerjasama belum sepenuhnya terlaksana, namun ke depan kemitraan tersebut dapat menjadi landasan bagi pengembangan KSS Indonesia.

Persaingan memperoleh akses dan pasar di pasar tradisional maupun non tradisional akan semakin ketat. Negara seperti Cina, Korea Selatan dan India berkembang semakin kuat menguasai pasar di berbagai kawasan. Sementara negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam mulai memperkuat dan mengembangkan potensi mereka untuk bersaing dalam memperoleh akses dan pasar.

Pertumbuhan PDB Indonesia yang cukup kuat dan perkiraan mengenai potensi Indonesia yang dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia serta berbagai upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi isu lokal yang berdampak internasional seperti terorisme, telah menarik perhatian negara G-20. Dengan terpilihnya Indonesia sebagai satu-satunya negara kawasan Asia Tenggara yang menjadi anggota G-20 dapat memberikan kontribusi yang penting dengan

menyuarakan pandangan dan *concerns* negara-negara berkembang, antara lain menekankan pentingnya menjamin likuiditas keuangan global, kepercayaan terhadap perbankan, dan upaya menjamin aliran kredit perbankan.

Selain itu, program KSS Indonesia melalui kegiatan KTNB yang telah berlangsung sejak tahun 1980an, telah banyak memberikan kontribusi bagi penguatan politik luar negeri serta memperkuat hubungan dengan negara berkembang lain.

Sementara di bidang ekonomi Indonesia telah menanda tangani 52 perjanjian perdagangan dan 50 Perjanjian Investasi Bilateral atau *Bilateral Investment Treaty* (BIT) dalam rangka promosi dan perlindungan investasi dengan berbagai negara termasuk negara berkembang. Demikian pula dengan kesepakatan multilateral seperti *Global System of Trade Preferences among Developing Countries* (GSTP) merupakan potensi bagi pengembangan dan peningkatan KSS Indonesia.

Di lingkungan strategis nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, merupakan landasan bagi upaya pengembangan dan penguatan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia. Secara spesifik RPJMN menyebutkan pentingnya memperluas pasar bagi produk dan jasa Indonesia, memperkuat koordinasi dan entitas kelembagaan KSS Indonesia.

b. Global

“*South Summit*” yang pertama di Havana, Kuba, tahun 2000, merupakan tonggak baru dalam penguatan dan peningkatan Kerjasama Selatan-Selatan. *High Level Conference on South-South Cooperation* tahun 2003 dan *South Summit* kedua tahun 2005 di Doha, Qatar, semakin memperjelas dan memperkuat peranan dan kedudukan Kerjasama Selatan-Selatan dalam kerangka kerjasama pembangunan di antara negara berkembang. Demikian pula dengan *UN Conference on South-South Cooperation*, di Nairobi, Kenya, tahun 2009 yang menghasilkan *Nairobi Outcome* menunjukkan bahwa Kerjasama Selatan-Selatan merupakan elemen yang tidak diragukan lagi untuk mendorong kerjasama pembangunan yang lebih sesuai dengan lingkungan negara berkembang menuju kemandirian bersama dan pembangunan yang berkelanjutan.

Krisis ekonomi global yang berkembang dari krisis di pasar keuangan di negara-negara maju, telah membawa imbas yang cukup besar bagi negara-negara berkembang terutama negara-negara miskin dengan utang yang cukup besar (*highly indebted poor countries*). Dampak dari krisis global yang dirasakan oleh negara berkembang adalah penurunan yang tajam dari volume dan harga komoditas di berbagai tempat di dunia. Dampak dari krisis ini dapat pula di lihat dari pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang yang pada tahun 2008 sebesar 6.25% menurun menjadi 3.25% pada tahun 2009.

Di bidang investasi kecenderungan yang semakin kuat adalah meningkatnya penandatanganan “*Bilateral Investment Treaties (BITS)*” di antara negara-negara berkembang. Pada tahun 2004, dari 73 BITS yang ditandatangani, 28 merupakan perjanjian antar negara berkembang. Negara seperti China, Korea Selatan dan Malaysia telah menandatangani lebih dari 40 BITS dengan negara-negara berkembang lainnya. Bahkan, ketiga negara tersebut telah menandatangani perjanjian lebih banyak dengan negara berkembang dibandingkan dengan negara maju.

Kecenderungan ini mencerminkan pentingnya kerjasama Selatan-Selatan di bidang investasi dan peningkatan jumlah arus investasi asing di negara berkembang.

Sementara itu perundingan *Doha Development Agenda* dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO) masih menghadapi kebuntuan yang terkait dengan isu pertanian, *industrial tariffs* dan *non-tariff barriers*, jasa, dan *trade remedies*. Berlarut-larutnya perundingan perdagangan multilateral dalam kerangka WTO telah mendorong tumbuh pesatnya *free trade agreement* (FTA) baik dalam kerangka bilateral maupun regional.

Di sisi lain, pertemuan ketiga *High Level Forum on Aid Effectiveness* di Ghana, tahun 2008 yang menghasilkan *Accra Agenda for Action* (AAA) menyebutkan mengenai pentingnya kerjasama dengan semua pihak, termasuk melalui Kerjasama Selatan-Selatan. *Accra Agenda for Action* juga mengakui bahwa pembelajaran, pengetahuan dan pengalaman dari KSS dapat memperkaya agenda “*effectiveness*” dalam kerjasama pembangunan antar negara berkembang.

c. Regional

Komunitas regional dan sub regional merupakan salah satu pendorong bagi kemajuan Kerjasama Selatan-Selatan. Kerjasama Selatan-Selatan dapat dikembangkan melalui mekanisme kerjasama regional yang telah terbentuk, seperti ASEAN, South West Pacific Dialogue (SwPD), Kerjasama Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika (*New Asia Africa Strategic Partnership-NAASP*), *Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation* (IOR-ARC), *MERCOSUR* di Amerika Latin, dan *Pacific Islands Forum* (PIF).

Beberapa komunitas regional semakin dinamis dalam menyatukan dan melaksanakan kegiatan mereka di tingkat regional maupun sub regional. Di Afrika, komunitas seperti *The Southern African Development Community* (SADC) memainkan peran cukup besar dengan Afrika Selatan sebagai pendorong utamanya. Demikian pula dengan COMESA (*Common Market for Eastern and Southern Africa*) yang telah mengambil inisiatif untuk mengintegrasikan kerjasamanya secara intra regional. COMESA menjalin hubungan yang cukup baik dengan *East African Community* (EAC) dan *the Indian Ocean Commission* (IOC).

Di tingkat sub regional Asia Tenggara, ASEAN merupakan komunitas sub regional yang cukup maju dalam mengintegrasikan kegiatannya. Pada tahun 2000, negara-negara ASEAN sepakat untuk mempersiapkan ASEAN menuju era digital dengan membuat percontohan Internet hub di bidang pertanian yang berlokasi di Indonesia. Internet hub ini diharapkan dapat memberikan layanan perdagangan di bidang agribisnis kepada ratusan petani dan pelaku pasar di kawasan ASEAN. Internet hub juga ini didukung oleh sektor publik dan swasta termasuk beberapa perusahaan di luar ASEAN.

Cetak biru ketiga pilar utama ASEAN; komunitas politik-keamanan ASEAN, komunitas ekonomi ASEAN, dan komunitas sosial budaya ASEAN, merupakan pendorong bagi terciptanya integrasi yang lebih kuat di antara negara-negara ASEAN yang akan dicapai pada tahun 2015 dalam rangka mewujudkan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara

Komunitas lain di Asia yang perkembangannya cukup signifikan adalah *South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)*. Kendati banyak permasalahan dalam negeri yang dihadapi oleh masing-masing negara, kerjasama di dalam komunitas ini menunjukkan kecenderungan untuk meningkat. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan *South Asian Free Trade Area* pada tahun 2010. Kegiatan lain adalah ditandatanganinya beberapa konvensi seperti *SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution* dan *SAARC Convention on Regional Arrangements for the Promotion of Child Welfare in South Asia*.

Pergeseran dalam kebijakan negara-negara di kawasan Pasifik yang mengarah pada “*look north policy*” merupakan upaya negara-negara di Pasifik untuk lebih mendekatkan diri dengan negara di kawasan Asia. Regionalisme yang berkembang pesat di kawasan Pasifik merupakan kecenderungan dalam peningkatan hubungan antar negara yang dapat mengarah ke integrasi ekonomi di kawasan tersebut. Oleh karena itu, negara-negara berkembang di kawasan Pasifik melihat integrasi ASEAN sebagai peluang untuk memperluas kerjasama dalam membantu membangun negara-negara di kawasan tersebut, terutama pasca penandatanganan ASEAN Charter serta pembentukan ASEAN Community pada tahun 2015.

Pertumbuhan yang sangat signifikan dialami negara-negara di kawasan Amerika Latin dengan semakin banyak negara-negara Amerika Latin yang mencapai kategori “*upper middle income countries*”. Hal ini telah mendorong negara Amerika Latin seperti Brazil untuk bekerjasama dengan negara berkembang lainnya di kawasan lain seperti India dan Afrika Selatan dengan membentuk IBSA. Demikian pula pembentukan *Forum for East Asia – Latin America Cooperation (FEALAC)* merupakan wujud bagaimana pentingnya kawasan tersebut dalam tatanan hubungan internasional khususnya Kerjasama Selatan-Selatan.

d. Multilateral

Dalam kerangka multilateral, KSS dilakukan melalui kelembagaan seperti PBB dan kelompok multilateral yang dibentuk oleh negara berkembang seperti GNB, Kelompok 77, Kelompok 15 dan D-8.

PBB memainkan peranan penting dalam Kerjasama Selatan-Selatan seperti pembentukan Kelompok Kerja mengenai KTNB pada tahun 1972 yang kemudian merumuskan *Bueno Aries Plan of Action (BAPA)* dan diadopsi dalam sidang PBB pada tahun 1978.

UN High Level Committee on South-South Cooperation (HLC) yang dibentuk tahun 1980 merupakan forum yang secara berkelanjutan membahas perkembangan dan arah Kerjasama Selatan-Selatan. Organisasi di bawah naungan Badan PBB seperti UNPFA, UNESCO, UNIDO dan WHO juga memasukkan KSS sebagai salah satu pilar dalam pelaksanaan kerjasama mereka.

Demikian pula dengan berbagai forum seperti *High Level Events on South-South Cooperation and Capacity Development (HLE/CD)* yang dilaksanakan di Bogota, Colombia 2010 dan rencana pertemuan *High Level Forum* yang akan diadakan di Seoul, Korea Selatan, pada tahun 2011, merupakan arena bagi pengembangan dan peningkatan KSS.

Berbagai pertemuan KTT seperti *South Summit* pertama di Havana-Kuba, yang digelar Kelompok 77 berhasil mengeluarkan dokumen aksi yang dikenal dengan *Havana Plan of Action; High-level Conference on South-South Cooperation* di Marrakech, Morocco, tahun 2003 dengan *Marrakech Plan of Implementation of South-South Cooperation*, dan KTT *South Summit* kedua tahun 2005 dengan *Doha Plan of Action*, merupakan langkah-langkah yang diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan KSS.

Kelompok kerjasama yang dibentuk oleh negara berkembang seperti Group-15 (G-15) dan Development 8 (D-8), merupakan forum yang juga bertujuan untuk lebih mengintensifkan dan memajukan kerjasama antar negara selatan melalui penguatan kerjasama ekonomi.

Colombo Plan yang semula dibentuk oleh negara persemakmuran telah berkembang menjadi lembaga multilateral dengan 25 anggota negara berkembang dan negara maju.

Forum multilateral lain yang cukup signifikan dan telah berkembang cukup lama dalam bidang perdagangan adalah melalui *Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP)* dalam kerangka Kelompok-77. Kesepakatan GSTP pertama kali ditandatangani tahun 1988 sebagai upaya 8 negara berkembang (Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, India, Kuba, Maroko, Mesir, MERCOSUR (Argentina, Brazil, Paraguay Uruguay) untuk melakukan pertukaran preferensi perdagangan dalam rangka meningkatkan dan mempromosikan perdagangan antar negara berkembang. Sedangkan kesepakatan terbaru GSTP yang ditandatangani bulan Desember 2010, merupakan upaya untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang perdagangan, ketika perundingan WTO mengalami kebuntuan.

Berbagai forum multilateral lainnya seperti G-33 (terdiri atas 46 negara berkembang anggota WTO), Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan WTO, merupakan arena yang banyak melibatkan kepentingan negara-negara berkembang.

2. MODAL DASAR DAN PERAN INDONESIA

a. Modal Dasar

Politik luar negeri yang didasarkan pada prinsip bebas dan aktif merupakan modal dasar bagi Indonesia dalam pergaulan di dunia internasional dan telah terbukti memberikan peluang dalam membangun hubungan baik dengan berbagai negara. Dengan modal dasar ini, Indonesia telah berperan aktif dalam berbagai forum antara lain menjadi salah satu negara pemrakarsa Konferensi Asia-Afrika 1955 dan Gerakan Non Blok, tuan rumah pertemuan Kelompok 77 tahun 1985, KTT GNB-10 tahun 1991 dan sekaligus ketua GNB.

Pengalaman dan keberhasilan Indonesia dalam pembangunan diberbagai bidang telah mendapat perhatian dan penghargaan internasional seperti di bidang pertanian, Indonesia memperoleh penghargaan dari FAO tahun 1985 dalam mengatasi masalah pangan dan kemiskinan. Demikian pula dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana, Indonesia memperoleh penghargaan United Nations Population Awards (UNPA) tahun 1989.

Modal dasar lain dalam Kerjasama Selatan-Selatan adalah pengalaman panjang Indonesia menyelenggarakan program Kerjasama Teknik antar Negara Berkembang (KTNB) yang telah

berlangsung sejak tahun 1982 yang melibatkan lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, swasta dan perguruan tinggi. Program KTNB sampai saat ini merupakan komponen utama Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan.

Keberhasilan, pengalaman dan kemampuan yang dimiliki Indonesia dalam berbagai bidang terutama bidang pertanian dan keluarga berencana memperkuat posisi KTNB Indonesia, sehingga pada tahun 1996 Indonesia mendapat pengakuan sebagai “*pivotal country*” yaitu negara yang mempunyai komitmen dalam mendorong Kerjasama Selatan-Selatan.

Posisi dan peran aktif Indonesia dalam berbagai forum internasional menjadikan Indonesia sebagai negara yang perlu diperhitungkan dalam arena internasional, seperti keanggotaan Indonesia dalam G-20.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menyebutkan mengenai bagaimana peran Indonesia dalam dunia internasional dengan mendorong kerjasama internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok serta antar lembaga dalam berbagai bidang. Untuk mendorong investasi di luar negeri, RPJPN 2005-2025 lebih lanjut menekankan perlunya meningkatkan investasi oleh perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri.

Demikian pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 lebih khusus menyebutkan peran Indonesia melalui *Multi Directions Foreign Policy* untuk memajukan hubungan baik dengan negara-negara berkembang maupun dengan negara-negara maju. Komitmen politik luar negeri “*A Million Friends, Zero Enemy*” dapat lebih mendorong dan memperkuat *Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia* ke arah yang lebih aktif dan efektif.

b. Peran Indonesia

Peran dan partisipasi aktif Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan merupakan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan “*ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”. Wujud dari amanat ini adalah peran aktif Indonesia dalam membangun solidaritas negara-negara berkembang dengan menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 dan mendorong berdirinya sebuah gerakan yang kemudian dikenal dengan Gerakan Non-Blok tahun 1961. Secara politis peran yang dilakukan Indonesia telah menempatkan Indonesia pada posisi yang strategis dan diperhitungkan baik oleh negara berkembang maupun negara-negara barat dan blok timur.

Keikutsertaan aktif Indonesia dan menjadi salah satu pengusul berdirinya kelompok-kelompok negara berkembang seperti G-77, G-15 dan D-8, memperkuat pandangan dunia internasional terutama di antara negara berkembang mengenai komitmen Indonesia yang kuat terhadap solidaritas dan untuk meningkatkan kerjasama serta kemandirian bersama negara-negara berkembang.

Kekuatan historis dan emosional yang membentuk solidaritas sesama negara berkembang yang selama ini dibangun dan dipertahankan Indonesia serta pengalaman, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki dalam pembangunan nasional menjadi daya tarik bagi negara berkembang untuk belajar dari Indonesia.

Oleh karena itulah, seiring dengan diterimanya Buenos Aires Plan of Action (BAPA) pada tahun 1981 oleh semua negara berkembang, Indonesia mengambil inisiatif untuk melaksanakan kegiatan kerjasama teknik antar negara berkembang (KTNB) pada tahun 1982. Program KTNB yang meliputi berbagai sektor yang berjalan selama hampir 30 tahun dan diikuti banyak negara berkembang telah memberikan kontribusi pada penguatan politik luar negeri Indonesia dan pengenalan mengenai kapasitas Indonesia. Beberapa program KTNB seperti di bidang pertanian dan keluarga berencana merupakan program yang cukup banyak mendapat minat dari negara berkembang lain.

Dalam kerjasama ekonomi antar negara berkembang, upaya untuk meningkatkan kerjasama termasuk akses pasar dilakukan melalui strategi multijalur di forum multilateral, regional, dan bilateral. Melalui strategi multijalur ini, Indonesia telah berhasil memperkuat perannya di dunia internasional, baik di forum WTO melalui G-20, G-33, serta di forum ASEAN, ASEAN plus mitra dialog, dan forum bilateral baik dengan negara maju maupun negara berkembang.

Perkembangan dalam perundingan perdagangan internasional yang berlarut-larut mendorong Indonesia untuk berperan aktif dalam perundingan *Doha Development Agenda* (DDA) dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO) dengan membantu menentukan arah hasil perundingan yang akan dicapai.

Indonesia berkepentingan di semua isu di dalam DDA. Secara khusus untuk bidang pertanian, Indonesia memperjuangkan terbentuknya *Special Product* (SP) dan *Special Safeguard Mechanism* (SSM) di forum WTO. Isu SP dan SSM tersebut berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan, pembangunan pedesaan, dan ketahanan pangan tidak saja bagi bangsa Indonesia tetapi juga negara berkembang lain. Peran Indonesia ini telah mendapatkan pengakuan masyarakat internasional dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang perlu diperhitungkan dalam perundingan WTO.

Selain itu, Indonesia bersama-sama dengan negara berkembang lainnya juga memperjuangkan penurunan subsidi domestik dan penghapusan subsidi ekspor serta akses pasar untuk produk pertanian.

Demikian pula, dengan peran aktif Indonesia dalam masalah lingkungan juga ditunjukkan dalam pertemuan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Bali tahun 2007. Dalam kerangka ini, Indonesia mengambil inisiatif mengadakan pertemuan khusus bagi negara-negara Selatan yang memiliki hutan hujan tropis dari Asia, Afrika dan Amerika Latin yang kemudian dikenal dengan kelompok *Forestry-11*.

Di tingkat regional, Indonesia memainkan peranan penting sebagai inisiator dalam berbagai kerjasama ASEAN dan peran ini akan semakin penting terutama saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN 2011.

Di bidang pendidikan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi UNESCO yang diadakan di India tahun 1993, Indonesia bersama dengan 8 negara berkembang berpenduduk terpadat mengambil inisiatif membentuk kelompok yang dikenal dengan "*Education-9*". Kesembilan negara berkembang tersebut berhasil memobilisasi dukungan politis untuk meng-goalkan "*Education for All*".

Partisipasi aktif Indonesia pada berbagai pertemuan E-9, menunjukkan perhatian yang besar pada upaya mengsinergikan program pendidikan dalam Kerjasama Selatan-Selatan. Wujud dari peran Indonesia dalam E-9 adalah menjadi tuan rumah pertemuan ke-7 tingkat menteri di Bali tahun 2008.

Peran Indonesia sebagai anggota G-20 dapat mendorong negara-negara maju untuk lebih memperhatikan pandangan dan keprihatinan negara berkembang terhadap perkembangan perekonomian dan keuangan dunia. Indonesia dapat menyuarakan pandangan negara-negara berkembang, antara lain menekankan pentingnya menjamin likuiditas keuangan global, kepercayaan terhadap perbankan, dan upaya menjamin aliran kredit perbankan.

Selain itu, forum G-20 dapat digunakan untuk memberi kontribusi bagi kepentingan dan perhatian negara berkembang terhadap berbagai kecenderungan dan isu-isu global seperti masalah lingkungan terkait dengan perubahan iklim, bencana serta isu pembangunan dalam kerangka MDGs.

3. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

a. Permasalahan

Di dalam RPJMN 2010-2014, disebutkan adanya 3 permasalahan yang di hadapi KSS Indonesia, pertama, belum adanya design nasional KSS; kedua, Indonesia belum mempunyai entitas yang kuat untuk menangani KSS; dan ketiga, belum teridentifikasinya keunggulan komperatif Indonesia.

Berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia terdapat beberapa isu yang perlu mendapat perhatian:

- 1) strategi dan kebijakan Kerjasama Selatan-Selatan cenderung masih bersifat ad hoc;
- 2) bidang kerjasama tidak terartikulasi dengan baik dan belum di selaraskan dengan RPJMN maupun RPJPN;
- 3) belum adanya kelembagaan yang menangani Kerjasama Selatan-Selatan;
- 4) belum terjalinnya sinergi antara bidang-bidang KSS;
- 5) belum tercantumnya KSS dalam perundangan dan peraturan pemerintah sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan KSS Indonesia;
- 6) sumber pembiayaan yang belum memadai;
- 7) belum tersusunnya mekanisme nasional dan prosedur bagi pelaksanaan KSS;
- 8) informasi dan pendataan yang sistimatis mengenai program dan proyek Kerjasama Selatan-Selatan belum tertata;
- 9) evaluasi dan monitoring terhadap program dan proyek Kerjasama Selatan Selatan.
- 10) kurangnya promosi mengenai pelaksanaan KSS.

Di bidang kerjasama ekonomi, Indonesia menghadapi beberapa kendala:

- 1) Adanya kecenderungan negara-negara tujuan ekspor untuk melakukan langkah proteksi dengan penutupan akses pasar atau melakukan distorsi kompetisi, karena adanya penurunan

permintaan global. Kecenderungan tersebut telah semakin mempersulit akses ke pasar-pasar tujuan ekspor.

- 2) Permasalahan lain adalah akses dan pengamanan pasar luar negeri masih terkendala oleh beberapa aspek terkait kesepakatan internasional seperti belum dapat diselesaikannya putaran negosiasi Doha, WTO dan kecenderungan negara-negara menerapkan tindakan non-tarif.
- 3) Export nasional saat ini masih di dominasi oleh 10 produk utama yang terdiri dari tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronika, karet dan produk karet, minyak kelapa, sawit, hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao, dan kopi. Diversifikasi export nasional diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya gejolak ekonomi.
- 4) Tujuan export masih terkonsentrasi pada pasar tradisional. Kendati ada penurunan terhadap pasar export tradisional, namun ketergantungan pada pasar tradisional masih tinggi. Oleh karena itu diversifikasi tujuan pasar export non tradisional perlu dilakukan.
- 5) Kendala geografis dan sarana transportasi serta pengetahuan para pengusaha Indonesia mengenai situasi dan kondisi negara berkembang dan potensi kawasan bagi perluasan pasar Indonesia. Demikian pula sebaliknya pengetahuan pengusaha negara berkembang terhadap potensi Indonesia masih relatif rendah.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan KSS Indonesia adalah pengalokasian dana yang memadai sebagai kunci utama untuk mendukung pelaksanaan KSS Indonesia. Sementara pembiayaan program yang selama ini berasal dari mitra kerjasama internasional akan mengalami penurunan seiring dengan berkurang bantuan luar negeri dari negara donor dan mitra kerjasama internasional.

Perkembangan perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia mengalami dinamika seiring dengan terjadinya perubahan di dalam pemerintahan. Dampak dari terjadinya dinamika yang berkembang di dalam lingkungan pemerintahan adalah munculnya fragmentasi (*fragmented points of delivery*) dalam pengelolaan program KTNB, baik dalam penganggaran, perencanaan, koordinasi, maupun evaluasi dan monitoring.

Permasalahan teknis yang dihadapi adalah belum terhimpunnya berbagai data dan informasi ke dalam sistem informasi yang integratif dan dikelola oleh sebuah entitas. Demikian pula dengan monitoring dan evaluasi yang dapat dijadikan rujukan bagi perencanaan dan pengembangan KSS belum tersusun secara baik.

b. Tantangan

Tantangan yang dihadapi Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia menyangkut tantangan yang berasal di dalam negeri dan munculnya berbagai kecenderungan dan isu-isu baru serta persaingan antar negara berkembang yang semakin meningkat. Beberapa permasalahan yang akan dihadapi Indonesia:

Pertama, peningkatan dan pemanfaatan kerjasama ekonomi antar negara berkembang (KENB) yang belum sepenuhnya dijadikan sebagai salah satu pendorong bagi penguatan dan peningkatan potensi ekonomi nasional. Kendati telah ada produk Indonesia beredar di berbagai negara berkembang lain, namun jenisnya masih terbatas dan jangkauan pasarnya masih

merupakan pasar tradisional. Membuka akses dan pasar baru dengan produk unggulan merupakan tantangan bagi KSS di bidang KENB.

Kedua, mengubah persepsi berbagai pihak mengenai Kerjasama Selatan-Selatan yang selama ini masih menganggap KSS tidak lebih dari sebagai “*charity*” dibandingkan peran yang dilakukan oleh KSS Indonesia sebagai pengungkit dan penguat yang menunjukkan kemampuan dan potensi bangsa dalam berbagai bidang.

Ketiga, melakukan konsolidasi dan sinergi berbagai elemen KSS yang meliputi KTNB, KENB, Kerjasama Sosial Budaya dan Kerjasama IPTEK sehingga dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan luar negeri Indonesia dan memajukan kemampuan bangsa di arena percaturan internasional.

Keempat, pengalokasian dana yang ideal untuk mendukung pelaksanaan KSS Indonesia yang bersumber dari APBN melalui optimalisasi dan penajaman alokasi anggaran, sehingga pengeluaran pemerintah dapat lebih efektif dan efisien serta lebih terarah dan tepat sasaran.

Kelima, memasukkan isu KSS dalam kerangka perundangan yang ada. Masuknya isu KSS ke dalam perundangan yang ada memerlukan komitmen politik, baik dari kalangan pemerintah maupun legislatif.

Keenam, munculnya berbagai kecenderungan dan isu-isu baru dalam KSS seperti krisis keuangan global, bencana alam, perubahan iklim, penyebaran penyakit menular, kemajuan teknologi yang pesat, demokratisasi, dan meningkatnya kerjasama antar kawasan serta skema kerjasama baru. Tantangan dan kecenderungan tersebut menuntut peran proaktif dan antisipatif dalam perencanaan dan pengembangan KSS Indonesia untuk menjawab tantangan tersebut melalui program yang kreatif dan inovatif.

Ketujuh, beberapa negara berkembang telah melakukan reformulasi KSS melalui peningkatan kemampuan lembaga yang mengkoordinir KSS. Reformulasi KSS dilakukan seiring dengan peningkatan posisi sebagian negara-negara berkembang menjadi “*middle income countries*”. Posisi ini memungkinkan negara-negara berkembang untuk muncul sebagai “*new emerging donors*”.

Kedelapan, munculnya skema baru yang mendorong kerjasama antar kawasan dan desentralisasi KSS dengan melibatkan lembaga di luar pemerintah pusat dan juga melibatkan pemerintahan lokal. Peningkatan integrasi kerjasama di dalam kawasan maupun antar kawasan merupakan tantangan yang memerlukan suatu strategi untuk dapat memperkuat posisi Indonesia.

Kesembilan, dalam kaitannya dengan Kerjasama Ekonomi, Indonesia menghadapi kompetitor yang cukup kuat seperti India, Cina dan Korea baik di kawasan pasar tradisional maupun pasar nontradisional. Demikian pula munculnya negara-negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang secara aktif terus mengembangkan pasar dan produk-produk mereka dan menjadi kompetitor bagi produk-produk Indonesia.

BAB III

CAKUPAN DAN RUANG LINGKUP

1. KERJASAMA EKONOMI

Krisis keuangan beberapa tahun yang lalu merupakan krisis yang dampaknya belum pernah terjadi sebelumnya (*unprecedented magnitude*) yang telah mengguncang fondasi ekonomi negara-negara maju dan pada waktu yang sama mengancam pertumbuhan dan perkembangan negara-negara di Selatan. Kendati menghadapi guncangan akibat dari krisis keuangan tersebut, banyak negara berkembang justru mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya seperti China, India, Brazil dan Indonesia yang tumbuh dengan rata-rata diatas 7% per tahun.

Munculnya pertumbuhan yang dinamis di beberapa negara Selatan, kerjasama dan hubungan perdagangan dapat menjadi saluran yang layak untuk mengurangi dampak negatif dari krisis keuangan dan ekonomi dunia. Instrumen kerjasama seperti *General System of Trade Preferences* (GSTP), perjanjian perdagangan regional, *Bilateral Investment Treaties* (BITs) dan kerjasama dalam berbagai sektor perdagangan dan kerjasama antar lembaga dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kerjasama ekonomi antar negara Selatan.

Negara Selatan telah berkembang dan tumbuh lebih dinamis baik secara ekonomi dan politik dan banyak negara-negara berkembang semakin gencar melakukan investasi di negara-negara lain di Selatan. Perusahaan-perusahaan trans-nasional (TNC) dari negara Selatan dengan cepat memperluas kegiatan mereka di berbagai kawasan.

Dana perusahaan-perusahaan besar dari negara Selatan dapat memberi kesempatan baru (*new opportunities*) untuk kerjasama ekonomi Selatan-Selatan. Demikian pula pembentukan beberapa kelompok negara berkembang seperti G-15 dan G-33 dapat meningkatkan posisi negara Selatan dalam sistem perdagangan multilateral.

Prospek Ekonomi Global 2011 terbaru yang diluncurkan oleh Bank Dunia menyatakan bahwa perekonomian dunia beralih dari fase pemulihan pasca krisis menuju ke pertumbuhan yang kuat meskipun secara perlahan pada tahun-tahun ke depan, separuh dari pertumbuhan global berasal dari negara berkembang.

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian global ke depan yang lebih positif mendorong Indonesia untuk semakin berperan di dunia internasional. Kehadiran Indonesia sebagai anggota G-20 merupakan stimulan bagi kebangkitan ekonomi Indonesia. Selain itu fakta bahwa Indonesia merupakan pasar yang besar yang tetap tumbuh positif di tengah krisis global, kinerja diplomasi internasional Indonesia juga telah mampu menempatkan Indonesia menjadi pemeran sentral dalam berbagai forum multilateral maupun regional. Peran sentral ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui perdagangan internasional (ekspor dan impor) dan melalui kerjasama investasi.

a. Perdagangan

Persaingan memperoleh akses dan pasar di pasar tradisional maupun non tradisional akan semakin ketat. Negara seperti Cina, Korea Selatan dan India berkembang semakin kuat menguasai pasar di berbagai kawasan. Sementara negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam mulai memperkuat dan mengembangkan potensi mereka untuk bersaing dalam memperoleh akses dan pasar.

Menghadapi persaingan yang ketat antar sesama negara berkembang, Indonesia telah melakukan diversifikasi dengan membangun struktur produk ekspor non-migas yang semula didominasi oleh komoditi bernilai tambah rendah (ekspor non-manufaktur), bergeser dengan pada komoditi yang bernilai tambah relatif tinggi, yaitu komoditi sektor Industri.

Untuk mendukung kerjasama perdagangan dan investasi bilateral, Indonesia telah menandatangani 52 perjanjian perdagangan dan 50 Perjanjian Investasi Bilateral atau *Bilateral Investment Treaty* (BIT) dalam rangka promosi dan perlindungan investasi dengan berbagai negara termasuk negara berkembang.

Demikian pula dengan diversifikasi pasar tujuan ekspor Indonesia di pasar nontradisional semakin menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dari sebesar 46,1 persen pada tahun 2004, menjadi 54,5 persen pada tahun 2009.

Untuk lebih memperkuat pengembangan ekspor ke berbagai negara berkembang lain diperlukan suatu strategi yang dilakukan melalui pendekatan produk atau sektor potensial dan pendekatan pasar yang prospektif dan pasar potensial. Tujuan yang ingin dicapai melalui strategi ini adalah:

- 1) Meningkatkan ekspor nonmigas untuk produk-produk yang bernilai tambah lebih besar, berbasis pada sumber daya alam, serta permintaan pasarnya besar;
- 2) Diversifikasi pasar tujuan ekspor yang semakin baik, sebagai indikasi berkurangnya ketergantungan ekspor pada suatu negara tertentu, sehingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi semakin baik;
- 3) Diversifikasi produk ekspor nonmigas yang semakin baik, sehingga ketergantungan pada produk ekspor tertentu menjadi berkurang;
- 4) Menitikberatkan upaya untuk perluasan akses pasar, promosi, dan fasilitasi ekspor non migas di kawasan Afrika dan Asia
- 5) Meningkatkan kualitas produk untuk memenuhi permintaan dan standar internasional;
- 6) Mengoptimalkan pemanfaatan berbagai kesepakatan perdagangan dalam rangka peningkatan ekspor ke berbagai negara mitra, baik multilateral, regional, maupun bilateral;
- 7) Mendorong pemanfaatan berbagai skema perdagangan, dan kerjasama perdagangan internasional yang lebih menguntungkan kepentingan nasional;
- 8) Memperkuat kelembagaan dan pembiayaan perdagangan luar negeri yang mendorong efektivitas pengembangan ekspor nonmigas.

Berdasarkan data statistik perdagangan dari BPS dapat diketahui bahwa perdagangan Indonesia dengan negara-negara Selatan secara umum nilainya mengalami peningkatan dengan total

ekspor tahun 2009 mencapai US\$ 16.864.8 juta dan tahun 2010 US \$ 22.149.9 juta. Sementara impor tahun 2009 US \$ 9.572.6 juta dan pada tahun 2010 US \$ 12.576.7 juta.

b. Investasi

Ketika investasi negara-negara maju mengalami kemunduran, investor baru dari negara berkembang seperti India, Cina dan Brazil bermunculan mencari pasar baru. Perusahaan-perusahaan dari negara berkembang dengan modal yang besar, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki telah meraih pengakuan sebagai *new emerging Muti National Corporation (MNC)*, yang jumlahnya semakin meningkat.

Investasi *new emerging MNC* secara geografis dilakukan di kawasan terdekat seperti Turkey di kawasan Afrika Tengah dan Barat, sementara Cina dan India di kawasan Asia. Namun, dengan perkembangan yang pesat, *new emerging MNC* telah melakukan investasi melintasi kawasan mereka seperti yang dilakukan oleh Cina, Brazil dan Malaysia di Afrika.

Dinamika perkembangan Kerjasama Selatan-Selatan yang begitu cepat dalam bidang investasi, perlu mendapat respons yang lebih komprehensif dari Indonesia.

Dengan kinerja ekonomi yang baik, dimana Indonesia merupakan satu dari tiga negara Asia dengan pertumbuhan ekonomi positif saat krisis finansial 2008 dan investasi tahun 2010 meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2009 dengan penanaman modal asing (PMA) menyumbang sekitar 76 persen, menjadikan Indonesia sebagai *new emerging market*.

Indonesia bukan saja sebagai salah satu negara dengan potensi perekonomian yang besar dan bergabung dengan G-20, tetapi potensi nasional yang dimiliki cukup besar seperti wilayah, sumber daya alam dan penduduk menjadikan Indonesia sebagai pilihan investasi terbaik.

Potensi inilah yang menarik investor dari negara berkembang lain seperti India, Afrika Selatan, Brazil dan Cina untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Berdasarkan data dari BKPM diketahui bahwa penanaman modal asing (Foreign Direct Investment) dari negara-negara Selatan di Indonesia pada tahun 2009 mencapai nilai US\$ 605 Juta dengan 76 proyek, terjadi peningkatan menjadi US\$ 937 Juta dengan 195 proyek pada tahun 2010. Diperkirakan dalam tahun 2011 sasaran investasi asing di Indonesia akan mencapai Rp 150,4 triliun.

Strategi investasi Indonesia adalah menuju sasaran ekonomi berbasis teknologi dan inovasi yang dilakukan melalui tahapan akselerasi pembangunan infrastruktur dan energi dan tahapan industri skala besar yang mempunyai nilai tambah seperti baja dan semen.

Sebaliknya, dengan pengalaman Indonesia dalam pembangunan, Indonesia juga telah memulai melakukan peyajakan investasi di beberapa negara berkembang seperti Pakistan (batubara), Bangladesh (transportasi), Vietnam dan beberapa negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Potensi investasi Indonesia di luar negeri termasuk di negara-negara berkembang sebenarnya cukup besar. Diperkirakan ada 100-150 perusahaan Indonesia yang berinvestasi ke luar negeri, dimana 15 persennya adalah BUMN, sedangkan sisanya oleh perusahaan swasta nasional yang bergerak di sektor sumber daya alam, manufaktur, dan jasa.

Ke depan Indonesia perlu lebih proaktif untuk menjajaki kemungkinan investasi di negara berkembang lainnya, kendati menghadapi banyak permasalahan dalam melaksanakan investasi. Beberapa perusahaan nasional telah merencanakan kerjasama dengan mitra di Afrika, demikian pula 8 perusahaan asuransi dan reasuransi telah merencanakan ekspansinya di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Semakin terbukanya informasi mengenai peluang investasi di Asia Pasifik dan Afrika diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan investasi Indonesia di negara berkembang lain.

Untuk itu dalam rangka memperkuat potensi KSS di bidang investasi, diperlukan suatu cetak biru investasi Indonesia di negara berkembang, baik yang akan dilakukan oleh perusahaan negara maupun swasta. Melalui cetak biru investasi KSS Indonesia ini diharapkan dapat tersusun rencana yang lebih agresif dan komprehensif mengenai investasi Indonesia di negara berkembang.

2. KERJASAMA TEKNIK

Program KTNB Indonesia merupakan refleksi dari keberhasilan dan pengalaman Indonesia dalam melaksanakan program pembangunan dan menjadi dasar bagi Indonesia untuk merancang program KTNB seperti di bidang pertanian, pekerjaan umum dan keluarga berencana.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan semakin besar dengan munculnya isu-isu global seperti lingkungan, bencana dan penyakit menular. Selain itu negara berkembang lain seperti Thailand dan Malaysia telah melakukan reformulasi terhadap kegiatan kerjasama tekniknya yang lebih terarah dan terkoordinasi.

Menghadapi tantangan kedepan, diperlukan berbagai langkah tindak untuk memperkuat kerjasama teknik antar negara berkembang sebagai berikut :

a. Program Pelatihan

Program pelatihan memainkan peranan penting dalam pengembangan sumberdaya manusia. Melalui program pelatihan, peserta pelatihan tidak saja memperoleh pengetahuan teknis tetapi juga dapat mengetahui budaya Indonesia dan mempererat hubungan antar individu dan antar lembaga. Untuk lebih mendedayakan berbagai fasilitas terutama fasilitas yang berada di kementerian/lembaga, perlu dilakukan berbagai langkah sebagai berikut:

1) Peningkatan Fasilitas Pelatihan

Mengingat banyaknya fasilitas yang dimiliki kementerian/lembaga yang dapat dioptimalkan dalam rangka KSS serta dengan pertimbangan bahwa sebagian lembaga pelatihan tersebut merupakan warisan bantuan dari donor, maka diperlukan berbagai rencana tindak untuk optimalisasi peran dan fungsi serta mengarahkan fasilitas-fasilitas tersebut sebagai "*internationally recognized center of excellence*".

2) **Peningkatan Sumber Daya Manusia**

Keberhasilan pelaksanaan program KTNB Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan tenaga ahli dan para instruktur teknis. Peningkatan pengetahuan para tenaga ahli dan instruktur mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru diperlukan untuk dapat meningkatkan kredibilitas tenaga ahli dan lembaga pendidikan.

3) **Peningkatan Program Pelatihan**

Materi dan metodologi pelatihan merupakan salah satu pilar penting dalam program pelatihan. Penyusunan materi dan kurikulum diperlukan dengan mengembangkan konsep pelatihan yang integratif yang meliputi: 1) kajian kebutuhan pelatihan; 2) rumusan tujuan pelatihan; 3) merancang program pelatihan; 4) evaluasi program pelatihan. Peningkatan materi dan kurikulum perlu dilakukan dengan pertimbangan perkembangan paradigma dari *training oriented* ke *learning oriented* yang menekankan pada pembelajaran aktif.

b. Beasiswa

Beasiswa merupakan salah satu pilar penting dalam kerjasama teknik antar negara berkembang.

Melalui program beasiswa, Indonesia dapat meningkatkan jangkauan kerjasama dengan universitas, mitra kerjasama internasional, lembaga swadaya masyarakat dan donor lainnya. Sebaliknya penerima beasiswa, dapat lebih mengenal berbagai isu-isu pembangunan di Indonesia dan memberi kesempatan bagi penerima beasiswa untuk dapat lebih mengenal budaya Indonesia.

Ke depan program beasiswa perlu di tingkatkan tidak hanya untuk program S1 dan S2 tetapi juga program doktor. Perguruan Tinggi yang dapat menerima peserta program beasiswa perlu di perluas tidak hanya pada perguruan tinggi negeri tetapi juga swasta.

c. Bantuan Proyek

Bantuan proyek merupakan salah satu pilar dari kerjasama teknik antar negara berkembang. Komponen utama dalam bantuan proyek dapat meliputi pengadaan peralatan atau barang, penugasan tenaga ahli, dan program pelatihan.

Mengingat kompleksitas dari pelaksanaan bantuan proyek yang terkait dengan sosio-ekonomi dari negara yang akan dibantu dan besarnya dana yang diperlukan untuk bantuan proyek, maka Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia ke depan dalam memberikan bantuan proyek perlu mempertimbangkan beberapa hal. *Pertama*, diperlukan kajian yang mendalam mengenai pertimbangan pemberian bantuan, meyangkut aspek politis dan ekonomis dari bantuan tersebut; *Kedua*, dengan memberikan bantuan tersebut diharapkan terbukanya peluang dan akses bagi masuknya jasa dan produk Indonesia.

3. KERJASAMA SOSIAL DAN BUDAYA

Sebuah tinjauan yang dilakukan oleh UNESCO mengungkapkan bahwa Kerjasama Selatan-Selatan di bidang pendidikan telah lama dilaksanakan meskipun hal ini tidak secara khusus diakui sebagai inisiatif Selatan-Selatan.

Sebuah studi lebih lanjut yang diselenggarakan oleh UNESCO merekomendasikan bahwa dalam konteks mempromosikan Kerjasama Selatan-Selatan dalam bidang pendidikan maka perlu: a) memfasilitasi harmonisasi sistem pendidikan untuk memenuhi dan menghadapi tantangan global; b) membangun kemitraan dan kerjasama yang lebih luas dengan organisasi regional dan subregional dengan memfokuskan isu prioritas bersama negara-negara berkembang; c) memainkan peranan proaktif.

Bidang kepariwisataan di negara-negara berkembang merupakan fenomena yang semakin berkembang, terutama di tingkat kawasan seperti ASEAN, *the Southern African Development Community (SADC)*; and MERCOSUR (Kelompok negara-negara di Amerika Latin). Namun, dalam konteks Kerjasama Selatan-Selatan bidang kepariwisataan belum banyak mendapat perhatian, sementara hampir 50 negara kurang berkembang bergantung pada bidang ini.

Isu kepariwisataan menjadi sangat relevan ketika kemandirian bersama dan kerjasama antar negara berkembang semakin meningkat. Negara berkembang mempunyai "*keunggulan komperatif*" vis a vis negara maju, karena negara berkembang mempunyai sumber daya yang luar biasa dan menarik seperti cuaca yang hangat, pantai yang menarik, hutan tropis, budaya yang eksotis dan otentik.

Dalam konteks keunggulan komperatif di bidang kepariwisataan inilah, maka Deklarasi Marrakech mengenai Kerjasama Selatan-Selatan, pada Desember 2003, menekankan pentingnya mempromosikan kepariwisataan melalui pengembangan *e-tourism*.

a. Pendidikan

Berbagai program kerjasama dalam bidang pendidikan telah dilakukan oleh Indonesia melalui program beasiswa negara berkembang, pelatihan guru dan mengembangkan program *sister school*. Ke depan potensi perguruan tinggi yang cukup baik dapat dikembangkan ke arah kerjasama antara universitas yang menghasilkan *double degree*.

Kerjasama di bidang pendidikan antar negara berkembang diharapkan dapat lebih meningkatkan *people to people contact* dan membangun inovasi dan solusi yang efektif di antara negara berkembang dalam rangka pencapaian dengan meningkat taraf pendidikan "*Education For All*".

b. Pariwisata

Pariwisata Indonesia merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia dan sebagai penyumbang devisa negara yang cukup signifikan. Tahun 2009, jumlah wisatawan internasional naik sekitar 3% menjadi 6,45 juta dibandingkan tahun 2008 sebesar 6,43 juta wisatawan. Tiga perempat wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia berasal dari kawasan Asia-Pasific seperti Jepang, Cina dan Singapore.

Kendati isu pariwisata dalam Kerjasama Selatan-Selatan belum banyak mendapat perhatian di dalam negeri, namun dengan munculnya negara berkembang yang telah mencapai *upper middle income countries* seperti Aljazair, Argentina, Brazil, dan Afrika Selatan merupakan peluang bagi Indonesia untuk memperluas promosi pariwisata Indonesia dan mengembangkan kerjasama dengan negara berkembang lain untuk lebih memperkuat posisi berbagai warisan budaya Indonesia.

4. KERJASAMA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat tidak lagi menjadi dominasi negara-negara maju. Banyak negara Selatan mengembangkan teknologi yang disesuaikan dengan kondisi dan budaya yang dimiliki oleh negara berkembang, bahkan negara berkembang seperti India, Cina dan Brasil menjadi inovator dari teknologi yang sesuai dengan kebutuhan negara berkembang.

Namun demikian, sebagian besar negara berkembang masih jauh dari jangkauan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan yang dihadapi negara berkembang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bagaimana mempersempit jurang antara Selatan dan Utara dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi. Tantangan lain adalah bagaimana memobilisasi Iptek yang ada di negara berkembang untuk membantu pembangunan negara berkembang.

Upaya meningkatkan kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan negara berkembang adalah dengan menggali kemampuan yang masih terpendam. Tanpa memanfaatkan secara optimal berbagai lembaga penelitian dan pengembangan yang tersebar di negara berkembang nampaknya upaya untuk membangun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan sulit.

Oleh karena itu, diperlukan identifikasi mengenai lembaga-lembaga penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah memiliki reputasi dan dikenal di lingkungan negara berkembang.

Kemampuan penelitian dan pengembangan Iptek Indonesia sebenarnya cukup membanggakan. Lembaga seperti Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman di Bandung, Sabo Centre di Yogyakarta dan Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPITEK) di lingkungan LIPI adalah sebagian kecil lembaga/badan litbang yang perlu mendapat perhatian untuk dapat dikembangkan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan.

Perusahaan nasional seperti PT. PAL, PT. INKA, PT. Dirgantara Indonesia dan Biofarma merupakan sebagian dari perusahaan nasional yang mempunyai potensi besar untuk mendukung kemajuan di bidang teknologi di negara berkembang dan sekaligus membuka pasar bagi produk Indonesia

Menghadapi persaingan teknologi yang semakin kuat, ke depan penguatan dan pengembangan lembaga penelitian dan pengembangan perlu ditingkatkan agar kemampuan Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi rujukan bagi negara berkembang. Indonesia perlu menghasilkan teknologi tepat guna yang dapat diciptakan oleh peneliti/masyarakat Indonesia dan perlu diperkenalkan kepada negara berkembang sebagai alternatif dari teknologi yang rumit dari barat.

5. KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Salah satu kecenderungan yang muncul dalam KSS adalah berkembangnya desentralisasi pada KSS dengan melibatkan lembaga di luar Pemerintah Pusat dan melibatkan Pemerintah Daerah. Kerjasama kota kembar (*sister city*) dan kerjasama antar propinsi di dalam kerangka KSS semakin berkembang seperti kerjasama kota Jakarta-Beijing, Bandung dengan kota Suwon, Korea Selatan, rencana kota kembar Harare dengan Bandung dan Singkawang-Yangmei. Demikian pula kerjasama antar propinsi (*sister province*) seperti Propinsi Papua dengan Guangxi, Cina; Propinsi Banten dengan Kota Metropolitan Incheon, Korea Selatan.

Otonomi daerah membuka peluang yang cukup besar bagi pengembangan kerjasama antara kota dan propinsi. Pemerintah daerah dapat menjajaki kerjasama dengan pemerintahan daerah di negara berkembang, antara lain melalui *sistes cities/provice* yang dapat mendorong penguatan dan peningkatan potensi daerah dan memperkenalkan daerah untuk tujuan investasi dan pariwisata serta mendukung pelestarian budaya bangsa.

Kerjasama antar kota perlu di tingkatkan mengingat banyaknya kota-kota besar di negara berkembang yang mempunyai masalah yang sama seperti kemiskinan di perkotaan, transportasi, urbanisasi yang semakin pesat, masalah lingkungan dan kesehatan serta masalah keamanan.

Indonesia dapat mengambil inisiatif untuk membangun kerjasama antar kota melalui program “*Connecting South Cities*” di mana kota-kota besar di Indonesia dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam mengembangkan perkotaan yang lebih baik dengan berbagai kota di negara Selatan lain.

6. KERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAINNYA

a. Swasta

Peran swasta sebagai salah satu pilar dalam Kerjasama Ekonomi antar Negara Berkembang (KENB-ECDC) diharapkan akan lebih besar di masa mendatang. Perluasan dan pembukaan akses dan pasar di negara-negara berkembang memerlukan koordinasi yang sinergis antara pemerintah dengan swasta.

Hubungan perdagangan dan investasi dengan negara berkembang di kawasan baik di Asia Pasifik maupun Afrika perlu ditingkatkan. Kegiatan KADIN di Afrika dengan melakukan kerjasama dengan Mozambique dapat menjadi pintu masuk yang lebih intensif. Nota Kesepahaman antara Indonesia dengan Mozambique yang menyepakati skema kerjasama *forward processing* yaitu Mozambique mengeksport kapas ke Indonesia, diproses di Indonesia dan produk akhir kembali diekspor ke Mozambique, merupakan bentuk skema yang inovatif dalam meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi yang membuka kesempatan dan memberi menguntungkan kedua belah pihak (*mutual opportunity and benefit*).

Untuk dapat lebih mendorong kerjasama ekonomi Selatan-Selatan, fasilitasi yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan kementerian/lembaga pemerintah terkait lainnya diperlukan untuk dapat mendorong para pengusaha membuka, mencari peluang dan memperluas pasar non-tradisional baru seperti Asia

Pasifik dan Afrika. Peranan KADIN dan Asosiasi sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman para pengusaha Indonesia mengenai peluang dan potensi pasar di berbagai kawasan.

Langkah KADIN dan Kementerian Luar Negeri yang menanda tangani *Pengaturan Bersama Kerjasama Tentang Peningkatan Perdagangan dan Investasi Indonesia dan Negara-Negara Afrika*, Januari 2008 merupakan langkah strategis untuk membangun dan mengembangkan potensi perdagangan dan investasi di Afrika.

Tindak lanjut yang lebih konkrit dari Pengaturan Bersama ini diperlukan antara lain melakukan pemetaan bersama, identifikasi pasar yang prospektif dan pasar potensial serta peluang bersama (*mutual opportunity*) yang dapat dijajaki Indonesia bersama negara berkembang lain di Afrika.

Berbagai kesepakatan yang telah ditandatangani pemerintah seperti *Bilateral Investment Treaties* dan *Global System of Trade Preferences*, merupakan upaya untuk mendukung dan mendorong peran swasta yang lebih besar. Swasta di harapkan dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan dalam kerangka perjanjian-perjanjian tersebut.

b. Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat Sipil

Peranan dan keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) telah mendapat tempat dalam meningkatkan dan memperkuat Kerjasama Selatan-Selatan sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa LSM dan OMS Indonesia seperti Yayasan Dian Desa dan Yayasan IBEKA. Demikian pula halnya dengan peranan “*volunteers*” yang semakin menonjol pada situasi di mana perangkat resmi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya seperti halnya pada saat terjadinya bencana.

Peranan LSM dan OMS dalam kerangka KSS perlu diperkuat untuk membangun kemandirian masyarakat dan memobilisasi berbagai sumber yang ada. Pendekatan spesifik yang dilakukan LSM dan OMS dapat lebih mendorong dan meningkatkan KSS dengan: 1) membantu membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan; 2) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan; 3) memperluas akses masyarakat terhadap berbagai informasi; 4) membangun alternatif solusi; 5) memperkuat kapasitas masyarakat; 6) menyebarluaskan berbagai pengetahuan dan *best practices*.

c. Perguruan Tinggi

Kerjasama yang mengikutsertakan Perguruan Tinggi telah berlangsung sejak tahun 1980an dan mendapat penerimaan yang baik dari berbagai negara berkembang. Pemberian beasiswa kepada negara berkembang meningkat ketika Indonesia menjadi ketua GNB dan kemudian diperluas sehingga dapat menjangkau lebih banyak peserta negara berkembang. Program yang ditawarkan pun semakin meningkat termasuk program Pasca Sarjana (Magister).

Perguruan tinggi dapat memainkan peran penting dalam KSS sebagaimana banyak diutarakan berbagai pihak dalam forum dan arena internasional. Peran Universitas Gadjah Mada dalam bekerjasama dengan Universitas Nambia dalam membantu pengembangan sistem irigasi dan

diversifikasi pangan dan tanaman padi, menunjukkan bagaimana pentingnya keterlibatan universitas dalam pengembangan dan penguatan KSS.

Ke depan kemitraan dengan Perguruan Tinggi perlu ditingkatkan dan diperkuat dengan memberikan peran yang lebih besar pada Perguruan Tinggi untuk mengembangkan program-program yang inovatif dan merupakan jawaban terhadap berbagai kecenderungan dan tantangan serta dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan negara berkembang.

BAB IV

TAHAPAN WAKTU DAN SKALA PRIORITAS

1. RENCANA PRIORITAS PERIODE I : 2011-2014

Dalam tahapan ini, prioritas akan difokuskan pada konsolidasi Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia melalui aktivitas sebagai berikut:

- 1) **Perumusan Kerangka Hukum:** Perumusan KSS dalam perundangan dan peraturan pemerintah perlu dilakukan sebagai dasar bagi pelaksanaan KSS Indonesia. Kerangka hukum merupakan landasan bagi penyusunan arah kebijakan dan pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia. Melalui kerangka hukum, keterlibatan semua pihak dalam KSS Indonesia akan lebih jelas, termasuk peran swasta, LSM dan Perguruan Tinggi. Payung hukum KSS juga dapat menambah kepercayaan para pemangku kepentingan dalam menyusun rencana dan pelaksanaan KSS Indonesia.

Mekanisme dan prosedur KSS yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di perlukan agar pelaksanaan program KSS dapat lebih terpadu, terarah dan terukur.

- 2) **Penguatan Koordinasi Kelembagaan:** Penguatan koordinasi antara pemangku utama KSS Indonesia (Kementerian Luar Negeri, Sekretariat negara, Bappenas dan Kementerian Keuangan) merupakan langkah awal bagi terwujudnya suatu entitas nasional Kerjasama Selatan-Selatan ke depan. Penguatan koordinasi selain dapat mengurangi fragmentasi yang selama ini ada, juga dapat meningkatkan efektifitas KSS melalui program dan kegiatan yang lebih terarah baik dari segi pendanaan, perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.

Lembaga pelaksana KSS (*implementing agencies*) perlu pula diperkuat baik sumber daya manusia, fasilitas dan metodologi maupun kemampuan analisis untuk menghadapi berbagai tantangan dan kecenderungan KSS yang semakin cepat.

- 3) **Pendanaan :** Alokasikan sumber pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah merupakan kunci keberhasilan KSS Indonesia.

Penyusunan mekanisme dan prosedur pendanaan diperlukan agar penggunaan anggaran pemerintah dapat lebih optimal dan lebih terarah.

Dengan pertimbangan peran Indonesia ke depan akan memberikan bantuan kepada negara berkembang lain, maka perlu adanya pos anggaran yang dapat menampung kepentingan tersebut. Tata kelola keuangan Kerjasama Selatan-Selatan diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas keuangan negara.

Penyusunan rancangan anggaran KSS Indonesia harus selalu disesuaikan dengan jadwal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sehingga pengalokasian pembiayaan KSS dapat lebih optimal.

Munculnya berbagai skema sumber pembiayaan baik skema bilateral dan multilateral perlu dijajaki. Demikian pula dengan skema pembiayaan melalui “*kerjasama triangular*” yang mulai banyak dilakukan dalam kerangka KSS. Pembiayaan melalui skema-skema dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional KSS Indonesia.

- 4) **Sistem Informasi dan Database KSS Indonesia** : Pengembangan sistem informasi dan database KSS yang terintegratif sebagai alat untuk pengambilan keputusan sangat diperlukan.

Data dan informasi mengenai pelaksanaan program yang terpadu mencakup lintas kementerian/lembaga dan para pihak di luar pemerintahan seperti swasta, LSM dan perguruan tinggi dan peserta dari negara berkembang lain yang tersebar di berbagai Kementerian dan lembaga, perlu ditata dengan baik dalam sebuah database Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia.

Selain itu ikatan dengan para alumni program Kerjasama Teknik Selatan-Selatan Indonesia perlu dibangun melalui sistem informasi agar jalinan hubungan dengan para alumni dapat terjaga dengan baik melalui suatu jaringan Alumni KSS Indonesia.

- 5) **Promosi dan Publikasi**: Promosi dan publikasi mengenai Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia masih sangat terbatas. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai publikasi mengenai keberhasilan dan pengalaman Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia dan melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik, dengan melibatkan para pemangku kepentingan KSS Indonesia.

Penyebaran publikasi dan informasi mengenai Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia kepada berbagai komponen masyarakat, baik tokoh masyarakat, kelompok/pemangku kepentingan, organisasi masyarakat, tokoh/partai politik, dunia usaha maupun kalangan generasi muda, diharapkan dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai peran yang dapat dimainkan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh dari ke ikutsertaan Indonesia dalam KSS.

2. RENCANA PRIORITAS PERIODE II : 2015-2019

Pada tahapan ini, prioritas akan difokuskan pada penguatan dan perluasan KSS Indonesia yang meliputi:

- 1) **Penguatan Entitas Kelembagaan KSS Indonesia** : Dengan terbentuknya entitas kelembagaan KSS Indonesia, program KSS yang telah dilakukan selama periode 2010-2014 perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas baik sumber daya manusianya maupun, fasilitas dan metodologi serta perluasan pasar bagi produk dan jasa Indonesia. Melihat perkembangan ke depan yang

semakin kompleks, identifikasi program dan negara sasaran serta kawasan perlu diperluas seiring dengan kebijakan hubungan dan politik luar negeri Indonesia. Pada tahapan ini diharapkan peningkatan posisi Indonesia sebagai “*new emerging partner in development*”;

- 2) **Pengembangan Program Baru:** Dalam mengantisipasi berbagai kecenderungan dan munculnya isu-isu baru dalam KSS diperlukan suatu inovasi dan kreativitas dalam berbagai pengembangan program-program baru. Pengembangan program baru perlu diselaraskan dengan program RPJMN 2015-2019. Identifikasi dan penentuan program yang dapat dikerjasamakan perlu dilakukan agar sasaran program dapat lebih terarah pada kerjasama pembangunan yang baru;
- 3) **Penguatan dan Pelibatan Lembaga Non- Pemerintah:** Pengembangan dan perluasan kerjasama KSS memerlukan partisipasi semua pihak termasuk swasta, organisasi masyarakat sipil/LSM dan Perguruan Tinggi;
- 4) **Peningkatan dan Perluasan Jangkauan:** Peningkatan kerjasama pada kawasan prioritas perlu tetap dikembangkan dengan melakukan upaya perluasan kerjasama ekonomi baik akses dan pasar. Diharapkan dalam tahapan ini perluasan akses dan pasar dapat menjangkau negara-negara non tradisional di kawasan prioritas;
- 5) **Evaluasi:** Evaluasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan KSS selama 10 tahun diperlukan untuk menentukan arah dan kebijakan KSS Indonesia ke depan. Melalui evaluasi nasional diharapkan dapat disusun program yang lebih baik dan dapat memenuhi sasaran dan kepentingan nasional.

3. RENCANA PRIORITAS PERIODE III: 2020-2025

- 1) **Mempertahankan dan Memperluas Kerjasama:** Program KSS yang telah dilaksanakan selama periode 2010-2014 dan 2015-2019 perlu dipertahankan, diperkuat dan diperluas;
- 2) **Pengembangan Program Baru:** Berdasarkan kajian dan evaluasi selama periode 2010-2014 dan 2015-2019 terhadap pelaksanaan KSS Indonesia dan analisis strategis terhadap berbagai kecenderungan dan isu yang akan muncul dalam dekade ke depan KSS Indonesia memerlukan suatu inovasi dan kreativitas yang menantang untuk mengantisipasi berbagai kecenderungan dan tantangan.

Pengembangan program baru perlu diselaraskan dengan program nasional 2020-2025 melalui identifikasi dan penentuan program-program kerjasama.

- 3) **Meningkatkan Pelibatan Peran Lembaga Non-Pemerintah:** Pada tahapan ini diharapkan kontribusi dan peran lembaga swasta, organisasi masyarakat sipil (OMS)/LSM dan perguruan tinggi lebih meningkat dan bersinergi dengan program nasional;
- 4) **Peningkatan dan Perluasan Jangkauan:** Pada tahapan ini diharapkan telah terbuka akses dan pasar bagi produk yang lebih luas jangkauannya dan pementapan posisi Indonesia sebagai “*new partner in development*”.

BAB V

SUMBER PEMBIAYAAN

Kerjasama Selatan-Selatan dapat didukung melalui modalitas pembiayaan yang berasal baik dari anggaran pemerintah maupun yang berasal dari sumber bilateral maupun multilateral. Perkembangan yang semakin luas dalam KSS, telah mendorong peran swasta yang lebih besar dalam pelaksanaan KSS. Demikian pula dengan kesempatan bagi lembaga pembiayaan untuk dapat memainkan peran dalam mendukung pelaksanaan KSS di bidang perdagangan dan investasi.

1. APBN

Kunci utama keberhasilan KSS Indonesia adalah ketersediaan dana pemerintah yang memadai bagi berbagai program dan kegiatan KSS Indonesia. RPJMN 2010-2014 mengamanatkan mengenai strategi dan kebijakan keuangan negara yang ditempuh melalui upaya optimalisasi pengeluaran pemerintah.

Sumber APBN selama ini lebih dimanfaatkan sebagai dana pendamping bagi kerjasama dengan mitra internasional (melalui pengaturan tripartit) dan belum secara optimal digunakan bagi program KSS yang pembiayaannya seluruhnya melalui APBN, Indonesia. Hal ini dapat dipahami mengingat sumber APBN yang terbatas dan belum dapat sepenuhnya memenuhi kepentingan program dan pelaksanaan KSS Indonesia.

Namun demikian sumber APBN yang terbatas perlu dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran melalui :

1. Penajaman alokasi anggaran agar dapat lebih terarah dan terpadu yang di dukung dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya;
2. Pengaturan yang dapat mengintegrasikan kebutuhan pembiayaan KSS yang bersumber baik dari dana APBN maupun dari pihak mitra pembangunan dan pemberi bantuan. Integrasi sumber pendanaan akan memberikan beberapa manfaat di antaranya: 1) Optimalisasi pemanfaatan dana berdasarkan skala prioritas; 2) Kemudahan dalam memonitor penggunaan dana; 3) Kemudahan pengalokasian anggaran pada setiap program yang telah direncanakan;
3. Meningkatkan dan memperkuat tata kelola keuangan KSS melalui panduan mekanisme yang baku, yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan KSS;
4. Penyusunan rancangan anggaran KSS Indonesia disesuaikan dengan jadwal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sehingga pengalokasian pembiayaan KSS dapat lebih optimal.

Dengan perkembangan KSS Indonesia yang mengarah pada peran Indonesia yang lebih aktif sebagai mitra negara berkembang lain dengan memberi bantuan, maka perlu dilakukan penyesuaian sumber pembiayaan melalui APBN untuk KSS Indonesia. Untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai adanya pos anggaran khusus untuk belanja hibah dan pos anggaran untuk pembiayaan bantuan pembangunan (*development aid*) di negara berkembang lain.

2. KERJASAMA BILATERAL

Kerjasama bilateral KSS Indonesia dengan negara berkembang lain diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan posisi Indonesia sebagai “*middle income countries*” dan peran Indonesia dalam berbagai forum dan arena internasional seperti keanggotaan Indonesia dalam G-20. Peningkatan ini dapat lebih didorong melalui skema kesepakatan bilateral yang tertuang di dalam berbagai perjanjian bilateral yang mekanismenya dilakukan melalui Pertemuan Komisi Bersama.

Skema pembiayaan program dan proyek KSS dalam kerangka bilateral dapat dilakukan melalui pembiayaan bersama (*cost sharing*). Dengan keterbatasan sumber dari APBN, skema pembiayaan melalui pembiayaan bersama merupakan salah satu alternatif pembiayaan dengan tetap memperhatikan posisi dan kepentingan nasional Indonesia.

Pemanfaatan skema pembiayaan melalui pembiayaan bersama (*cost sharing*) secara optimal dapat dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki Indonesia. Pemilihan kemampuan dan kapasitas Indonesia akan sangat menentukan posisi dalam pembiayaan yang perlu ditanggung oleh Indonesia.

3. MITRA KERJASAMA INTERNASIONAL

Keterlibatan mitra kerjasama internasional dalam program KSS Indonesia telah berlangsung cukup lama seiring dengan pemanfaatan berbagai fasilitas yang dimiliki kementerian/lembaga sebagai bagian dari bantuan teknik negara dan lembaga donor kepada Indonesia. Fasilitas ini kemudian didaya-gunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan KTNB.

Ke depan keterlibatan mitra kerjasama internasional dalam KSS Indonesia secara bilateral masih akan dilakukan, kendati secara bertahap, dan diperkirakan akan mengalami penurunan seiring dengan penurunan bantuan secara bilateral. Untuk dapat menggali pembiayaan secara bilateral, Indonesia perlu melakukan pendekatan dan analisis serta mengajukan program-program yang inovatif yang selaras dengan kebutuhan negara berkembang.

Pembiayaan untuk KSS yang bersumber dari multilateral cukup luas seperti dalam kerangka badan PBB (antara UNDP, FAO, UNFPA, WHO, dan UNIDO) melalui UNDP Trust Fund maupun melalui kelompok multilateral lain seperti G-15 dengan Perez Guerero Trust Fund. Indonesia dapat memanfaatkan sumber dari multilateral untuk meningkatkan program KSS melalui program-program yang merupakan keunggulan Indonesia dan mendapat perhatian besar komunitas multilateral.

Keinginan negara berkembang untuk mencari skema pembiayaan bagi program KSS yang inovatif telah mendorong semakin perlunya pembiayaan melalui skema “*triangular cooperation*”. UNDP menyebutkan bahwa kerjasama triangular Selatan-Selatan menjadi semakin populer sebagai cara untuk mendukung pembangunan dengan memanfaatkan berbagai bentuk kerjasama antara negara-negara berkembang dengan bantuan dari negara maju.

Mengingat skema kerjasama triangular akan melibatkan negara donor/lembaga pembangunan internasional dan negara berkembang lain, maka ada beberapa hal yang kiranya perlu mendapat perhatian Indonesia :

1. Indonesia perlu mengidentifikasi potensi, kemampuan dan kapasitas yang dimiliki yang dapat di kerjasamakan melalui skema “triangular”. Identifikasi ini diperlukan untuk menyamakan dengan kebutuhan negara berkembang dan untuk menarik minat negara maju untuk bermitra dalam skema ini.
2. Indonesia perlu lebih proaktif mengajukan program strategis dan inovatif dalam berbagai forum KSS yang memungkinkan dilaksanakan melalui skema kerjasama triangular.
3. Kerjasama triangular memerlukan pengelolaan yang spesifik mengingat tiga pihak yang terlibat di dalamnya.

Ke depan bentuk kerjasama triangular akan menjadi *trend* mengingat manfaat dari kerjasama ini bagi negara berkembang yang mempunyai posisi sebagai *pivotal country*, negara berkembang penerima bantuan dan negara donor/lembaga pembangunan internasional. Kerjasama triangular diperkirakan akan berkembang dengan melibatkan banyak pihak termasuk sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi dan lembaga pembiayaan.

4. SWASTA DAN PERBANKAN

Swasta dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan KSS Indonesia dengan memanfaatkan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk kegiatan seperti program pelatihan dan magang. Skema kontribusi melalui CSR dapat dikaitkan dengan kerjasama perdagangan dan investasi yang telah disepakati.

Untuk dapat memanfaatkan secara optimal kerjasama ekonomi, maka pada setiap kesepakatan yang akan dibangun antara Indonesia dengan negara berkembang lain hendaknya memasukkan unsur pengembangan dan menguatkan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, pada saat yang sama melalui program pembangunan kapasitas dapat terjalin kerjasama teknis antar kedua negara.

Peranan perbankan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program KENB. Walaupun harus di akui salah satu kendala dalam pelaksanaan program KENB, adalah keraguan perbankan untuk membantu pembiayaan program kSS mengingat resiko yang tinggi yang harus ditanggung. Namun dengan memperkuat kelembagaan dan pembiayaan perdagangan luar negeri dapat mendorong efektivitas pengembangan ekspor nonmigas.

Potensi untuk memanfaatkan perbankan dalam KSS bidang ekonomi sangat lebar. Lembaga pembiayaan nasional secara perundangan dimungkinkan untuk melakukan pembiayaan proyek-proyek di luar negeri termasuk di negara berkembang perlu di dorong. Pemanfaatan Lembaga Pembiayaan akan meningkatkan posisi Indonesia sebagai negara yang dapat memberikan fasilitas kredit sekaligus sebagai negara pemberi bantuan pembangunan luar negeri (*overseas development assistance*).

5. TRUST FUND

(Penjelasan mengenai trust fund KSS dari Bappenas)

Untuk mengoptimalkan berbagai sumber, perlu dijajaki skema *multi donor fund facility for south-south cooperation* untuk mengefektifkan pemanfaatan sumber dari mitra kerjasama internasional dalam pengembangan dan penguatan KSS Indonesia.

BAB VI PROGRAM KERJASAMA

Program Kerjasama dalam *Grand Design* sesuai dengan tahapan 2010-2025 diarahkan pada penguatan, pengembangan dan perluasan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia yang dapat mendukung program pembangunan nasional dan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Penguatan dan perluasan kerjasama di bidang ekonomi diharapkan dapat secara sinergis dan paralel dikembangkan bersama dengan program kerjasama teknik, sosial budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sinergi lintas sektoral antara kerjasama ekonomi, teknik, sosial budaya dan Iptek sangat diperlukan untuk dapat memperkuat KSS Indonesia. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai Inpres No.6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, merupakan salah satu inisiatif yang dapat dikembangkan untuk disinergikan dengan program kerjasama teknik melalui program pelatihan dan penugasan tenaga ahli serta kerjasama sosial budaya melalui program pariwisata. Demikian pula dengan mensinergikan kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengembangan ekonomi kreatif melalui penciptaan inovasi teknologi berbasis masyarakat yang mendukung usaha UKM yang dapat dikembangkan di negara berkembang lain. Potensi sinergi antar bidang kerjasama sangat dimungkinkan untuk dikembangkan mengingat kapasitas dan keragaman program KSS yang saling terkait.

Perkembangan di lingkungan KSS yang semakin luas dan kompleks dengan munculnya berbagai kecenderungan dan isu-isu baru antara lain seperti krisis keuangan, energi, ketahanan pangan, perubahan iklim dan bencana telah mendorong munculnya program-program baru dalam KSS untuk menjawab tantangan tersebut.

Ke depan, dengan munculnya berbagai isu-isu dan tantangan baru tersebut, program KSS Indonesia 2010-2025 perlu diarahkan dengan mengembangkan dan menyusun program yang didasarkan pada potensi, kapasitas, kemampuan dan pengalaman Indonesia dalam menghadapi dan menangani berbagai isu dan tantangan pembangunan.

Program Indikatif KSS Indonesia 2010-2025

Program KSS Indonesia 2010-2025 merupakan program indikatif yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan di tatanan internasional maupun nasional serta disusun berdasarkan pertimbangan:

1. Produk dan komoditas pilihan yang diperkirakan dalam kurun waktu 15 tahun ke depan masih akan menjadi pilihan utama Indonesia;
2. Peluang investasi utama di dalam negeri yang masih akan terbuka dan perkiraan akan adanya peningkatan investasi Indonesia di negara berkembang lain berdasarkan pengalaman di dalam negeri;
3. Pengalaman panjang bidang/sector kerjasama yang masih mendapat minat dan masih relevan dalam menjawab tantangan kedepan;
4. Bidang/sector baru untuk menjawab kecenderungan dan tantangan baru dalam KSS.

Melalui penyusunan daftar indikatif Program KSS 2010-2025 diharapkan para pemangku kepentingan KSS Indonesia dapat menjabarkan dalam program-program yang lebih konkrit dalam rangka memperkuat kapasitas KSS Indonesia.

Program Kerjasama Ekonomi

Program indikatif dalam kerangka Kerjasama Ekonomi akan meliputi produk atau sector potensial dan pilihan utama di bidang perdagangan, industri dan investai yang di perkirakan masih akan menjadi program pilihan utama Indonesia ke depan.

Produk dan Sektor Potential		
Perdagangan	Industri	Investasi
Tekstil dan produk tekstil (TPT)	Pupuk	Makanan
Elektronika	Pupuk non Urea	Pertanian
Karet dan produk karet	Semen	Energi
Minyak kelapa sawit	Peralatan listrik rumah tangga	Energi terbarukan
Hasil hutan	Pulp dan kertas	Infrastruktur
Alas kaki	Mesin Lsitrik	Farmasi
Udang	otomotif	Petro kimia
Kakao	Ban	
Kopi.	Barang jadi rotan	
	keramik	

Program Kerjasama Teknik

Program Kerjasama Teknik merupakan program yang secara teratur telah dilaksanakan setiap tahun melalui berbagai program pelatihan, workshop, seminar, magang, studi banding dan penugasan tenaga ahli.

Bidang Kerjasama Teknik	
Pertanian dalam rangka ketahanan pangan	Sosial
Keluarga Berencana	Media dan informasi
Kesehatan	Energi dan energi alternatif
Pendidikan	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Pekerjaan umum	Kebencanaan
Perikanan	Demokratisasi

Program Kerjasama Sosial Budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Program Kerjasama Sosial Budaya merupakan program yang dapat mempererat hubungan antar individu dan meningkatkan pemahaman budaya Indonesia. Sementara Kerjasama dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat mendorong pengenalan kemampuan teknologi Indonesia kepada negara berkembang lainnya.

Program Sosial Budaya	Program Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Program Beasiswa	Kerjasama antar lembaga penelitian
Kerjasama antar universitas	Pertukaran peneliti
Pertukaran siswa dan guru	Penelitian bersama
Pertukaran pemuda	
Program pendidikan pesantren	
Pertukaran misi budaya	
<i>Peningkatan MICE (Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition)</i>	

BAB VII

KAWASAN

Perkembangan yang terjadi di berbagai kawasan dan konstelasi hubungan dan politik internasional yang semakin dinamis dan kompleks, mensyaratkan bahwa Indonesia perlu memetakan dan menata hubungan yang lebih erat dan timbal balik dengan negara-negara berkembang di berbagai kawasan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan.

Melalui reformulasi pemetaan kawasan, Indonesia dapat menyusun dan mengembangkan Kerjasama Selatan-Selatan yang lebih fleksibel sesuai dengan tantangan dan kecenderungan yang berkembang di kawasan tertentu, dan dapat lebih fokus dalam mengartikulasikan peran, posisi, dan kepentingan nasional di berbagai bidang.

ASEAN akan tetap menjadi fokus utama KSS Indonesia. *Vientiane Action Program (VAP)* yang ditandatangani tahun 2003 merupakan langkah awal untuk mendukung implementasi pencapaian ASEAN Economic Community di tahun 2020. *Blueprint ASEAN (Ekonomi, Politik dan Keamanan,*

dan Sosial Budaya), merupakan peta kebijakan (*roadmap*) guna mentransformasikan ASEAN menjadi kelompok regional yang terintegrasi, baik pasar tunggal, politik dan keamanan maupun dalam masalah sosial budaya.

Kawasan Asia Pasifik dan Afrika merupakan salah satu tujuan dan sasaran strategis dalam meningkatkan hubungan kerjasama bilateral dan regional di berbagai bidang sebagaimana tercantum di dalam RPJMN 2010-2014. Demikian pula dengan kawasan Amerika Latin, kemitraan perlu dibangun lebih kuat baik secara bilateral maupun antar kawasan.

1. KAWASAN PASIFIK

Pergeseran dalam kebijakan negara-negara di kawasan Pasifik yang mengarah pada “*look north policy*” perlu dimanfaatkan dan disikapi dengan melakukan kajian terhadap potensi dan peran yang dapat dilakukan Indonesia di kawasan tersebut.

Regionalisme yang berkembang pesat di kawasan Asia-Pasifik merupakan kecenderungan yang dapat mengarah ke integrasi ekonomi di kawasan tersebut. Oleh karena itu, negara-negara berkembang di kawasan Pasifik melihat integrasi ASEAN sebagai peluang untuk memperluas kerjasama dalam membantu membangun negara-negara di kawasan tersebut, terutama pasca penandatanganan ASEAN Charter serta pembentukan ASEAN Community pada tahun 2015.

Peningkatan kerjasama Indonesia dengan negara-negara di lingkungan Pasifik, terutama dalam *Pacific Islands Forum* (PIF), sangat penting artinya bagi penegasan identitas kebhinekaan bangsa Indonesia dan untuk memagari potensi disintegrasi bangsa. Stabilitas politik dan keamanan di kawasan Pasifik juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap integritas RI dan menunjang suksesnya pembangunan ekonomi kawasan timur Indonesia.

Untuk mendukung upaya peningkatan hubungan dan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik Barat Daya melalui *Southwest Pacific Dialogue* (SwPD), Indonesia perlu lebih proaktif dengan mengimplemetasikan dialog tersebut melalui program yang nyata.

Kendati banyak kendala yang dihadapi dalam menjalin hubungan dengan negara-negara di kawasan Kepulauan Pasifik, terutama akses transportasi ke kawasan tersebut, negara-negara di Pasifik adalah wilayah yang mempunyai cukup potensi dan merupakan peluang bagi perluasan pasar dan investasi di bidang pariwisata, pertanian, perikanan, manufaktur, jasa umum, transportasi, konstruksi. Proyek LNG dan pertambangan di Papua New Guinea merupakan salah satu contoh terbukanya peluang dalam pengembangan kerjasama di bidang sumber daya alam dan energi.

Hubungan bilateral Indonesia dengan beberapa negara di kawasan Pasifik perlu diperkuat melalui tindak lanjut dari kerjasama yang telah dilakukan seperti program *Rice Cultivation* dan *Promotion of Smallholder Rice Production Development* dan pengembangan industri kecil (rotan dan bambu).

Potensi lain yang dapat dikembangkan adalah dalam bidang maritim/perikanan. Keinginan Indonesia untuk menjadi anggota organisasi ikan tuna Pasifik Barat dan Tengah (*Western and Central Pacific Fisheries Commission/WCPFC*) merupakan upaya untuk memperluas wilayah tangkapan tuna nelayan Indonesia hingga ke wilayah Pasifik. Dengan menjadi anggota pada salah satu organisasi ikan tuna regional, Indonesia dapat memperoleh peluang untuk mendapatkan kuota

penangkapan dan menghindarkan Indonesia dari kemungkinan embargo produk tuna dan tuduhan kapal Indonesia melakukan praktek *illegal, unreported and unregulated fishing (IUU fishing)*.

Kondisi geografis negara-negara kawasan Pasifik yang mempunyai kesamaan dengan Indonesia membuka peluang bagi pengembangan KSS Indonesia yang lebih luas. Untuk itu, diperlukan kajian dan pemetaan yang komprehensif mengenai potensi, kondisi geografis dan tuntutan serta kebutuhan negara-negara di kawasan Pasifik untuk diselaraskan dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh Indonesia.

2. KAWASAN ASIA SELATAN DAN TENGAH

Konsideri geografis, latar belakang budaya dan permasalahan-permasalahan seperti bencana alam (banjir, topan, dan tsunami), kekeringan, dan kesehatan termasuk ketersediaan air bersih yang juga dihadapi Indonesia dapat menjadi pintu masuk untuk berbagi pengalaman ("*sharing common problems*") dalam menangani berbagai isu pembangunan.

Secara umum, hubungan dan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negara-negara Asia Selatan dan Tengah (Aselteng) berkembang baik dan cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya intensitas saling kunjung pejabat pemerintah serta kerjasama di berbagai bidang.

Selain itu, Indonesia dan negara-negara di kawasan ini memiliki banyak kesamaan pandang terhadap berbagai isu internasional, baik dalam pembahasan di forum bilateral maupun di multilateral seperti Gerakan Non Blok (GNB), Organisasi Konferensi Islam (OKI), *Development-8 (D-8)* dan PBB.

Upaya peningkatan hubungan ekonomi dengan negara di kawasan Aselteng dilakukan melalui berbagai langkah seperti pelaksanaan Sidang Komisi Bersama (SKB) dan *Trade Negotiating Committee* dengan negara-negara mitra. Pentingnya kawasan ini juga tercermin dari keputusan Pemerintah RI membuka Perwakilan RI di Azerbaijan dan Kazakhstan.

Namun harus diakui, diversifikasi pasar ke negara Asia Selatan dan tengah kurang mendapatkan perhatian dari para pengusaha Indonesia. Kesulitan untuk mengoptimalkan kerjasama ekonomi di kawasan tersebut, misalnya, tercermin dari rendahnya daya saing produk perdagangan Indonesia. Kurangnya promosi dan pertukaran informasi menyebabkan potensi Indonesia di kawasan tersebut kurang teridentifikasi dengan baik.

Potensi di kawasan tersebut sebenarnya cukup memberi peluang bagi perluasan produk Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 2010 (Januari-Oktober) total nilai perdagangan tercatat sekitar US\$13,68 milyar, meningkat sekitar 29,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US\$10,56 milyar.

Kawasan ini memang belum secara optimal dikembangkan dalam kerangka KSS Indonesia, walaupun partisipasi negara-negara di kawasan tersebut dalam program KTNB telah berlangsung cukup lama. Oleh karena itu, ke depan kawasan ini dapat lebih dikembangkan dengan meningkatkan program KTNB di bidang pertanian, kependudukan dan keluarga berencana, dan kesehatan.

Oleh karena itu, Indonesia perlu menyusun suatu strategi yang dapat meningkatkan posisi dan peran Indonesia di kawasan tersebut sehingga berbagai kapasitas, produk, dan jasa yang dimiliki Indonesia dapat lebih dikenal. Promosi perlu ditingkatkan dengan semua pemangku kepentingan, termasuk swasta dan perguruan tinggi.

Sebaliknya, Indonesia dapat pula belajar dan berbagi pengalaman dengan negara Asia Selatan seperti India dalam teknologi penginderaan jarak jauh dan satelit serta program lain yang mempunyai kesamaan permasalahan.

3. KAWASAN AFRIKA

Kawasan Afrika mempunyai ikatan sejarah dan emosional yang kuat dengan Indonesia terkait dengan diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. Ikatan sentimen ini merupakan kunci untuk masuk ke dalam hubungan yang lebih erat antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Afrika.

Perspektif baru dalam hubungan dengan kawasan Afrika melalui “*New Asia Africa Strategic Partnership-NAASP*” menetapkan 8 fokus kerjasama yang mencakup, *Counter-Terrorism, Combating Transnational Crime, Food Security, Energy Security, Small and Medium Enterprises, Tourism, Asian-African Development University Network*, serta *Gender Equality and Women Empowerment*.

Melalui NAASP, Indonesia bersama Senegal, Vietnam, Libya menjadi *Supporting Countries* untuk bidang kerja sama *Food Security* dengan *Champion Countries* India dan Uganda.

Namun harus diakui bahwa terdapat permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kerjasama di kawasan tersebut, yaitu potensi ekonomi dan investasi Indonesia masih belum banyak dikenal luas oleh para pengusaha Afrika. Kedua, pengetahuan para pengusaha mengenai mekanisme teknis di kawasan tersebut. Hal ini disebabkan karena rendahnya “*people to people interactions*”, tidak lengkapnya informasi dari kementerian terkait dan tidak didorongnya lebih kuat promosi mengenai potensi Indonesia di negara-negara Afrika.

Selain itu, faktor keamanan karena konflik dan kesulitan dalam melakukan transaksi keuangan menjadi penyebab tidak optimalnya KSS di bidang ekonomi di kawasan Afrika.

Kawasan Afrika menjadi arena baru bagi beberapa negara berkembang untuk dapat memainkan peranannya dalam membantu membangun kawasan tersebut. Demikian pula dengan mitra kerjasama internasional yang memberikan prioritas kepada negara-negara di kawasan tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk memainkan perannya di kawasan tersebut.

Adanya perspektif baru dalam hubungan dengan kawasan Afrika, “*New Asia Africa Strategic Partnership-NAASP*” dapat menjadi landasan bagi Indonesia untuk melakukan reformulasi KSS Indonesia dengan menerjemahkan kemitraan tersebut ke dalam bentuk yang lebih *implementable* dan terarah serta mempunyai dampak bagi kepentingan Indonesia.

Memperhatikan perkembangan di kawasan Afrika, selain pertimbangan politis, isu-isu sentral yang dihadapi negara-negara Afrika seperti kerawanan pangan, kesehatan termasuk penyediaan air bersih, kemiskinan dan pendidikan dapat menjadi pertimbangan dalam formulasi KSS Indonesia ke

depan di kawasan tersebut, mengingat pengalaman Indonesia dalam menangani berbagai permasalahan pembangunan.

Untuk itu, Indonesia perlu membangun suatu inisiatif baru melalui “*Indo-Afro Development Initiatives and Partnership (IADIP)*” dengan melihat perspektif tantangan dan permasalahan yang dihadapi negara-negara di Afrika dan pengalaman dan pengetahuan yang dapat diberikan Indonesia.

Inisiatif ini dapat diawali dengan suatu *pilot project* yang mengambil bentuk program penguatan terhadap kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia, seperti di Tanzania melalui program penguatan kelembagaan *Agricultural Training Centre di FATRC* di Desa Mkindo-Morogoro dan *Kalimanjaro Agricultural Training Centre*. Penguatan dan pengembangan kerjasama ini diharapkan dapat mengarah pada penguatan kelembagaan pelatihan pertanian di Afrika dan juga sebagai pusat pelatihan regional pertanian yang dapat diikuti oleh negara-negara anggota East African Community dan negara Afrika lainnya.

4. KAWASAN AMERIKA SELATAN

Pertumbuhan yang sangat signifikan dialami negara-negara di kawasan Amerika Latin dengan semakin banyak negara-negara Amerika Latin yang mencapai kategori “*upper middle income countries*”.

Munculnya skema kerjasama yang melibatkan negara di beberapa kawasan ke dalam suatu kelompok kerjasama seperti India, Brazil dan South Africa (*IBSA*) menunjukkan semakin kuatnya peran dan partisipasi negara-negara di kawasan Amerika Latin dalam Kerjasama Selatan-Selatan.

Forum for East Asia–Latin America Cooperation (FEALAC) merupakan wujud bagaimana pentingnya kawasan tersebut dalam tatanan hubungan internasional khususnya Kerjasama Selatan-Selatan.

Peran aktif negara-negara di kawasan Amerika Latin dalam KSS perlu menjadi perhatian Indonesia dan Indonesia dapat berbagi pengalaman dengan negara-negara Amerika Latin dalam pelaksanaan KSS.

Kendati adanya kendala geografis, kawasan tersebut memiliki potensi yang masih banyak untuk digali dan dijajaki. Indonesia perlu mengambil inisiatif untuk lebih aktif mendorong kerjasama antar kawasan bersama dengan negara-negara ASEAN lain untuk mengupayakan iklim perdagangan dan investasi yang lebih maju dengan negara Amerika Latin.

Disisi lain, Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara di Amerika Latin seperti Brazil dalam pengembangan teknologi kedirgantaraan dan memanfaatkan kesepakatan bilateral seperti kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan dan sosilal budaya.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan KSS Indonesia adalah tidak adanya visi kedepan (“*way forward*”) mengenai berbagai program-program yang telah dilaksanakan. Perencanaan KSS selama ini lebih bersifat *ad hoc* yang belum mengaitkan dengan pembangunan nasional dan dampak dari suatu program terhadap kepentingan lembaga pelaksana program maupun kepentingan nasional yang lebih luas. Monitoring dan evaluasi yang selama ini dilaksanakan hanya bersifat umum mengenai bagaimana program terlaksana.

Demikian pula manfaat dan dampak dari pelaksanaan program KSS tidak terurai sehingga tidak dapat memberikan gambaran mengenai manfaat dan dampaknya bagi kepentingan nasional.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan komprehensif mengenai hasil dan dampak dari program KSS Indonesia, diperlukan suatu desain monitoring dan evaluasi yang dapat mengungkapkan berbagai kendala, permasalahan, manfaat dan dampak dari program KSS Indonesia terhadap kepentingan nasional. Selain itu, hasil dari monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan strategi dan program KSS Indonesia ke depan.

Monitoring dan Evaluasi KSS Indonesia harus sejak awal merupakan bagian dari perencanaan program KSS. Untuk itu monitoring dan evaluasi KSS Indonesia harus mencakup:

1. Kemanfaatan kerjasama bagi kepentingan nasional dan kementerian/lembaga yang melaksanakan kerjasama;
2. Kemanfaatan kerjasama bagi negara berkembang;
3. Tindak lanjut dari hasil kerjasama dan rancangan yang lebih luas;
4. Keterkaitan dengan program pembangunan;
5. Bagaimana “*sustainability*” dari program tersebut;
6. Daya terima (*adaptability*) dari program di negara peserta;
7. Evaluasi teknis atas penyelenggaraan;
8. Bagaimana menjaga kesinambungan kerjasama;
9. Pembelajaran yang diperoleh dari program tersebut.

Format evaluasi dan monitoring perlu dirancang secara komprehensif untuk dapat memenuhi kepentingan pelaksana program dan kepentingan nasional. Selain itu format evaluasi dan monitoring harus dikembangkan dengan kemudahan untuk dapat diakses oleh para penyelenggara program Kerjasama Selatan-Selatan.

Evaluasi dan monitoring harus dilakukan secara berkala pada setiap akhir program dan pada akhir tahun diadakan evaluasi secara nasional. Evaluasi secara nasional dapat diadakan melalui sebuah pertemuan nasional KSS Indonesia.

BAB XI

PENUTUP

Bagi negara-negara berkembang, Kerjasama Selatan-Selatan merupakan aspek penting dalam kerangka kerjasama pembangunan internasional (*International Development Cooperation Architecture*) dan sangat berbeda dari model yang ada dalam kerangka kerja sama pembangunan Utara-Selatan. KSS bukan sebagai pengganti kerjasama tradisional yang selama ini ada, melainkan sebagai komplemen dari kerjasama antara Utara-Selatan.

Krisis keuangan beberapa tahun telah mengguncang fondasi ekonomi negara-negara maju dan pada waktu yang sama mengancam pertumbuhan dan perkembangan negara-negara di Selatan. Kendati menghadapi guncangan akibat dari krisis keuangan tersebut, banyak negara berkembang justru mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya seperti China, India, Brasil dan Indonesia yang tumbuh dengan rata-rata di atas 7% per tahun.

Perkembangan KSS yang semakin dinamis dan mencakup berbagai aspek yang cukup luas telah mendorong banyak negara Selatan untuk melakukan reformulasi dan revitalisasi baik kelembagaan maupun program kerjasamanya.

Peran Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan negara Selatan dalam berbagai forum internasional mendapat apresiasi dari negara berkembang. Demikian pula masuknya Indonesia sebagai anggota G-20 dapat memberikan kontribusi yang penting dengan menyuarakan pandangan negara-negara berkembang terhadap berbagai perkembangan dunia yang dapat mempengaruhi stabilitas dan pembangunan di negara berkembang. Sementara di dalam negeri KSS telah menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional dengan masuknya KSS dalam RPJMN 2010-2014.

Masuknya KSS dalam RPJMN 2010-2014 membuka peluang bagi Indonesia untuk meninjau kembali peran dan kemampuan yang dimiliki Indonesia. Melalui RJP MN 2010-2014 ini pula diharapkan adanya reformulasi dan revitalisasi kSS Indonesia baik kelembagaan, keuangan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi melalui suatu Grand Design.

Grand Design KSS Indonesia ini akan menjadi acuan bagi penyusunan peta perjalanan KSS Indonesia selama periode 2011-2025 secara lebih komprehensif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi. Melalui Grand Design ini diharapkan peningkatan peran Indonesia di arena internasional dan menjadikan Indonesia sebagai rujukan bagi pertukaran pengalaman dalam kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan.

Lampiran - 2

**CETAK BIRU
KERJASAMA SELATAN-SELATAN INDONESIA**

DRAF

CETAK BIRU
KERJASAMA SELATAN SELATAN
INDONESIA
2011-2014

DRAF KE-4

31/03/11

DAFTAR ISI
CETAK BIRU
KERJASAMA SELATAN-SELATAN INDONESIA
2011 - 2014

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. LATAR BELAKANG.....	1
2. TUJUAN.....	1
3. RUANG LINGKUP.....	2
4. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	2
BAB II PENGUATAN KERANGKA HUKUM.....	3
1. LANDASAN HUKUM	3
2. PROSEDUR DAN MEKANISME.....	4
BAB III PENGUATAN KOORDINASI KELEMBAGAAN.....	5
1. LEMBAGA KOORDINASI	5
2. LEMBAGA PELAKSANA	6
BAB IV PEMBIAYAAN KERJASAMA	9
1. PEMERINTAH.....	9
2. MITRA KERJASAMA INTERNASIONAL.....	10
3. KERJASAMA TRIANGULAR.....	10
4. SWASTA DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN	11
BAB V PROGRAM KERJASAMA.....	11
1. PROGRAM DAN PRODUK PILIHAN.....	12
2. PROGRAM KERJASAMA EKONOMI	13
3. PROGRAM KERJASAMA TEKNIK	14
4. PROGRAM KERJASAMA SOSIAL BUDAYA.....	16
5. PROGRAM KERJASAMA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.....	17
BAB VI PROMOSI DAN PUBLIKASI.....	18
BAB VII MONITORING DAN EVALUASI.....	19
BAB VIII PENUTUP.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

“*Grand Design*” atau Rancangan Besar Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia merupakan terobosan dalam perencanaan dan pelaksanaan KSS Indonesia. Reformulasi dan revitalisasi berbagai elemen seperti, kelembagaan, ketentuan perundangan, prosedur dan mekanisme serta fokus dan sasaran KSS Indonesia, menunjukkan komitmen yang kuat Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan KSS sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Rancangan Besar yang bersifat menyeluruh tersebut dapat memberikan gambaran mengenai Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia ke depan kepada semua pihak yang berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan KSS. Melalui Rancangan Besar ini kebijakan KSS Indonesia dapat lebih terarah dan terfokus dengan memanfaatkan secara optimal semua potensi dan sumber daya yang dimiliki Indonesia, mendukung kebijakan luar negeri Indonesia dan meningkatkan kemandirian negara-negara berkembang.

Untuk menjabarkan secara rinci Rancangan Besar KSS Indonesia diperlukan suatu Cetak Biru yang secara sistematis mengurai langkah tindak yang diperlukan Cetak Biru/Rencana Aksi merupakan dokumen yang hidup yang setiap saat dapat dirubah sesuai dengan perkembangan yang muncul dalam pelaksanaan KSS.

2. TUJUAN

Tujuan dari “*Cetak Biru/Rencana Aksi Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia 2011-2014*” adalah untuk memperkuat “*Grand Design Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia*” dalam rangka merealisasikan amanat RPJM 2010-2014 mengenai KSS Indonesia, memperkuat pembangunan nasional dan mendukung kebijakan luar negeri Indonesia serta untuk lebih meningkatkan, mengembangkan dan memperluas Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia.

“*Cetak Biru Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia 2011-2014*” bertujuan pula untuk mendorong dan mempromosikan berbagai kegiatan *Kerjasama Selatan-Selatan* baik yang melibatkan kementerian/lembaga pemerintah maupun swasta, organisasi masyarakat sipil dan universitas.

Melalui “*Cetak Biru/Rencana Aksi Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia 2011-2014*” diharapkan tata kelola KSS Indonesia yang meliputi perencanaan, koordinasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat lebih terarah sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang dan membantu mendorong kemandirian kolektif negara-negara berkembang.

3. RUANG LINGKUP

“*Cetak Biru Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia 2011-2014*” mencakup pengelompokan dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Penguatan kerangka hukum
2. Penguatan koordinasi kelembagaan yang dapat dibagi dalam :
 - a. Penguatan kelembagaan yang mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan dan monitoring & evaluasi KSS
 - b. Penguatan kementerian/lembaga pelaksana (*implementing agencies*) KSS.
3. Sumber Pembiayaan
4. Program Kerjasama Selatan-Selatan
5. Promosi dan Publikasi
6. Monitoring dan Evaluasi

4. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Melalui “*Cetak Biru Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia 2011-2014*”, diharapkan tersusunnya langkah tindak yang lebih terarah, komprehensif, dan terpadu.
2. “*Cetak Biru Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia 2011-2014*” merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan KSS Indonesia, kementerian/lembaga, kalangan swasta dan organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan serta mitra kerjasama internasional untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kapasitas Indonesia.
3. Melalui “*Cetak Biru/Rencana Aksi Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia 2011-2014*” diharapkan selain peningkatan potensi keunggulan Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan untuk bertukar pengalaman dan belajar mengenai keberhasilan pembangunan.

Adapun manfaat strategis “*Cetak Biru Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia 2011-2014*” adalah antara lain:

1. Explorasi peluang dan penciptaan kegiatan KSS Indonesia (kerjasama ekonomi, kerjasama teknik, sosial budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi), terkait dengan berbagai isu global khususnya terutama dengan masalah kemiskinan, bencana, krisis ekonomi dan keuangan, dan penyakit pandemik.
2. Penciptaan dan peningkatan kegiatan KSS berbasis pada penguatan dan pengembangan kapasitas KSS Indonesia.
3. Penajaman rumusan kebijakan nasional dalam KSS Indonesia untuk mendukung posisi Indonesia di berbagai forum internasional.

4. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan KSS di antara pemangku kepentingan dan dengan *national focal point* negara berkembang lain serta mitra kerjasama pembangunan internasional.
5. Pemahaman baru mengenai strategi dalam pelaksanaan KSS dan penerapan praktis yang diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan dalam pengelolaan KSS.

II. PENGUATAN KERANGKA HUKUM

1. LANDASAAAN HUKUM

Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia, walaupun tidak secara eksplisit tercantum di dalam Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang RI No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, menyebutkan mengenai salah satu misi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia yang dapat berperan penting dalam pergaulan dunia internasional dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional.

Lebih lanjut dalam RPJM Nasional 2010-2014, seperti tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010, menyebutkan mengenai peran serta Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan. Namun, selama ini istilah yang terkait dengan Kerjasama Selatan-Selatan tidak pernah tercantum di dalam berbagai ketentuan atau peraturan pemerintah. Kerjasama Selatan-Selatan lebih diartikan sebagai implementasi dari suatu program dan strategi dibandingkan sebagai suatu kebijakan yang dapat mendorong penguatan hubungan dan politik luar negeri dan peningkatan kemampuan nasional bangsa.

Memperhatikan perkembangan dan dinamika yang terjadi di dalam dan luar negeri yang mempengaruhi koordinasi dan pelaksanaan program Kerjasama Selatan-Selatan, maka suatu payung hukum secara nasional yang mengatur Kerjasama Selatan-Selatan sangat diperlukan sebagai landasan bagi setiap kegiatan dan program Kerjasama Selatan-Selatan.

Untuk memberi landasan yang lebih kuat bagi pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia sebagai suatu kebijakan, maka kerangka hukum yang akan dibentuk dapat memanyungi aspek-aspek dalam KSS yaitu:

- 1) Aspek kelembagaan yang dapat mengkoordinir, memfasilitasi dan mengsinergikan berbagai program dan kegiatan KSS agar lebih terarah dan terpadu dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri;
- 2) Kebijakan yang terkait dengan peranan dan arah KSS Indonesia sebagai pelengkap kebijakan politik luar negeri dan perdagangan internasional;

- 3) Aspek pembiayaan KSS yang bersumber dari APBN dan sumber lain baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri;
- 4) Aspek prosedural yang terkait dengan ketentuan pemberian bantuan baik berupa hibah maupun pinjaman termasuk antara lain ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa; pemberian fasilitas termasuk fasilitas perbankan; serta aspek teknis lainnya terkait dengan pelaksanaan KSS seperti pemberian izin dan visa.

Langkah Tindak

1. Melakukan kajian yang mendalam mengenai ketentuan perundangan dan peraturan yang terkait dengan KSS. Kajian diperlukan mengingat telah terjadi perubahan yang cukup mendasar pada instansi yang mempunyai fungsi koordinasi dan instansi dan lembaga pelaksana KSS;
2. Merancang Peraturan Presiden yang dapat menampung aspek kebijakan, kelembagaan, sumber pembiayaan, mekanisme dan prosedur KSS Indonesia;
3. Penyusunan rancangan peraturan dan ketentuan mengenai KSS. Peraturan dan ketentuan dalam KSS diharapkan dapat menampung kepentingan semua pihak baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah dan lembaga keuangan;
4. Penyiapan bagi tersusunnya lembaga KSS Indonesia;
5. Tersusunnya prosedur dan Mekanisme KSS Indonesia;
6. Sosialisasi Peraturan Pemerintah, prosedur dan mekanisme KSS Indonesia;

2. PROSEDUR DAN MEKANISME

Salah satu isu yang banyak dihadapi negara berkembang dalam menyelenggarakan KSS adalah mekanisme koordinasi antar berbagai lembaga penyelenggara KSS. Berbagai studi mengenai KSS menekankan perlunya negara-negara berkembang mengembangkan mekanisme yang juga melibatkan para pelaku KSS dari kalangan swasta, LSM, dan perguruan tinggi. Manajemen dan pengelolaan KSS yang efektif diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dapat memenuhi sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Langkah Tindak

- 2.1. Melakukan kaji ulang mengenai prosedur dan mekanisme dalam proses perencanaan, pengusulan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi KSS.
- 2.2. Menyusun mekanisme, prosedur dan tata kerja pelaksanaan KSS dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi.
- 2.3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan mekanisme, prosedur dan tata kerja KSS.
- 2.4. Menyusun standar perjanjian antar negara, kontrak, dan pengaturan administrasi lain yang terkait bantuan hibah dan pinjaman serta program dan proyek Kerjasama Selatan-Selatan.

III. PENGUATAN KOORDINASI KELEMBAGAAN

1. LEMBAGA KOORDINASI

Didalam RPJMN 2010-2014, secara jelas menyebutkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan KSS adalah belum adanya kerangka nasional yang komprehensif untuk menjamin sinergi antara berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan KSS. Ketidadaan kerangka yang jelas juga dikarenakan Indonesia juga belum mempunyai entitas yang kuat sebagai “*national focal point*” yang mampu melaksanakan koordinasi secara terpadu antar berbagai kepentingan dalam Kerjasama Selatan-Selatan sebagaimana yang dimiliki Thailand, Malaysia, Turki, dan Chili.

Namun demikian, proses pembentukan suatu entitas kelembagaan KSS Indonesia yang ideal sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2010-2014 memerlukan waktu dan penyelarasan di antara para pemangku utama KSS yaitu Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Agar tujuan utama dari RPJMN 2010-2014 mengenai KSS dapat tercapai dan proses kegiatan KSS Indonesia tetap dapat berjalan sampai terbentuknya entitas nasional KSS, maka diperlukan penguatan koordinasi antar pemangku utama KSS Indonesia yang secara berevolusi mengarah kepada suatu proses transisi menuju ke arah pembentukan suatu entitas kelembagaan “*National focal point KSS Indonesia*”.

Penguatan koordinasi antar para pemangku utama KSS Indonesia dilakukan dengan memperhatikan peran masing-masing pemangku utama dan kesinambungan dari program KSS yang sedang berjalan dan menghindari terjadinya duplikasi program.

Suatu mekanisme yang dapat memanyungi peran ke empat pemangku utama KSS Indonesia tersebut diperlukan agar penguatan koordinasi kelembagaan dapat berjalan secara efektif. Mekanisme yang ini di maksud dapat mengambil bentuk suatu *forum* yang bersifat *ad hoc*.

Dengan pertimbangan bahwa mekanisme penguatan koordinasi kelembagaan tersebut merupakan suatu proses transisi yang berevolusi menuju ke arah pembentukan suatu entitas nasional KSS Indonesia, maka Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan yang dibentuk Bappenas dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas dapat difungsikan sebagai *Forum ad hoc*.

Forum ad hoc Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan dapat menjembatani proses yang selama ini ter-fragmentasi di antara pemangku utama KSS Indonesia dan dapat menjadi model embrio ke depan bagi “*National focal point KSS Indonesia*”.

Langkah Tindak

1.1. Memperkuat peran *Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan* sebagai *Forum ad hoc* melalui :

- a) Optimalisasi koordinasi antar para pemangku utama KSS Indonesia;
- b) Inventarisasi program-program yang ada pada kementerian dan lembaga;

- c) Penyusunan kebijakan, rencana dan program KSS Indonesia;
- d) Identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan KSS;
- e) Inventarisasi berbagai peraturan perundangan dan mekanisme/prosedur dalam pelaksanaan KSS Indonesia;
- f) Pertemuan koordinasi bersama dengan kementerian dan lembaga terkait dalam pelaksanaan KSS Indonesia;
- g) Bersama dengan kementerian/lembaga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KSS Indonesia.

1.2. *Forum ad hoc* dapat menginsiasi penyusun kerangka kelembagaan yang ideal yang dapat mengkoordinasikan dan mengakomodasi berbagai kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia. Penyusunan rancangan kerangka kelembagaan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2011.

1.3. Menyelenggarakan seminar dan workshop dalam rangka penguatan pembentukan kelembagaan KSS Indonesia.

2. LEMBAGA PELAKSANA

Lembaga pelaksana yang telah cukup lama menyelenggarakan KSS Indonesia memerlukan penyegaran, pengembangan dan penguatan untuk menghadapi berbagai perkembangan baru dan isu serta kecenderungan KSS yang semakin kompleks dan luas. Lembaga pelaksana merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan KSS Indonesia. Oleh karena itu pada Periode 2010-2014 merupakan momentum yang tepat bagi penyegaran, penguatan dan pengembangan lembaga pelaksana KSS Indonesia.

2.1. Sumber daya Manusia

Keberhasilan pelaksanaan program KSS Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan para instruktur dan tenaga ahli Indonesia. Peningkatan pengetahuan para instruktur dan tenaga ahli mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan kredibilitas lembaga pelaksana maupun individu instruktur dan tenaga ahli pendidikan.

Langkah Tindak

- 2.1. Melakukan indentifikasi program peningkatan kemampuan bagi instruktur baik *refresher course* atau program *Training for Trainer (TOT)*.
- 2.2. Melakukan indentifikasi program *master/doctorate degree* di dalam maupun luar negeri.
- 2.3. Menyelenggarakan workshop/seminar nasional bagi para instruktur dan tenaga ahli untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan.

2.2. Fasilitas

Mengingat banyaknya fasilitas yang dimiliki kementerian/lembaga yang dapat didaya-gunakan dan difungsikan untuk tujuan kerjasama KSS serta mempertimbangkan sebagian fasilitas-fasilitas tersebut merupakan warisan bantuan dari donor, maka diperlukan berbagai langkah untuk mengoptimalisasi peran dan fungsi serta meningkatkan fasilitas-fasilitas tersebut yang mengarah pada “*internationally recognized center of excellence*” .

Langkah Tindak

- 2.2.1. Identifikasi berbagai fasilitas pelatihan, penelitian dan pengembangan yang ada dan dapat didayagunakan untuk dikerjasamakan dalam rangka KSS.
- 2.2.2. Peningkatan failtas tersebut menuju ke arah “*internationally recognized center of excellence*”.
- 2.2.3. Hasil identifikasi disusun dalam bentuk “*compendium*” yang dapat di akses oleh negara berkembang lain dan mitra kerjasama internasional.
- 2.2.4. Melakukan penelitian mengenai kelayakan fasilitas-fasilitas tersebut dengan mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan peserta serta perkembangan dan kemajuan teknologi.
- 2.2.5. Menjalin kerjasama dan memperkuat jaringan dengan lembaga pelatihan di luar negeri.
- 2.2.6. “*Compendium Indonesia Center of Excellence*” diharapkan telah tersusun dalam tahun 2011.

2.3. Kurikulum dan Metodologi

Penyusunan materi dan kurikulum diperlukan dengan mengembangkan konsep pelatihan yang integratif yang meliputi: 1) kajian kebutuhan pelatihan; 2) rumusan tujuan pelatihan; 3) merancang program pelatihan; 4) evaluasi program pelatihan. Materi dan kurikulum perlu mempertimbangkan perkembangan paradigma dari *training oriented* ke *learning oriented* yang menekankan pada pembelajaran aktif.

Selain kurikulum dan materi yang bersifat teknis, proqram pelatihan juga perlu memuat materi mengenai perkembangan pembangunan dan pengenalan budaya Indonesia termasuk penggunaan bahasa Indoensia sebagai upaya untuk melekatkan hubungan historis antara peserta negara berkembang dengan Indonesia.

Langkah Tindak

- 2.3.1 Menyusun pedoman dan format kurikulum dan modul pelatihan yang jelas sebagai acuan dalam memfasilitasi proses pelatihan.
- 2.3.2 Melakukan kajian ulang mengenai kurikulum dan materi pelatihan yang ada dan mengembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

- 2.3.3 Mengembangkan database program pelatihan yang dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan program pelatihan di masa depan.
- 2.3.4 Menyelenggarakan seminar/workshop nasional untuk saling tukar pengalaman dan penguatan penyusunan program pelatihan.
- 2.3.5 Penyusunan pedoman, format kurikulum dan modul diharapkan dapat dilakukan dalam tahun 2011.

2.4. Sistem informasi dan Database Kerjasama Selatan-Selatan

Data dan informasi mengenai lembaga pelaksana, program yang dilaksanakan dan peserta dari negara berkembang lain yang tersebar di berbagai Kementerian dan lembaga, belum tertata dengan baik dalam sebuah database Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia.

Pengumpulan data dan informasi perlu dilakukan untuk mendapatkan seluruh informasi dari pelaksanaan Kerjasama Selatan-selatan baik yang pernah dilaksanakan maupun sedang dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kegiatan yang menjadi unggulan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pihak swasta, OMS/LSM maupun perguruan tinggi.

Selain itu ikatan dengan para alumni program Kerjasama Teknik Selatan-Selatan Indonesia belum terjalin melalui jejaring alumni KSS Indonesia. Jejaring alumni dapat dijadikan rujukan bagi peningkatan hubungan antara alumni dengan pelakasana program, dan yang lebih jauh meningkatkan “*people to people contacts*”. Peranan Perwakilan Indonesia di negara-negara berkembang peserta KTNB sangat penting dan dapat dioptimalkan untuk menjalin jaringan dengan para Alumni.

Langkah Tindak

- 2.5.1. Memetakan program dan kegiatan KSS yang selama ini telah berjalan dengan baik dan dapat diperkuat di masa yang akan datang.
- 2.5.2. Membangun sistem informasi KSS dan database yang komprehensif mengenai program dan kegiatan KSS Indonesia.
- 2.5.3. Membangun database mengenai lembaga pelaksana dan program KSS yang terpadu mencakup lintas kementerian/lemaga dan para pihak di luar pemerintahan seperti swasta, LSM dan perguruan tinggi. Pemutahiran dan perawatan database dilakukan secara terus menerus.
- 2.5.4. Membangun database yang dapat mengintegrasikan data mengenai tenaga ahli Indonesia yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga. Database dirancang dengan memberi kemudahan bagi mereka yang akan mendaftarkan diri sebagai tenaga ahli Indonesia.
- 2.5.5. Melakukan pemetaan dan kajian mengenai kebutuhan tenaga ahli Indonesia di luar negeri. Keberadaan satu unit yang menangani tenaga ahli Indonesia sangat diperlukan.
- 2.5.6. Melakukan posting tenaga ahli Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh negara berkembang dan badan/lembaga international.

- 2.5.7. Membangun jejaring antar tenaga ahli Indonesia dan dengan tenaga ahli dari negara berkembang lainnya.
- 2.5.8. Membangun database peserta KSS dan penerima beasiswa yang dirancang dengan memberi kemudahan bagi penerima beasiswa berinteraksi dengan para pengajar dan sesama Alumni.
- 2.5.9. Membangun jaringan ikatan Alumni peserta pelatihan dan beasiswa melalui berbagai media termasuk media jaring sosial.
- 2.5.10. Terbentuknya Ikatan Alumni KSS Indonesia pada tahun 2011.

BAB IV

PEMBIAYAAN KERJASAMA

Kerjasama Selatan-Selatan dapat di dukung melalui modalitas pembiayaan yang berasal baik dari anggaran pemerintah maupun yang berasal dari sumber bilateral maupun multilateral. Perkembangan yang semakin luas dalam KSS, telah mendorong peran swasta yang lebih besar dalam pelaksanaan KSS. Demikian pula dengan kesempatan bagi lembaga pembiayaan untuk dapat memainkan peran dalam mendukung pelaksanaan KSS di bidang perdagangan dan investasi.

Optimalisasi berbagai sumber pembiayaan akan dapat secara efektif dan efisien mensinergikan berbagai program KSS Indonesia melalui tata kelola sesuai dengan “*aid effectiveness*”.

1. PEMERINTAH

Kunci utama keberhasilan KSS Indonesia adalah ketersediaan dana pemerintah yang memadai bagi berbagai program dan kegiatan KSS Indonesia. RPJMN 2010-2014 mengamanatkan mengenai strategi dan kebijakan keuangan negara yang ditempuh melalui upaya optimalisasi pengeluaran pemerintah. Demikian pula dengan penggunaan dana pemerintah dalam kerangka KSS. Mengingat belum diaturnya secara rinci ketentuan tentang pembiayaan KSS Indonesia baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman, maka di perlukan suatu prosedur dan mekanisme pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah.

Langkah Tindak

- 1.1. Penentuan alokasi biaya bagi pelaksanaan KSS Indonesia setiap tahun yang dapat dibiayai melalui APBN;
- 1.2. Menyusun mekanisme dan prosedur pengajuan anggaran dan pemanfaatannya dalam rangka pemberian hibah dan pinjaman (*overseas development assistance*) kepada negara lain dalam rangka KSS;

- 1.3. Menyusun peraturan yang dapat mengintegrasikan kebutuhan pembiayaan KSS yang bersumber dari berbagai pihak baik negara donor maupun dari organisasi/lembaga mitra internasional melalui *multi donor fund facility for south-south cooperation*;
- 1.4. Penyusunan tata kelola keuangan KSS melalui panduan mekanisme yang baku yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan KSS;
- 1.5. Penyusunan rancangan anggaran KSS Indonesia disesuaikan dengan jadwal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sehingga pengalokasian pembiayaan KSS dapat lebih optimal;
- 1.6. Menyusun bentuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan pembiayaan yang berasal dari anggaran pemerintah maupun asing dalam rangka KSS.

2. MITRA KERJASAMA INTERNASIONAL

Berbagai sumber pembiayaan melalui mitra kerjasama internasional baik melalui negara donor maupun badan/lembaga multilateral perlu dijajaki dan dikembangkan dalam rangka memperkuat dan memperluas KSS Indonesia. Sumber seperti *Perez Guerero Trust Fund*, *UNDP Trust Fund* dan sumber dari organisasi seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) perlu dijajaki.

Langkah Tindak :

- 2.1. Melakukan penelitian mengenai potensi dari mitra kerjasama internasional yang dapat bekerjasama untuk pembiayaan KSS Indonesia;
- 2.2. Melakukan penjajakan dengan mitra internasional yang dapat secara bersama membiayai program KSS Indonesia;
- 2.3. Menyusun prosedur pembiayaan yang bersumber dari mitra kerjasama.

3. KERJASAMA TRIANGULAR

Sejalan dengan perkembangan dan kecenderungan dalam Kerjasama Selatan-Selatan, skema kerjasama "*Triangular Cooperation*" semakin mendapat perhatian sebagai bentuk lain dari kerjasama dalam KSS. UNDP menyebutkan bahwa kerjasama triangular menjadi semakin populer sebagai cara untuk mendukung pembangunan dengan memanfaatkan berbagai bentuk kerjasama antar negara-negara berkembang dengan bantuan dari negara maju.

Kerjasama triangular merupakan salah satu upaya untuk memobilisasi pembiayaan KSS dengan melibatkan pihak ketiga. Mengingat skema kerjasama triangular akan melibatkan negara donor/lembaga pembangunan internasional dan negara berkembang lain, maka ada beberapa langkah tindak yang kiranya perlu dilakukan oleh Indonesia.

Langkah Tindak

- 3.1. Mengidentifikasi mitra kerjasama, baik negara maju maupun badan/lembaga internasional dan lembaga pembiayaan yang dapat bekerja sama dalam program kerjasama triangular;

- 3.2. Menyusun mekanisme dan prosedur koordinasi kerjasama triangular yang berorientasi pada tata kelola *aid effectiveness*;
- 3.3. Melakukan analisis terhadap manfaat dan dampak dari kerjasama triangular bagi kepentingan lembaga pelaksana, kepentingan nasional dan negara berkembang serta mitra kerjasama internasional;
- 3.4. Menyusun bentuk monitoring dan evaluasi kerjasama triangular yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi pengembangan kerjasama triangular ke depan.

4. SWASTA DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN

Swasta dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan KSS Indonesia dengan memanfaatkan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Selain itu Potensi untuk memanfaatkan perbankan dalam KSS bidang ekonomi sangat lebar. Pemanfaatan Lembaga Pembiayaan akan meningkatkan posisi Indonesia sebagai negara yang dapat memberikan fasilitas kredit sekaligus sebagai negara pemberi bantuan pembangunan luar negeri (*overseas development assistance*).

Langkah Tindak

- 4.1. Melakukan kajian mengenai potensi swasta dan lembaga pembiayaan yang dapat dimanfaatkan dalam KSS;
- 4.2. Melakukan inventarisasi program-program KSS yang dapat dibiayai oleh swasta dan lembaga pembiayaan;
- 4.3. memperkuat kelembagaan dan pembiayaan perdagangan luar negeri yang dapat mendorong efektivitas pengembangan ekspor nonmigas;
- 4.4. Menyusun bentuk monitoring dan evaluasi mengenai pemanfaatan pembiayaan yang bersumber dari swasta dan lembaga pembiayaan.

BAB V

PROGRAM KERJASAMA

Program Kerjasama pada Periode I 2010-2014 mencakup program dan kegiatan yang dapat meliputi Kerjasama Ekonomi, Kerjasama Teknik, Kerjasama Sosial Budaya dan Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Program kerjasama KSS Indonesia ini disusun dengan mempertimbangkan kegiatan KSS yang telah terlaksana selama ini dan program yang dapat menyesuaikan dengan dan mengikuti perkembangan dalam tatanan KSS internasional.

Program pilihan merupakan program prioritas yang diharapkan dapat memberi dampak segera bagi penguatan dan perluasan KSS Indonesia dan dapat memberi dukungan bagi program pembangunan

nasional serta kebijakan politik luar negeri Indonesia. Penguatan dan perluasan kerjasama di bidang ekonomi diharapkan dapat secara sinergis dan paralel dikembangkan dengan program kerjasama teknik, sosial budaya dan ilmu pengetahuan.

1. PROGRAM DAN PRODUK PILIHAN

Program pilihan adalah program kerjasama yang dipilih dengan mempertimbangkan:

- a. program yang telah terbukti berhasil dan mempunyai “*dampak multiplier dan sebagai katalis*” pembangunan nasional;
- b. merupakan program yang mempunyai keunggulan komperatif Indonesia berdasarkan pengalaman Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan mendesak negara Selatan seperti penanggulangan kemiskinan, kesehatan dan keluarga berencana, pendidikan dan ketahanan pangan;
- c. program yang dapat mendorong peningkatan kemampuan dan produktifitas.

Sementara Produk Pilihan merupakan berbagai produk dan komoditi Indonesia yang telah cukup dikenal oleh negara berkembang. Struktur produk dan komoditi pilihan yang selama ini didominasi oleh dari tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronika, karet dan produk karet, minyak kelapa sawit, hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao, dan kopi, masih akan dibangun selama periode 2011-2014.

Namun, struktur produk ekspor non-migas tersebut yang semula didominasi oleh komoditi bernilai tambah rendah, diperkirakan akan banyak bergeser pada komoditi yang bernilai tambah relatif tinggi, yaitu komoditi sektor Industri.

Program dan produk pilihan yang merupakan *Flagship* bagi KSS Indonesia untuk 2011-2014, diharapkan dapat dikembangkan, direplikasikan dan diperluas di negara berkembang lain.

Flagship Program dan Produk KSS Indonesia merupakan identitas Indonesia dalam menjaga kesinambungan program KSS Indonesia.

Program Pilihan

Program Pilihan dalam kerangka KTNB merupakan peningkatan dan perluasan dari program terdahulu yang telah berhasil di laksanakan oleh Indonesia dan mendapat penerimaan dari negara berkembang lain. Program tersebut adalah :

- a. Strengthening Capacity Development of FARTC Tanzania
- b. Training on Behavior Change Communication in Family Planning/Reproductive Health;
- c. Training on Developing a Strategic Partnership with Religious Institutions and Leaders in the Family Planning;
- d. Training of Trainers on Reproductive Health Commodity Security.

Produk Pilihan

Produk Pilihan untuk 2011-2014 merupakan produk indikatif yang meliputi produk atau sektor potensial dan pilihan utama di bidang perdagangan, industri dan investasi yang di perkirakan masih akan menjadi program pilihan utama Indonesia ke depan.

Produk Pilihan		
Perdagangan	Industri	Investasi
Tekstil dan produk tekstil (TPT)	Pupuk	Makanan
Elektronika	Pupuk non Urea	Pertanian
Karet dan produk karet	Semen	Energi
Minyak kelapa sawit	Peralatan listrik rumah tangga	Energi terbarukan
Hasil hutan	Pulp dan kertas	Infrastruktur
Alas kaki	Mesin Lsitrik	Farmasi
Udang	otomotif	Petro kimia
Kakao	Ban	
Kopi.	Barang jadi rotan	
	keramik	

2. PROGRAM KERJASAMA EKONOMI

Program dalam kerangka kerjasama ekonomi meliputi sektor perdagangan dan investasi. Di bidang perdagangan, export Indonesia masih didominasi oleh sepuluh produk ekspor utama (tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronika, karet dan produk karet, minyak kelapa sawit, hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao, dan kopi). Namun, dalam perkembangannya saat ini, export Indonesia sudah mulai bergeser dan mengalami peningkatan pada komoditi yang bernilai tambah relatif tinggi, yaitu komoditi sektor Industri. Sementara di bidang investasi peluang investasi utama di dalam negeri mencakup makanan, pertanian, energi dan infrastruktur. Sebaliknya investasi Indonesia di luar negeri termasuk di antaranya energi dan infrastruktur.

Potensi dan peluang yang dimiliki Indonesia untuk memperluas pengaruh perdagangan dan investasi di negara berkembang cukup luas, walau menghadapi berbagai kendala. Produk atau sektor potensial dan pilihan utama di bidang perdagangan dan investasi diperkirakan masih akan menjadi program pilihan utama Indonesia ke depan.

Langkah Tindak

- 2.1 Peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor melalui kajian mengenai produk atau sektor potensial dan pasar prospektif dan potensial yang dapat dikembangkan di negara Selatan;
- 2.2 Peningkatan kualitas dan keberagaman produk ekspor;
- 2.3 Peningkatan fasilitasi ekspor;
- 2.4 Melakukan kajian mengenai kendala dan hambatan Indonesia dalam melakukan perdagangan dan investasi dengan negara berkembang lain dan langkah serta upaya menanggulangi kendala dan hambatan tersebut;
- 2.5 Membentuk “*Forum Kemitraan Indonesia untuk Kerjasama Ekonomi antar Negara Berkembang*” yang terdiri dari pemangku utama kerjasama ekonomi antar negara berkembang

yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BKPM dan KADIN, yang secara berkala mengadakan koordinasi dan konsultasi;

- 2.6 Melakukan inventarisasi Perjanjian Perdagangan termasuk “*Bilateral Investment Treaties (BIT)*”, yang mungkin sudah cukup lama dan memerlukan pembaharuan;
- 2.7 Menyusun cetak biru perdagangan dan investasi di negara berkembang lain sebagai acuan dalam upaya memperluas pasar bagi produk Indonesia dan meningkatkan potensi industri Indonesia;
- 2.8 Melakukan pemetaan terhadap negara-negara berkembang yang mempunyai potensi besar bagi investasi Indonesia dan negara berkembang yang akan melakukan investasi di Indonesia.

Konsolidasi Nasional

- 2.9 Menyelenggarakan pertemuan tahunan yang melibatkan semua pelaku perdagangan dan investasi dengan mengikut sertakan perwakilan negara berkembang dan organisasi internasional di Indonesia;
- 2.10 Menyelenggarakan seminar/workshop nasional untuk saling tukar pengalaman antara para pelaku kerjasama ekonomi dan penguatan penyusunan program ekonomi antar negara berkembang.

3. PROGRAM KERJASAMA TEKNIK

Program Kerjasama Teknik (KST) merupakan program yang secara teratur telah dilaksanakan setiap tahun melalui berbagai program pelatihan, workshop, seminar, magang, studi banding dan penugasan tenaga ahli.

Program Kerjasama Tehnik perlu diperkuat untuk memenuhi tuntutan perkembangan dalam KSS dan untuk dapat menjawab berbagai isu dan kecenderungan yang semakin dinamis. Penguatan program KST diarahkan pada penguatan program, tenaga ahli dan instruktur, pengembangan sistem informasi serta pembentukan Alumni KSS Indonesia.

Langkah Tindak

Program

- 3.1 Menyusun program KST Nasional ke dalam bentuk “*compendium*” Buku Putih KSS Indonesia, yang secara komprehensif memuat program-program pilihan dalam rangka meningkatkan dan memenuhi tuntutan perkembangan KSS;
- 3.2 Menyusun panduan dan kriteria bagi penyusunan program pilihan KSS Indonesia;
- 3.3 Identifikasi berbagai fasilitas pelatihan, lembaga penelitian dan pengembangan yang dapat dikerjasamakan ke dalam bentuk “*compendium*” *Indonesia Centres of Excellence*;

- 3.4 Melakukan penelitian mengenai kelayakan fasilitas-fasilitas tersebut dengan mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan peserta serta perkembangan dan kemajuan teknologi;
- 3.5 Menjalin kerjasama dan memperkuat jaringan dengan lembaga pelatihan di luar negeri.

Tenaga Ahli dan Instruktur

- 3.6 Melakukan pendataan dan pemetaan tenaga ahli yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga;
- 3.7 Mengidentifikasi kebutuhan tenaga ahli Indonesia di luar negeri, dan melakukan posting tenaga ahli Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh negara berkembang dan badan/lembaga internasional;
- 3.8 Melakukan pendataan instruktur yang ada pada berbagai kementerian dan lembaga.
- 3.9 Membangun jejaring antar tenaga ahli dan instruktur Indonesia dan dengan tenaga ahli dan instruktur dari negara berkembang lain.

Basiswa

- 3.10 Mengidentifikasi universitas baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang dapat menerima peserta dari negara berkembang;
- 3.11 Menyusun prosedur dan mekanisme nasional serta format-format administratif untuk beasiswa Indonesia;
- 3.12 Menyusun program pre-course termasuk di antaranya program bahasa Indonesia dan pengenalan tentang Indonesia;
- 3.13 Membangun jejaring antar alumni penerima beasiswa dengan tenaga pengajar dan universitas;

Bantuan Proyek

- 3.14 Melakukan kajian dan pemetaan terhadap negara berkembang yang dengan berbagai pertimbangan, baik politis maupun ekonomi, dipandang perlu menerima bantuan proyek;
- 3.15 Melakukan kajian dan menyusun persyaratan, kriteria dan jenis bantuan proyek;
- 3.16 Menyusun pengaturan administrasi bagi bantuan proyek termasuk diantaranya format perjanjian antar negara, kerangka acuan (TOR), dokumen penyerahan aset hibah, pengaturan & kontrak pengadaan barang/peralatan dan studi kelayakan.
- 3.17 Menyusun format monitoring dan evaluasi.

Sistem Informasi dan Database

- 3.18 Membangun database program KSS Indonesia secara terpadu mencakup lintas kementerian/lembaga dan para pihak di luar pemerintahan seperti swasta, LSM dan perguruan tinggi;

- 3.19 Membangun database yang dapat mengintegrasikan data tenaga ahli Indonesia yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga. Database dirancang dengan memberi kemudahan bagi mereka yang akan mendaftarkan diri sebagai tenaga ahli Indonesia;
- 3.20 Mengembangkan data base yang dapat mencakup sinergi berbagai bidang KSS, termasuk lesson learned dalam pelaksanaan KSS Indonesia;
- 3.21 Membangun jejaring antar para penerima program KSS Indonesia baik peserta program pelatihan, beasiswa dan peserta program KSS lainnya;
- 3.22 Membangun jejaring antara tenaga ahli Indonesia dan dengan tenaga ahli dari negara berkembang lainnya;

Alumni

- 3.23 Membangun jaringan ikatan Alumni peserta program KSS Indonesia melalui berbagai media termasuk media jejaring sosial;
- 3.24 Membangun jejaring antar alumni penerima beasiswa dengan tenaga pengajar dan universitas;
- 3.25 Kementerian Luar Negeri secara berkala melakukan pendekatan kepada para Alumni, antara lain dengan mengundang para Alumni pada acara-acara nasional di Perwakilan Indonesia.

Konsolidasi Nasional

- 3.26 Menyelenggarakan seminar/workshop internasional untuk saling tukar pengalaman dan penguatan program KSS Indonesia dengan mengundang Alumni KSS Indonesia dari negara berkembang lain;
- 3.27 Menyelenggarakan workshop/seminar untuk melakukan pertukaran pengalaman dan pengetahuan di antara para pelaksana KSS Indonesia termasuk para tenaga ahli Indonesia.
- 3.28 Menyelenggarakan workshop/seminar Alumni KSS Indonesia di Perwakilan RI di negara berkembang lain.

4. PROGRAM KERJASAMA SOSIAL BUDAYA

Program Kerjasama Sosial Budaya merupakan program yang meliputi program di bidang pendidikan dan pariwisata bertujuan untuk dapat lebih mempererat hubungan antar individu dan meningkatkan pengenalan dan pemahaman budaya Indonesia. Potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan dari negara berkembang yang telah menempati posisi “*middle income countries*”. Demikian pula beberapa perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam peringkat 100 besar perguruan tinggi terbaik di Asia versi Webometrics 2010. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang strategis untuk dapat memperkuat posisi perguruan tinggi di antara negara berkembang dan meningkatkan kehadiran wisatawan dari negara berkembang.

Langkah Tindak

Pendidikan

- 4.1.1. Mengidentifikasi universitas-universitas yang dapat menerima peserta dari negara berkembang;
- 4.1.2. Membangun jejaring dengan lembaga pendidikan di negara berkembang atau di negara lain untuk mengembangkan program *double degree*;
- 4.1.3. Melakukan kajian dan sinergi dengan pilar Kerjasama Selatan-Selatan lainnya dalam rangka mendukung Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia;
- 4.1.4. Menyusun data & informasi mengenai bidang-bidang yang telah dan akan dikerjasamakan dalam kerangka E-9;
- 4.1.5. Melakukan evaluasi hasil dan dampak pelaksanaan kegiatan E-9 terhadap pembangunan pendidikan nasional.

Pariwisata

- 4.2.1. Mendorong implementasi Deklarasi Marrakech mengenai *e-tourism* untuk memperkuat KSS Indonesia;
- 4.2.2. Melakukan kajian dan pemetaan potensi negara berkembang bagi perluasan promosi pariwisata Indonesia;
- 4.2.3. Melakukan kajian bagi kerjasama di bidang pariwisata dengan negara berkembang lain;
- 4.2.4. Mengsinergikan bidang pariwisata dengan pilar kerjasama selatan-selatan lainnya dalam rangka memperkuat KSS Indonesia;
- 4.2.5. Mendorong terjalinnya kerjasama lebih erat antar kota-kota besar di negara berkembang dengan membentuk "*Connecting South Cities*"

5. PROGRAM KERJASAMA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Berbagai potensi lembaga penelitian dan pengembangan teknologi yang dimiliki Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal bagi penguatan KSS Indonesia.

Melalui Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diharapkan dapat mendorong pengenalan kemampuan teknologi Indonesia yang lebih baik kepada negara berkembang lain. Selain itu, kerjasama dalam bidang Iptek dapat menstimulasi peningkatan kemampuan peneliti Indonesia dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mendorong perluasan, peningkatan dan pengembangan kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi di antara negara berkembang, maka diperlukan langkah-langkah strategis.

Langkah Tindak

- 5.1. Inventarisasi lembaga/badan penelitian dan pengembangan yang mempunyai potensi untuk mendukung kerjasama selatan-selatan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;

- 5.2. Melakukan identifikasi teknologi yang inovatif dan tepat guna yang sesuai dengan kondisi negara berkembang yang dapat dikerjasamakan dengan negara berkembang lain;
- 5.3. Melakukan dokumentasi mengenai *best practices*, pengembangan dan penemuan baru dalam IPTEK di Indonesia
- 5.4. Memperluas jejaring kerjasama dengan lembaga/badan penelitian dan pengembangan di negara berkembang lain.

BAB VI

PROMOSI DAN PUBLIKASI

Publikasi mengenai Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia masih sangat terbatas dan hanya termuat dalam berbagai tulisan di media cetak dan bahan seminar. Sedikit sekali literatur mengenai kegiatan dan pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia ditulis oleh kalangan akademisi dan para pakar hubungan internasional. Demikian pula dengan promosi Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia. Di sisi lain promosi mengenai Kerjasama Selatan-Selatan juga belum banyak dilakukan.

Melalui publikasi dan promosi KSS Indonesia, diharapkan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dapat lebih memahami peran dan manfaat yang dapat diperoleh dari Kerjasama Selatan-Selatan.

Penyebaran publikasi dan informasi mengenai KSS Indonesia kepada berbagai komponen masyarakat, baik tokoh masyarakat, kelompok/pemangku kepentingan, organisasi masyarakat, tokoh/partai politik, dunia usaha maupun kalangan generasi muda, diharapkan dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai peran yang dapat dimainkan oleh Indonesia dalam KSS dan manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh dari keikutsertaan Indonesia dalam KSS.

Langkah Tindak

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pemangku kepentingan dan kementerian/lembaga mengenai peran dan aktivitas Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia, yang selain dapat meningkatkan citra kementerian/lembaga, juga dapat menunjukkan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh kementerian/lembaga tersebut dalam mendukung KSS Indonesia.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat, baik tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, tokoh dan partai politik, perguruan tinggi, dunia usaha dan kalangan generasi muda mengenai Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia dan manfaat bagi kepentingan nasional.
3. Memberikan informasi yang lengkap kepada pemangku kepentingan, kementerian/lembaga baik di pusat maupun di daerah, mengenai aktivitas dan pelaksanaan serta kesempatan dalam Kerjasama Selatan-Selatan.
4. Merancang berbagai publikasi seperti brosur, *leaflets*, *FAQ sheets*, *editorial facts sheet*, *flyer*, *poster* dan *press release*.
5. Merancang bentuk publikasi dan promosi KSS Indonesia melalui berbagai media massa dan elektronik.

6. Menyelenggarakan berbagai kegiatan promosi seperti seminar, simposium, workshop, lomba dan pameran.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan program KTNB memang telah dilakukan oleh Kementerian dan lembaga pelaksana program pada akhir kegiatan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelaksanaan program yang akan datang. Namun, evaluasi dan monitoring secara menyeluruh yang berkaitan dengan dampak dari program KTNB bagi peserta dan juga lembaga pelaksana belum mendapat perhatian.

Dampak yang lebih luas dari program KTNB bagi kepentingan nasional Indonesia juga diperlukan untuk dapat memetakan posisi negara penerima program Kerjasama Selatan-Selatan terhadap kepentingan Indonesia dan sebaliknya.

Demikian pula evaluasi terhadap pilar lain dalam KSS seperti di bidang Kerjasama Ekonomi, Sosial Budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, belum banyak dilakukan terutama bila dikaitkan dengan dampak dari kerjasama yang telah dilaksanakan dan diikuti Indonesia bagi kepentingan nasional.

Oleh karena itu tindak lanjut dan kesinambungan program KSS yang telah dilaksanakan, memerlukan sebuah mekanisme monitoring dan evaluasi yang dapat memberikan gambaran yang lengkap dan komprehensif mengenai tingkat penerimaan, kesinambungan, dampak bagi peserta program dan terutama bagi kepentingan nasional Indonesia. Mekanisme monitoring dan evaluasi perlu dikembangkan dalam sebuah database yang terintegrasi.

Langkah Tindak

1. Merancang format evaluasi dan monitoring yang komprehensif, yang dapat memenuhi kepentingan pelaksana program dan kepentingan nasional.
2. Mengembangkan format evaluasi dan monitoring dengan kemudahan untuk dapat diakses oleh para penyelenggara program KSS.
3. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan setiap pada akhir tahun diadakan evaluasi dan monitoring secara nasional. Evaluasi secara nasional diadakan melalui sebuah pertemuan nasional KSS Indonesia.

BAB VII

PENUTUP

Bagi negara-negara berkembang, Kerjasama Selatan-Selatan merupakan aspek penting dalam kerangka kerjasama pembangunan internasional (*International Development Cooperation Architecture*) dan sangat berbeda dari model yang ada dalam kerangka kerja sama pembangunan Utara-Selatan. KSS bukan sebagai pengganti kerjasama tradisional yang selama ini ada, melainkan sebagai komplemen dari kerjasama antara Utara-Selatan.

Masuknya KSS dalam RPJMN 2010-2014 membuka peluang bagi Indonesia untuk meninjau kembali peran dan kemampuan yang dimiliki Indonesia. Melalui RJPMMN 2010-2014 ini pula diharapkan adanya reformulasi dan revitalisasi KSS Indonesia baik mengenai kelembagaan, keuangan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.

Cetak Biru KSS Indonesia 2011-2014 akan menjadi acuan bagi penyusunan program dan kegiatan KSS Indonesia secara lebih terarah, terkoordinir dan tersinergi antar para pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi dalam melaksanakan program KSS Indonesia.

Cetak Biru juga merupakan gambaran mengenai langkah-langkah yang komprehensif selama periode 2011-2014, yang diperlukan peningkatan kapasitas baik kelembagaan, sumber daya manusia amupun produk dan komoditi Indonesia di arena internasional dan menjadikan Indonesia sebagai rujukan bagi pertukaran pengalaman dalam kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan.

LAMPIRAN
RENCANA LANGKAH TINDAK
KERJASAMA SELATAN-SELATAN INDONESIA

KEGIATAN	RENCANA LANGKAH TINDAK							
	2011		2012		2013		2014	
PENGUATAN KERANGKA HUKUM								
Kajian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian Komprehensif Peraturan Perundangan 							
Peraturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah 		<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Peraturan Pemerintah tentang KSS Indonesia 					
Prosedur dan Mekanisme KSS	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rancangan Prosedur dan Mekanisme KSS Indonesia 		<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Prosedur dan Mekanisme KSS Indonesia • Sosialisasi Peraturan Pemerintah & Prosedur dan Mekanisme KSS 				→	
PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KOORDINASI								
Penguatan Pemangku Utama KSS :	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuk Forum <i>ad hoc Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan</i> • Menyusun kerangka kelembagaan yang ideal yang dapat mengkoordinasikan dan mengakomodasi berbagai kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia. • Seminar dan wokshop dalam rangka penguatan pembedukkan kelembagaan KSS Indonesia 		<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya dan operasionalisasi Lembaga KSS Indonesia • Sosialisasi Kelembagaan KSS Indonesia 				→	
LEMBAGA PELAKSANA								
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi <i>refresher course</i> atau program training for trainer (TOT). • Identifikasi program master/doctorate degree di luar negeri. • Menyelenggarakan Workshop/seminar nasional bagi para instruktur dan tenaga ahli 		<ul style="list-style-type: none"> • Program refresher course bagi para instruktur • Program master/doctorate degree • Workshop/seminar nasional bagi para instruktur dan tenaga ahli 				→	

LAMPIRAN
RENCANA LANGKAH TINDAK
KERJASAMA SELATAN-SELATAN INDONESIA

KEGIATAN	RENCANA LANGKAH TINDAK								
	2011		2012		2013		2014		
LEMBAGA PELAKSANA									
Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi berbagai fasilitas pelatihan, penelitian dan pengembangan yang dapat didayagunakan dan dikerjasamakan. • Peningkatan fasilitas tersebut menuju “internationally recognized center of excellence”. • Penelitian mengenai kelayakan fasilitas-fasilitas tersebut • Menjalin kerjasama dan memperkuat jaringan dengan lembaga pelatihan di luar negeri. 		<ul style="list-style-type: none"> • Tersusun “Compendium Indonesia’s Center of Excellence” 						
Kurikulum & Metodologi Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun pedoman dan format kurikulum dan modul pelatihan. • Melakukan kajian mengenai kurikulum dan materi pelatihan yang ada dan mengembangkan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. • Mengembangkan database program pelatihan. • Menyelenggarakan seminar/workshop nasional untuk penguatan penyusunan program pelatihan. 		<ul style="list-style-type: none"> • Terbangun database kurikulum dan metodologi pelatihan 						

LAMPIRAN
RENCANA LANGKAH TINDAK
KERJASAMA SELATAN-SELATAN INDONESIA

KEGIATAN	RENCANA LANGKAH TINDAK								
	2011		2012		2013		2014		
LEMBAGA PELAKSANA									
Sistem Informasi KSS	<ul style="list-style-type: none"> • Memetakan program dan kegiatan KSS • Membangun sistem informasi dan kegiatan KSS Indonesia • Membangun database lembaga pelaksana dan program KSS • Membangun database tenaga ahli Indonesia yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga • Melakukan posting tenaga ahli Indonesia yang dapat di manfaatkan oleh negara berkembang dan badan/lembaga internasional • Membangun database peserta program KSS Indonesia dan penerima beasiswa • Membangun jaringan ikatan Alumni peserta pelatihan dan beasiswa melalui berbagai media termasuk media jaring sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Database lembaga pelaksana dan program KSS • database tenaga ahli Indonesia • Posting tenaga ahli Indonesia • database peserta KSS dan penerima beasiswa • Jaringan ikatan Alumni KSS Indonesia 							

LAMPIRAN
RENCANA LANGKAH TINDAK
KERJASAMA SELATAN-SELATAN INDONESIA

KEGIATAN	RENCANA LANGKAH TINDAK							
	2011		2012		2013		2014	
PEMBIAYAAN								
Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Prosedur & Mekanisme pemberian hibah dan pinjaman (overseas development assistance) • Menyusun peraturan pembiayaan dari berbagai sumber dalam multi donor fund facility for south-south cooperation • Menyusun panduan tata kelola keuangan KSS 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur & Mekanisme pemberian hibah dan pinjaman (overseas development assistance) • Terbentuknya Multi donor fund facility for south-south cooperation • Tersusunnya Panduan tata kelola keuangan 						
Mitra Kerjasama Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Potensi mitra kerjasama internasional • Menyusun prosedur pembiayaan bersumber dari mitra internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar potensi mitra kerjasama internasional • Prosedur Pembiayaan mitra kerjasama internasional 						
Kerjasama Triangular	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi mitra kerjasama triangular • Menyusun prosedur dan mekanisme triangular • Menyusun bentuk monitoring dan evaluasi kerjasama triangular 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar mitra kerjasama internasional • Prosedur dan mekanisme triangular • Monitoring & Evaluasi 						
Swasta dan Lembaga Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian mengenai potensi swasta dan lembaga pembiayaan untuk KSS • Inventarisasi program yang dapat dibiayai dari swasta dan lembaga pembiayaan • Menyusun bentuk monitoring dan evaluasi pembiayaan swasta & lembaga pembiayaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusun Daftar Potensi Swasta dan Lembaga pembiayaan • Daftar program yang dapat dibiayai swasta & lembaga pembiayaan • Format monitoring dan evaluasi 						

KEGIATAN	RENCANA LANGKAH TINDAK						
	2011		2012		2013		2014
PROGRAM KERJASAMA							
Progam Pilihan	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun kerangka acuan dan rancangan biaya program Pilihan Menyusun negara sasaran Menyusun daftar mitra kerjasama internasional 	<ul style="list-style-type: none"> Daftar program Pilihan Pelaksanaan program Pilihan Daftar negara sasaran Daftar mitra kerjasama internasional 					<p>→</p> <p>→</p>
Kerjasama Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Kajian & pemetaan “<i>emerging market</i>” Kajian kendala dan hambatan dalam kerjasama ekonomi Menyusun format koordinasi antar pemangku kepentingan Inventarisasi dan review berbagai perjanjian yang ada Inventarisasi negara berkembang dan sektor yang mempunyai potensi bagi investasi Indonesia Melakukan kajian mengenai permasalahan dalam investasi 	<ul style="list-style-type: none"> Peta “<i>emerging market</i>” Forum Kemitraan Kerjasama Ekonomi antar Negara Berkembang Daftar negara dan sektor yang dapat di kerjasamakan Seminar/Workshop Nasional 					<ul style="list-style-type: none"> Prospek dan potensi pasar <p>→</p>

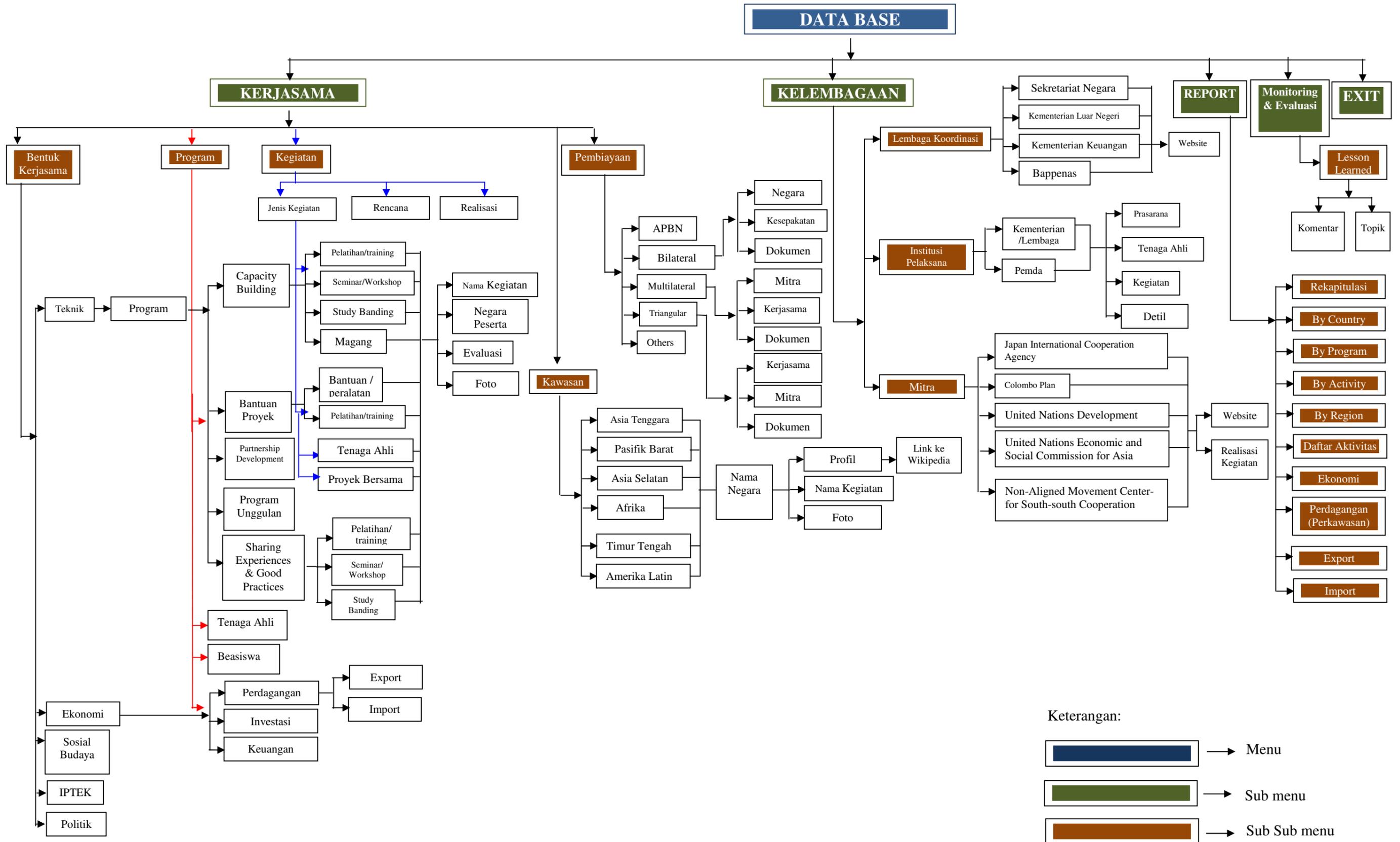
KEGIATAN	RENCANA LANGKAH TINDAK			
	2011	2012	2013	2014
PROGRAM KERJASAMA				
Kerjasama Teknik	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Program KTNB Indonesia Menyusun prosedur dan mekanisme KTNB Indonesia Menyusun daftar negara peserta KTNB Mengidentifikasi universitas yang dapat menerima peserta dari negara berkembang. Menyusun format prosedur & administratif pemberian beasiswa Merancang database alumni penerima beasiswa Terbentuknya Ikatan Alumni Penerima Beasiswa KSS Indonesia Kajian permintaan dan pemetaan terhadap negara berkembang yang memerlukan bantuan proyek. Menyusun prosedur, persyaratan, kriteria hibah dan jenis bantuan proyek.Menyusun format monitoring dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> Buku Putih "Compendium" Program KTNB Indonesia Peta negara peserta KTNB Indonesia Panduan prosedur, kriteria dan jenis bantuan proyek dan format MonEv Data base Alumni tersusun Alumni KSS Indonesia terbentuk Peta negara berkembang yang memerlukan bantuan teknis Prosedur dan mekanisme pemberian hibah & bantuan proyek Tersusun Format MonEv 	<ul style="list-style-type: none"> Seminar /Workshop Alumni KSS Indonesia 	
Kerjasama Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> Membangun jejaring dengan lembaga pendidikan di negara berkembang untuk mengembangkan program <i>double degree</i> Memperkuat e-tourism Kajian & Pemetaan potensi pariwisata negara berkembang Mendorong terjalinnya kerjasama antar kota 		<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya "Connecting South Cities" 	<ul style="list-style-type: none"> Terjalin kerjasama antar universitas untuk mengembangkan program <i>double degree</i>

KEGIATAN	RENCANA LANGKAH TINDAK							
	2011		2012		2013		2014	
PROGRAM KERJASAMA								
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi lembaga penelitian dan pengembangan iptek untuk KSS Identifikasi iptek yang inovatif Dokumentasi keunggulan iptek dan best practices Memperluas jejaring antar lembaga Iptek 	<ul style="list-style-type: none"> Daftar program lembaga iptek Publikasi iptek yang inovatif 	<ul style="list-style-type: none"> Promosi iptek yang inovatif 					→
								→
								→
								→
PROMOSI & PUBLIKASI								
Meningkatkan sosialisasi pemahaman dan pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun format sosialisasi Menyusun informasi melalui brosur, leaflets, editorial, flyer dan press release Menyusun promosi melalui media cetak & elektronik Menyelenggarakan workshop, seminar dan simposium 	<ul style="list-style-type: none"> Promosi melalui media cetak & elektronik Menyelenggarakan workshop, seminar dan simposium 						→
							→	
							→	
							→	
MONITORING & EVALUASI								
Format MonEv	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun bentuk/format MonEv 	<ul style="list-style-type: none"> Tersusun Format MonEv 						
Monitoring & Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> MonEv tahunan Evaluasi Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> MonEv tahunan Evaluasi Nasional 						→

Lampiran - 3

FLOWCHART INFORMASI KSS INDONESIA DAN DAFTAR INPUT DATA

FLOWCHART INFORMASI KSS INDONESIA



Keterangan:

→ Menu

→ Sub menu

→ Sub Sub menu

Total Input Data Kegiatan KSS Berdasarkan Institusi

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan		
1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Kementerian Pertanian)	1	Studi Banding	1	Training Course on Dairy farm management for sudan in Indonesia	Kementerian Pertanian	1	
		2	Training	2	Comparative study for farmer agriculture rural training center (FARTC) from Tanzania in Indonesia		1	
<i>Sub total</i>							2	
2	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	3	Studi Banding	1	Vietnam and Indonesia Exchange Views and Experiences on the Coordination and Implementation of Population Policy and Program	Ceacos & BKKBN	24	
				2	Delegation of Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) Guangdong Provincial Committee and Indonesia Exchange Views and Experience on Family Planning and Reproductive Health Program			
				3	Bangladesh and Indonesian Exchange Views and Experiences on the Role of Moslem Leader in Family Planning and Reproductive Health Program			
				4	Afghanistan Delegation Visit BKKBN to Share and Exchange Views on Family Planning and Reproductive Health Programs			
				5	High Level Visit of Bangladesh Delegation to BKKBN			
				6	Pakistan High Level Delegation Visit Indonesia to Share Views on the Role of Moslem Leader on the Family Planning Program Implementation		Ceacos	
				7	Shorth Visit of the Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA) to Overview the Poverty Alleviation Programs in Indonesia			
				8	Bangladesh Delegation Visit BKKBN to Exchange Views and Experiences in Developing Human Resources in Health			
				9	Bangladesh Delegation Visit BKKBN to Share Views and Experiences on Family Planning and Reproductive Health Services		Ceacos & BKKBN	
				10	Bangladesh Delegation Visit BKKBN to Share Views and Experiences on Family Planning Management Information System (MIS)			
				11	Exchange Views and Experiences between Ethiopia and Indonesia in Coordinating and Implementing Population Policy and Program			
				12	Observation Study Tour Of The National Population And Family Planning Commission Of The Peoples Republic Of China To Indonesia			
				13	Indian Study Visit On Management Of Population In Family Planning / Reproductive Health			
				14	"Honorable Reciprocity Visit from Tunisia"			
				15	Observation Study Tour of the Members of Ethiopia Islamic Affairs Supreme Council on Views and Experiences sharing between Ethiopia and Indonesia in Increasing the participation of Muslim Leaders and Faith Based Organizations in FP/RH		BKKBN	
				16	Chinese NPFPC High Level Delegation Visit to Indonesia to Review the Cooperation /Exchange Views on Family Planning/ Reproductive Health Policy and Program			
				17	Observation Study Tour on Family Development Program			
				18	Observation Study Tour on HIV/AIDS Prevention/Care Strategies			

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan
			19	Observation Study Tour on Quality of Care in Reproductive Health Program		
			20	Study Visit Group: From India and Malaysia		
			21	Short Visit of Pakistan Delegation		
			22	Short Visit of ICOMP Representative		
			23	Observation Study Tour on Reproductive Health and Family Planning Quality of Care		
			24	The OST on Adolescent Reproductive Health and HIV/AIDS Prevention Strategies in Asia Center for Population and Community Development		
	4	Pertemuan Tenaga Ahli	1	2nd East Asia Ministerial Forum on Families		17
			2	11th Partners Board Meeting		
			3	"Strengthening Partnership with Government of The People's Republic of China"		
			4	Tracing the Implementation of MoU between the GOI and Tunisia		
			5	The Twelfth Annual Board Meeting of Partners in Population and Development		
			6	United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) Meeting	BKKBN	
			7	Partners in Population and Development Meeting		
			8	Annual Board Meeting of ICOMP		
			9	Partners in Population and Development Meeting		
			10	International Conference and Annual Board Meeting of Partners in Population and Development		
			11	The Development of IEC Guidelines on Reproductive Health/Family Planning Information and Services: an Islamic Perspective		
			12	The 5th Poverty and Economic Policy (PEP) Network Meeting Addis Ababa, Ethiopia		
			13	Annual Meeting of ICOMP		
			14	Follow-Up Meeting of the Council on Islamabad Declaration on Population & Development (IDPD) Issues by International Ulama Conference", Islamabad, Pakistan		
			15	South- South Cooperation (SSC) Strategies for Population and Development		
			16	"Bilateral Meeting of Indonesia and Colombo Plan in South-south Technical Cooperation"		
			17	International Program Advisory Committee (IPAC) Meeting		

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan		
		5	Seminar/Workshop	1	Training of Trainers on Reproductive Health Commodity Security (RHCS)		34	
				2	Reproductive Health Commodity Security (Rhcs) For Democratic Peoples Republic Of Korea			
				3	The Workshop On Training Of Trainers (Tot)Of Reproductive Health Commodity Security (Rhcs)For Multi Countries Officials			
				4	The Workshop On Training Of Trainers (Tot)Of Reproductive Health Commodity Security (Rhcs)For Multi Countries Officials			
				5	The Family Scholars Colloquium Kuala Lumpur, Malaysia			
				6	International Workshop for Senior Officials on Capacity Building of Programme Management in Population and Development			
				7	International Conference on Best Practices for Scaling Reproductive Health and Family Planning Programme and Reducing Maternal and Neonatal Mortality			
				8	"ICOMP's International Seminar "Towards Universal Access to Reproductive Health: Policies, Systems and Capacity Building Innovations""			
				9	Seminar on Fertility Transition in Asia, Bangkok, Thailand			
				10	"Hosting The Third East Asia Ministerial Forum on Families"			
				11	Honorable Visit of Caribbean's Parliamentarian Delegation			
				12	The International Conference of Muslim Leaders on Population and Development Contributing to the Achievement of the MDGs	BKKBN		
				13	International Workshop on Sexual and Reproductive Health and Rights			
				14	International Workshop on Infrastructure Design and Equipment for Reproductive Health Service Station			
				15	Regional workshop on monitoring and evaluation of adolescent reproductive health programs			
				16	Workshop on Training and Research Center on Population, Reproductive Health and Family Planning among the PPD Countries			
				17	2nd International Conference on Reproductive Health Management, Emphasis on Family Planning, Theme; "Convergence: Working Together For Results and Impact"			
				18	Workshop on Ethical Issues in Research in Reproductive Health			
				19	Workshop on Business Planning Strategy			
				20	Workshop on Enhancing Community Capacity in Managing Challenges of Population Aging			
				21	National Seminar on Baby Boom			
				22	"Workshop on Strategic Communication in Population, Reproductive Health/Family"			
				23	Population and Reproductive Health, Seoul, South Korea			
				24	"Strategic Partnership Programme (SPP) Implementation Review and Planning Workshop for Countries of Intensified Focus in the Asia-Pacific Region, Bangkok, Thailand"			

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan
			25 "International Workshop on Adolescent Reproductive Health (ARH)Counselling Skill-Building, Bangkok, Thailand"	BKKBN		
			26 Workshop on Strategic Assessment of Current Strengths and Weaknesses of Country Health Information System, Bangkok, Thailand			
			27 The Asia Pacific Island Nations Summit on Partnership, Peace Building and Sustainable Development: Strengthening the Community of Asia Pacific Island Nations			
			28 The South Asian Association for Regional Co-operation (SAARC) Parliamentarians Conference on "Advocacy to Achieve Universal Access to Reproductive Health Services and Commodity Security			
			29 Asian Hospital Management Conference			
			30 "The Asia-Pacific High Level Forum on ICPD at 15: Accelerating Progress Toward International Conference on Population and Development (ICPD) and the Millennium Development Goals "			
			31 International Conference and Annual Board Meeting of Partners in Population and Development			
			32 The High Level United Nations Conference on South-South Cooperation			
			33 "The Dissemination of Generic Training Modules on Population, Reproductive Health and Gender "			
			34 "The Discussion on the Enrichment and Field-Testing of "FP/RH, Gender: Islamic Perspectives" Book"			
	6	Training	1 The Second Batch of the Third Country Training Program on Behavior Change Communication (BCC) in Family Planning/Reproductive Health:The Indonesian Experience	Ceacos & BKKBN	27	
			2 Roles of media in Family Planning/Reproductive Health Information, Education, and Communication Program (2001)	BKKBN		
			3 The Third Country Training Program on Planning and Managing Information, Education and Communication (IEC) for Family Planning/ Reproductive Health: The Indonesian Experience (2004)			
			4 The First Batch Of The Third Country Training On Program Behaviour Change Communication (Bcc) In Fp/Rh: The Indonesia Experience			
			5 The Third Country Training Program on Planning and Managing Information, Education and Communication (IEC) for Family Planning/ Reproductive Health: The Indonesian Experience (2005)			
			6 The Third Country Training Program on Planning and Managing Information, Education and Communication (IEC) for Family Planning/ Reproductive Health: The Indonesian Experience (2006)			
			7 The Third Batch Of The Third Country Training Program on Behavior Change Communication (BCC) In Family Planning Reproductive Health; Indonesian Experience			

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan	
			8 The Study Tour For The Government Officers of Democratic Peoples Republic of Korea (DPRK) on Reproductive Health Commodity Security (RHCS)	BKKBN			
			9 The Training Course On Empowering Women Through Social, Economic And Cultural Intervention				
			10 The Training Of Trainers (Tot) Workshop On Reproductive Health Commodity Security (Rhcs)For Developing Countries				
			11 "Exposing MDGs into International Conference of Muslim Leaders"				
			12 Producing Accredited-Human Resources on Reproductive Health Commodity Security				
			13 "Observation-Study Tour (OST) on Mosque-Based Community Empowerment through the Posdaya Model"				
			14 International Fellowship Training Course on Reproductive Health special focus on Save Motherhood				
			15 Management Development Program and Basic Management Program in Asian Institute of Management (AIM)				
			16 Essential Newborn Care (ENC)				
			17 Training on Measuring and Managing Corporate Performance Program				
			18 Training of Trainers Workshop on Operation Research in Population and Reproductive Health				
			19 OST on Strategic Communication for FP/RH Programmes including RTI/HIV/AIDS, Maternal Health and ARH: Developing A Social Communication Network				
			20 Training of Trainer (TOT) Reproductive Health Commodity Security				
			21 English Language and Communication Skills, Singapore				
			22 "Regional Workshop on E-Application of ICT in Population Related Field: E-Learning and E-Health"				
			23 Women's Health and Empowerment, Seoul, South Korea				
			24 Human Resources Management for Development Organizations (HRM-DO)				
			25 "Training of the Regional Capacity Development for Behavior Change Communication"				
			26 The Short Course Training on Research Methodology and Demography, at the Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University				
			27 The Inter Parliamentarian Forum on Maternal Health and Rights				
			<i>Sub total</i>				102
3	Institut Pertanian Bogor (IPB)	7	Proyek Bersama		IPB		8
			1 Joint International Master Program in Integrated Tropical Agriculture and Forestry				
			2 Research Collaboration on STORMA (stability of Rainforest Margin)				
			3 International Collaboration on Primate Studies				

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan	
			4 International Collaboration on Biological Production	}			
			5 International Collaboration on Feeding Program and Community Nutrition				
			6 International Collaboration on Food and Technology				
			7 International Collaboration on Sustainable Utilization of Botanical Resources in Tropical Agriculture/Land				
			8 International Collaboration on Landscape-Ecological Studies on Sustainable Bio-resources Management System				
	8	Training	1 Third Country Training Program on Agricultural Engineering & Technology Application in Developing Countries		} IPB	7	
			2 Third Country Training Program on Farm Machinery & Equipment				
			3 Third Country Training Program on Irrigation and Soil & Water Conservation				
			4 Third Country Training Program on Post Harvest Engineering & Technology				
			5 Third Country Training Program on Small Scale Product Processing Unit Utilizing Environment Friendly renewable Energy and Local Resources				
			6 Third Country Training Program on Renewable Energy for Thermal Process of Agricultural Products				
			7 Third Country Training Program on Appropriate Mechanization and Water Management for Dryland Agriculture				
			<i>Sub total</i>				15
4	Biro Pengembangan Pelatihan Pertanian (Kementerian Pertanian)	9	Magang	1 Apprenticeship Program in Agriculture	} Kementerian Pertanian	2	
				2 Apprenticeship Program for Trainers and Extension Workers			
			<i>Sub total</i>				2
5	Balai Besar Pelatihan Pertanian (Kementerian Pertanian)	10	Training	1 Third Country Training Programme on Agribusiness Technology for Afghanistan Officials	} Balai Besar Pelatihan Pertanian	1	
		11	Magang	2 Apprenticeship Program For Asian and African Farmers in Indonesia		1	
			<i>Sub total</i>				2
6	Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Kementerian Pekerjaan Umum)	12	Bantuan Peralatan	1 Strengthening Road Transport Environment in 1996	} Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan	3	
				2 Equipments aid of Geotechnical Machine of Super Light Weight Foamed Mortar			
				3 Equipments Aid of Geotechnical Machine			
		13	Forum	1 Symposium Intrenational (workshop with NILIM)		1	
		14	Proyek Bersama	1 Low Cost and Low Volume Road		2	
				2 Accelerated Pavement Test (APT) Technology			
		15	Misi	1 IDI Mission on South (Middle Java Corridor Road Development Project)	1		
		16	Seminar/Workshop	1 Joint Workshop Road and Bridge Research Centre - NILIM	6		
				2 The development of Slope Disasater Management System for National Road (2006)			

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan	
			3	Light Landfill Innovation Workshop	Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan		
			4	The Development of Indonesia Vehicle of Operating Cost and Travel Saving			
			5	The Development of Indonesia Accident Cost			
			6	Alternative Road Alignment for Expansion of Toll Road System in Indonesia			
	17	Training	1	Training of Manual Management Implementation		2	
			2	Training of Soil Testing Plan RDCRB-JICA-Timor Leste			
			<i>Sub total</i>				15
7	Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Malang	18	Training	1	Development Country Training Course on Artificial Insemination on Dairy Cattle	Ceacos	3
				2	Regional Training Course on Artificial Insemination and Milk Record Keeping Dairy Cow		
				3	International Training Course of Artificial Insemination on Dairy Cattle		
			<i>Sub total</i>				3
8	Centre for Economic and Social Studies (CESS)	19	Training	1	Third Country Training Programme on Capacity Building for Poverty Reduction (2010)	Jurnal ITCP (Sekretariat Negara)	1
			<i>Sub total</i>				1
9	Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman (Kementerian Pekerjaan Umum)	20	Training	1	Building Materials	Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman	1
			<i>Sub total</i>				1
10	Yayasan Dian Desa	21	Proyek Bersama	1	The Asian Regional Cookstove Program (ARECOP)	Ceacos	1
			<i>Sub total</i>				1
11	Direktorat Jenderal Peternakan (Kementerian Pertanian)	22	Training	1	Embryo Training, Knowledge Transfer for Sudan livestock officer	Kementerian Pertanian	1
			<i>Sub total</i>				1
12	Direktorat Jenderal Hortikultura (Kementerian Pertanian)	23	Training	1	Short Training Course on Horticulture Cultivation	Kementerian Pertanian	7
				2	Short Training Course on Commodities Zoning		
				3	Short Training Course on Technology Application		
				4	Short Training Course on Technology Application		
				5	Short Training Course on Strengthening the Agricultural Institution		
				6	Short Training Course on Product Quality Management		
				7	Short Training Course on Improving the Farming and Handling Infrastructure and Facilities		
			<i>Sub total</i>				7
13	Direktorat Jenderal Pengelolaan Air dan Tanah (Kementerian Pertanian)	24	Training	1	Training for Trainers (TOT) for Land and Water Management Database	Direktorat Jenderal Pengelolaan Air dan Tanah	6
				2	Training on Survey, Investigation, and Design for Land Extension and Irrigation System at Farm Level		

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan	
			3 Long-term Training on Land and Water Management Database	Direktorat Jenderal Pengelolaan Air dan Tanah			
			4 Mid-term Training on Tidal Land Development				
			5 Mid-term Training on Irrigation System at Farm Level				
			6 Training on Water User Association				
			<i>Sub total</i>				6
14	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)	25	Pertemuan Tenaga Ahli	1 JICA's Third Country Expert Program		1	
		26	Training	1 The 3rd International Training Course in Information Technology –based for Electric Engineering Education	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)	8	
				2 The 2nd International Training Course in Information Technology –based for Electric Engineering Education			
				3 International Training Course in Information Technology–based for Electric Engineering Education			
				4 The 5th Third Country Training Course on Information Technology Education Methodology			
				5 The 4th Third Country Training Course on Information Technology Education Methodology			
				6 The 3rd Third Country Training Course on Information Technology Education Methodology			
				7 The 2nd Third Country Training Course on Information Technology Education Methodology			
				8 The Third Country Training Programme on Education for Computer Based Industrial Automation			
			<i>Sub total</i>				9
15	Badan Litbang Pertanian	27	Training	1 Long-term Courses on Agricultural Resources	Badan Litbang Pertanian	5	
				2 Long-term Courses on Biotechnology			
				3 Mid-term Courses on Commodity Improvement			
				4 Mid-term Courses on Socio-economic Policy			
				5 Short-term Training in the Field of Institutional Development			
			<i>Sub total</i>				5
16	Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	28	Training	1 Long-term Training in Designing Panel Data for Agriculture Sector	Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	5	
				2 Mid-term Training in Designing Policy Implementation			
				3 Mid-term Training in Survey Research			
				4 Short-term Training in Policy Evaluation			
				5 Short-term Training in Participatory Rural Appraisal			
			<i>Sub total</i>				5
17	Yayasan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA)	29	Seminar/Workshop	1 International Training Workshop on Depeloment of Renewable Energy: Micro HydroEnergy End-Use Productivity for Roral Economic Development	Ceacos	1	
			<i>Sub total</i>				1
18	Kementerian Pertanian	30	Studi Banding	1 Exchange Visit of Officials, Trainers and Farmers through National Farmers Week	Kementerian Pertanian	2	
				2 Comparative Study for Farmer Agriculture Rural Training Center (FARTC) from Tanzania in Indonesia			
		31	Bantuan Peralatan	1 Assistance in form of agricultural machinery to Myanmar 2009, 10 Rice Milling Units		20	

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan
			2 Assistance in form of Hand Tractors (Tanzania: 12 units, Sudan: 12 units, Gambia: 12 units, Tonga: 12 units, Samoa: 12 units)			
			3 Assistance in form of agricultural machinery for Timor Leste (13 units of hand tractors, 5 units of water pumps, and 3 units of rice milling machines) and for Lao PDR (12 units of hand tractors)			
			4 Assistance in form of agricultural machinery to gambia (4 units of hand tractor, 400 units of hoe dan 400 units of sickle (in 2004)			
			5 Assistance in form of agricultural machinery to Gambia in 2007 (12 units of hand tractor (in 2007), 1 Technician of Farm Machinery)			
			6 Assistance in form of agricultural machinery, 2 unit hand tractor in 1995			
			7 Assistance in form of agricultural machinery to Tanzania, 1 unit hand tractor and 1 unit diesel water pump			
			8 Assistance in form of agricultural machinery, 12 units of hand tractor (Des 2007)			
			9 Assistance in form of agricultural machinery to Fiji in 2004, 10 units of hand tractors and training package for 3 months	Kementerian Pertanian		
			10 Assistance in form of agricultural machinery, 15 units of hand tractor and 15 units of power tresher			
			11 Assistance in form of agricultural machinery to vanuatu, 5 units of hand tractor (in 2006)			
			12 Assistance in form of agricultural machinery to Samoa Barat, 12 units of hand tractor			
			13 Assistance in form of agricultural machinery to Tonga, 13 units of hand tractor			
			14 Assistance in form of agricultural machinery to Samoa Barat, 12 units of hand tractor			
			15 Assistance in form of agricultural machinery to Tonga, 13 units of hand tractor			
			16 Assistance in form of agricultural machinery to Cambodia, 15 units of hand tractor dan 15 units of power thresher			
			17 Assistance in form of agricultural machinery to Sudan, 12 units of hand tractor (Des 2007)			

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan
			18 Assistance in form of agricultural machinery to Sudan, 1 unit of hand tractor and 1 unit of diesel water pump (April 2007)			
			19 Assistance in form of agricultural machinery to Timor Leste, 13 units of hand tractor (in 2008)			
			20 Assistance in form of agricultural machinery: PNG - 15 units of hand tractors and 15 units of power threshers Myanmar - 10 units of rice milling machines Cambodia - 15 units of hand tractors and power threshers			
	32	Pengiriman Tenaga Ahli	1 Agricultural Expert Dispatch to PNG and Fiji for 2 month		62	
			2 Expert Dispatch to Tanzania (Farmer)			
			3 Expert Dispatch to Tanzania (Expert)			
			4 Expert Dispatch to Cambodia in Trilateral Cooperation between Indonesia-Cambodia-JICA			
			5 Expert Dispatch to Zanzibar			
			6 Expert Dispatch to Tanzania			
			7 Expert dispatch to Myanmar 2009, 1 Farm machinery Technician			
			8 Expert Dispatch to Tanzania			
			9 Expert Dispatch to Cambodia in Trilateral Cooperation between Indonesia-Cambodia-JICA			
			10 Expert Dispatch to Cambodia in Trilateral Cooperation between Indonesia-Cambodia-JICA	Kementerian Pertanian		
			11 Expert Dispatch to Papua New Guinea in Trilateral Cooperation between Indonesia-Papua New Guinea-JICA			
			12 Expert Dispatch to Cambodia in Trilateral Cooperation between Indonesia-Cambodia-JICA			
			13 Expert Dispatch to Egypt in Trilateral Cooperation between Indonesia-Egypt-JICA			
			14 Expert Dispatch to Fiji as Technical Assistance from Indonesia			
			15 Expert Dispatch to Madagascar in Trilateral Cooperation between Indonesia-Madagascar-JICA			
			16 Expert Dispatch to Papua New Guinea in Trilateral Cooperation between Indonesia-Papua New Guinea-JICA			
			17 Expert Dispatch to Vanuatu as Technical Assistance from Indonesia			
			18 Expert Dispatch to Tanzania			
			19 Expert Dispatch to Madagascar in Trilateral Cooperation between Indonesia-Madagascar-JICA			
			20 Dispatch of agricultural machine experts to Tanzania and Sudan			
			21 Expert Dispatch to Madagascar in Trilateral Cooperation between Indonesia-Madagascar-JICA)			
			22 Expert dispatch to madagaskar years 2003-3006, 6 Experts in the field of Farm Machinery			

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan
			23	Expert dispatch to madagaskar years 2007, 4 Experts in the field of livestock, soil specialists, agricultural mechanization, and rice cultivation		
			24	Expert dispatch to madagaskar years 2007, 4 Experts in the field of livestock, soil specialists, agricultural mechanization, and rice cultivation		
			25	Expert dispatch to madagaskar years 2010, 1 Farm Machinery Experts		
			26	Expert dispatch to Tazania, 3 Experts, i.e. Researchers, Extension Worker and farmer for 1995		
			27	Expert dispatch to Tazania,5 Experts (1 technician for mechanization, 3 extension workers, 1 farmer) for the year 1998 (Triangular Programme among Indonesia - Tanzania - Japan / JICA).		
			28	Expert dispatch to tanzania, 1 Expert and 1 Technician of Farm Machinery in april 2007		
			29	Expert dispatch to Fiji, 4 Experts on Coconut Extension Work (in 2003 - 2004)		
			30	Expert dispatch to Fiji in 2004, 3 Experts of Rice (Researcher, Extension Worker and Farmer		
			31	Expert dispatch to Cambodia before 1998-2001		
			32	Farm Machinery Technician dispatch to Papua New Guinea		
			33	Expert dispatch to Vanuatu, 2 Experts (Farm Machinery Expert and Technician) 2006		
			34	Expert dispatch to Samoa Barat, 1 person technician (in 2007)		
			35	Expert dispatch to Tonga, 1 technician (in 2007)	Kementerian Pertanian	
			36	Expert dispatch to Cambodia, 10 experts before 1998		
			37	Expert dispatch to Cambodia, 8 Experts		
			38	Expert dispatch to Cambodia, 3 Experts in the field of agricultural production		
			39	Expert dispatch to Cambodia, 1 Farm Machinery Technician		
			40	Expert dispatch to Egypt, 1 Livestock Expert		
			41	Expert dispatch to Sudan, 1 Technician		
			42	Expert dispatch to Sudan, 1 Technician		
			43	Expert dispatch to Sudan, 1 Technician		
			44	Expert dispatch to Madagaskar 2003		
			45	Expert dispatch to Madagaskar 2006		
			46	Expert dispatch to Madagaskar		
			47	Expert dispatch to Madagaskar 2007		
			48	Expert dispatch to Madagaskar 2009		
			49	Expert dispatch to Madagaskar 2010, 1 Farm Machinery Expert		
			50	Expert dispatch to Tanzania 1998		
			51	Expert dispatch to Tanzania 1999		
			52	Expert dispatch to Tanzania 1998		
			53	Expert dispatch to Tanzania 1998		
			54	Expert dispatch to Tanzania 1997-1999		
			55	Expert dispatch to Tanzania 2007		

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan
			56	Expert dispatch to Papua New Guinea 2004, 2005, 2006, 2007		
			57	Expert dispatch to Papua New Guinea 2006		
			58	Expert dispatch to Vanuatu 2006		
			59	Expert dispatch to Cambodia before 1998		
			60	Expert dispatch to Cambodia before 2002-2003		
			61	Expert dispatch to Cambodia before 2004		
			62	Expert dispatch to Egypt before 2004		
	33	Magang	1	Apprenticeship of Myanmar farmers in Indonesia for 2 months.		6
			2	Apprenticeship training for Gambian farmers 2008		
			3	Farmer Apprentice Program in Indonesia (Jakarta, Yogyakarta, Kuningan, and Lembang) in 2010		
			4	TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries) - Senegal		
			5	An apprenticeship program of 5 farmers from Fiji 2007		
			6	Apprenticeship of farmers in Indonesia 2009.		
	34	Seminar/Workshop	1	4th Workshop of ASEAN Public Awareness Programme on GMOs		1
	35	Training	1	TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Liberia		67
			2	TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Lao PDR		
			3	TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Myanmar	Kementerian Pertanian	
			4	TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Malaysia		
			5	Training Program for Developing Countries on Technology Transfer of Quality Test on Veterinary Medicine		
			6	TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Iraq		
			7	TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- India		
			8	The First ASEAN Training Course on Dairy Husbandry Technology		
			9	The Second ASEAN Training Course on Dairy Husbandry Technology		
			10	The Third ASEAN Training Course on Dairy Husbandry Technology		
			11	ASEAN Training Course on Post Harvest Technology on Fruits and Vegetables (Batch I)		
			12	International Training Course on Community Water Management for Agriculture		
			13	ASEAN Training Course on Post Harvest Technology on Fruits and Vegetables (Batch II)		
			14	ASEAN Training Course on Post Harvest Technology on Fruits and Vegetables (Batch III)		
			15	Training Course on Small Ruminants Production and Development (Batch I)		

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan
			16 Training Course on Small Ruminants Production and Development (Batch II)			
			17 TOT for Participatory Training Program on Agricultural Extension Methodology			
			18 Training on Embryo Transfer for Husbandry Officers in Sudan			
			19 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries) - Burkina faso			
			20 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries) - Komoro			
			21 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries) - Kamerun			
			22 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries) - Ethiopia			
			23 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries) - Ghana			
			24 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries) - Guinea			
			25 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries) - Ivory Coast			
			26 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries) - Kenya			
			27 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries) - Madagaskar	Kementerian Pertanian		
			28 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries) - Nigeria			
			29 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries) - Tanzania			
			30 Training for 3 officials of FARTC Tanzania			
			31 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Zimbabwe			
			32 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Fiji			
			33 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Maldives			
			34 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Marshal Island			
			35 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Solomon Island			
			36 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Tonga			
			37 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Suriname			
			38 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Peru			

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan
			39 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Panama	Kementerian Pertanian		
			40 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Afganistan			
			41 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Bangladesh			
			42 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Cina			
			43 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Brunei Darussalam			
			44 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Bhutan			
			45 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Cambodia			
			46 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Egypt			
			47 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Sri Lanka			
			48 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- South Korea			
			49 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Singapore			
			50 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Pakistan			
			51 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Nepal			
			52 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Mongolia			
			53 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Sudan			
			54 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Thailand			
			55 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Turkey			
			56 TCDC Program (Technical Cooperation Among Developing Countries)- Vietnam			
			57 Training course on study tour on exotic fruits cultivation and development technique			
			58 Training course on capacity building for farmer			
			59 Training program in agrobusiness technology			
			60 Training course on post harvest technology on fruits and vegetables			
			61 Training course on modern rice cultivation for researcher			
			62 Training course on Cassava Based Industry (Food, Feed and Energy)			
			63 Training course on dairy farm management			
			64 Training course on bio energy in rural area			

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan	
			65	Training course on small ruminants production and development	Kementerian Pertanian		
			66	Training of Trainers for Participatory Training Program on Agricultural Extension Methodology (Batch 3)			
			67	Training Course on Horticultural Agrobusiness Technology			
			<i>Sub total</i>				158
19	Kementerian Komunikasi dan Informatika	36	Studi Banding	1	Communication and information, Cooperation between SABA news agency and Antara news agency, exchange of cultural television program, exchange of experience in information technology, film, broadcasting, and radio	1	
		37	Proyek Bersama	1	Cooperation in Radio and Television	4	
				2	Joint Statement between Indonesia and Pakistan		
				3	Cooperation on news exchange between Maghreb Arab Press (MAP) and Antara News Agency, Radio and Television, ICT		
				4	Science and Technology, cooperation in ICT		
		38	Beasiswa	1	International scholarship of ICT and IMT Bussines Scholarship	1	
		39	Training	1	The Third Country Training Program on "TV Documentary Program Production"	9	
				2	The Third Country Training Program on "TV Documentary Program Production"	Kementerian Komunikasi dan Informatika	
				3	The Third Country Training Program on "TV Documentary Program Production"		
				4	The Third Country Training Program on "TV Documentary Program Production"		
				5	The Third Country Training Program on "TV Documentary Program Production"		
				6	The Third Country Training Program on "TV Documentary Program Production"		
				7	The Third Country Training Program on "TV Documentary Program Production"		
				8	The Third Country Training Program on "TV Documentary Program Production"		
				9	The Third Country Training Program on "TV Documentary Program Production"		
			<i>Sub total</i>				
20	Kementerian Luar Negeri	40	Magang	1	Apprenticeship Program for Mozambican	Ceacos & Kementerian Luar Negeri	
				2	Apprenticeship Program for Timor Leste in SME Development		
				3	Apprenticeship Program for Gambian Farmers		
				4	Apprenticeship Programme for Fijian Farmers		
		41	Proyek Bersama	1	Initiative Programmes on Taxes, Customs, and Excises and Environment (Climate Changes0 by team Survey Republic of Korea	1	

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan	
		42	Misi	1 Fact Finding Mission on Artificial Insemination on Third Country training Programme of Artificial Insemination on Dairy Cattle		1	
		43	Seminar/Workshop	1 International Training Workshop on Micro Hydro Development to Empowerment of Rural Economy in Remote Areas		9	
			2 International Training Workshop on Poverty Reduction				
			3 International Training Workshop on Local Economic Development				
			4 International Training Workshop on Renewable Energy: Micro Hydro Energy End-Use Productivity for Rural Economic Development for Asian, African and the Pacific Countries				
			5 International Workshop on Disaster Risk Management Focusing on Strategic Planning on South-South Cooperation				
			6 International Workshop on Women Empowerment in Economic Development: Promoting Women's Productivity				
			7 International Workshop on Enhancing South South Cooperation Roles on Disaster Risk Management in Asia-Pacific: Focusing on Climate Change Adaptation				
			8 Regional Workshop on Enhancing Energy Security through Community-Based Micro Hydro Power Technology				
			9 Regional Workshop on Development of Women Center				
		44	Training	1 International Training Program on Handling Pests and Fish Diseases for Asian and Pacific Countries	Ceacos & Kementerian Luar Negeri	24	
			2 International Training Program on Business Incubator to Develop the Palestinian SMEs: Focusing on Creative Industry				
			3 International Training Program on Handling Pests and Fish Diseases for Asian and Pacific Countries				
			4 International Training Program for Timor Leste on Forest Rehabilitation				
			5 International Training on TV Documentary Program Production				
			6 International Training Program on Business Incubator to Develop SMEs: Focusing on Creative Industry				
			7 International Training Workshop on Democratization				
			8 International Training Workshop on Women Empowerment on Information Technology				
			9 International Training Program on Disaster Risk Management Focusing on Forest Rehabilitation for Timor Leste				
			10 International Training Program on Intensive Shrimp Culture for Asian Countries				
			11 International Training on Poverty Reduction				
			12 International Training Programme on Grouper Nursery for Asian and African Countries				
			13 International Training Program on Fishing Technology and Navigation for Pacific Countries				

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan	
			14 International Training on Appropriate Mechanization and Water Management for Dry Land Agriculture in African Countries	Ceacos & Kementerian Luar Negeri			
			15 International Training Programme on Operational Management of Microfinance for Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam, Papua New Guinea, and Timor Leste				
			16 Business Incubator to Develop the Palestinian SMEs				
			17 International Training on Development of Renewable Energy: Its role in Rural Socioeconomic Development				
			18 International Training Program on Microfinance for Asian - African Countries: Establishing and Managing Microfinance Institution				
			19 International Training on TV Documentary Program Production				
			20 International Training Workshop on Democratization and Good Governance				
			21 Training Workshop on Dispute Settlement Mechanism on Investment				
			22 Training on Renewable Energy: Micro Hydro Power for Rural Development				
			23 Training on Microfinance: Establishing and Managing Microfinance Institution (MFI)				
			24 International Training Programme Business Incubator to Development of Small and Medium Enterprises for Asian, African, and Pacific Countries				
			<i>Sub total</i>				39
21	Kementerian Kehutanan	45	Training	1 International Training on Multi Disaster Risk Management: Focusing on Forest Rehabilitation for Timor Leste	Kementerian Kehutanan	1	
				<i>Sub total</i>			1
22	Kementerian Industri	46	Pengiriman Tenaga Ahli	1 DG of SMI of the Ministry of Industry dispatch craft Instructor to train craftsmen in SMI in Timor Leste	Kementerian Industri	1	
		47	Training	1 Training on mechanical drawing for Palestinian people to enhance capacity building of Palestine		2	
				2 DG of SMI of the Ministry of Industry provides training on weaving, furniture, bamboo, and plaiting			
				<i>Sub total</i>			3
23	Kementerian Pendidikan Nasional	48	Studi Banding	1 Modern Madrasah Model	Ceacos	4	
			2 Formal and Non-Formal Teacher Exchange Program				
			3 ICT-Based Exchanges and Resource Sharing Across E-9 Countries				
			4 Chinese Mandarin Language Teacher's Welcoming Ceremony				
		49	Beasiswa	1 Darmasiswa Scholarship Program for Myanmar Students	Kementerian Pendidikan Nasional	150	
			2 Darmasiswa Scholarship Program for Malagasy Students				
			3 Darmasiswa Scholarship Program for Malay Students				
			4 Darmasiswa Scholarship Program for Afghanistan Students				
			5 Darmasiswa Scholarship Program for South African Students				
			6 Darmasiswa Scholarship Program for Algerian Students				
			7 Darmasiswa Scholarship Program for American Students				
			8 Darmasiswa Scholarship Program for Argentinian Students				
			9 Darmasiswa Scholarship Program for Australian Students				
			10 Darmasiswa Scholarship Program for Austrian Students				

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan
			11 Darmasiswa Scholarship Program for Azerbaijani Students	Kementerian Pendidikan Nasional		
			12 Darmasiswa Scholarship Program for Bangladeshi Students			
			13 Darmasiswa Scholarship Program for Bosnia-Herzegovina Students			
			14 Darmasiswa Scholarship Program for Brazilian Students			
			15 Darmasiswa Scholarship Program for Brunei Darussalam Students			
			16 Darmasiswa Scholarship Program for Belgian Students			
			17 Darmasiswa Scholarship Program for Dutch Students			
			18 Darmasiswa Scholarship Program for Bulgarian Students			
			19 Darmasiswa Scholarship Program for Colombian Students			
			20 Darmasiswa Scholarship Program for Cote D'Ivoire Students			
			21 Darmasiswa Scholarship Program for Czech Student			
			22 Darmasiswa Scholarship Program for Chinese Students			
			23 Darmasiswa Scholarship Program for Chilean Students			
			24 Darmasiswa Scholarship Program for Danish Students			
			25 Darmasiswa Scholarship Program for Ecuadorian Students			
			26 Darmasiswa Scholarship Program for Estonian Students			
			27 Darmasiswa Scholarship Program for Filipino Students			
			28 Darmasiswa Scholarship Program for Fijian Students			
			29 Darmasiswa Scholarship Program for Finland Students			
			30 Darmasiswa Scholarship Program for Gambian Students			
			31 Darmasiswa Scholarship Program for Grenadian Students			
			32 Darmasiswa Scholarship Program for Hungarian Students			
			33 Darmasiswa Scholarship Program for Hongkongese Students			
			34 Darmasiswa Scholarship Program for English Students			
			35 Darmasiswa Scholarship Program for Iraqi Students			
			36 Darmasiswa Scholarship Program for Iranian Students			
			37 Darmasiswa Scholarship Program for Indian Students			
			38 Darmasiswa Scholarship Program for Italian Students			
			39 Darmasiswa Scholarship Program for Icelandic Students			
			40 Darmasiswa Scholarship Program for German Students			
			41 Darmasiswa Scholarship Program for Japanese Students			
			42 Darmasiswa Scholarship Program for Canadian Students			
			43 Darmasiswa Scholarship Program for Cambodian Students			
			44 Darmasiswa Scholarship Program for South Korean Students			
			45 Darmasiswa Scholarship Program for North Korean Students			
			46 Darmasiswa Scholarship Program for Costa Rican Students			
			47 Darmasiswa Scholarship Program for Kyrgyzstani Students			
			48 Darmasiswa Scholarship Program for Latvian Students			
			49 Darmasiswa Scholarship Program for Laotian Students			
			50 Darmasiswa Scholarship Program for Lithuanian Students			
			51 Darmasiswa Scholarship Program for Malagasy Students			
			52 Darmasiswa Scholarship Program for Malian Students			
			53 Darmasiswa Scholarship Program for Malay Students			
			54 Darmasiswa Scholarship Program for Egyptian Students			
			55 Darmasiswa Scholarship Program for Mexican Students			
			56 Darmasiswa Scholarship Program for Mongol Students			
			57 Darmasiswa Scholarship Program for Moldovan Students			
			58 Darmasiswa scholarship for Myanmar Students			

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan
			59 Postgraduate Scholarship Program for North Korea Students			
			60 Postgraduate Scholarship Program for Aljazair Students			
			61 Postgraduate Scholarship Program for Brunei Darussalam Students			
			62 Postgraduate Scholarship Program for Bangladesh Students			
			63 Darmasiswa Scholarship Program for Nigeria Students			
			64 Postgraduate Scholarship Program for South Africa Students			
			65 Postgraduate Scholarship Program for Afganistan Students			
			66 Darmasiswa scholarship Program for Namibia Student			
			67 Postgraduate Scholarship Program for China Students			
			68 Postgraduate Scholarship Program for Cote D'Ivoire Afganistan Students			
			69 Postgraduate Scholarship Program for Ethiopia Students			
			70 Postgraduate Scholarship Program for Fiji Students			
			71 Postgraduate Scholarship Program for Gambia Students			
			72 Postgraduate Scholarship Program for Guinea Students			
			73 Darmasiswa Scholarship Program for Norway Students			
			74 Postgraduate Scholarship Program for Guyana Students			
			75 Darmasiswa Scholarship Program for Papua New Guinea Students			
			76 Darmasiswa Scholarship Program for Palestine Students			
			77 Postgraduate Scholarship Program for Kamboja Students			
			78 Darmasiswa Scholarship for France Students			
			79 Postgraduate Scholarship Program for kenya Students			
			80 Darmasiswa Scholarship Program for Poland Students			
			81 Darmasiswa Scholarship Program for Portugal Students			
			82 Postgraduate Scholarship Program for Kolombia Students	Kementerian Pendidikan Nasional		
			83 Darmasiswa Scholarship Program for Peru Students			
			84 Postgraduate Scholarship Program for South Korea Students			
			85 Darmasiswa Scholarship Program for Pakistan Students			
			86 Darmasiswa Scholarship Program for Russia Students			
			87 Darmasiswa Scholarship Program for Romania Students			
			88 Darmasiswa Scholarship Program for New Zealand Students			
			89 Darmasiswa Scholarship Program for Senegal Students			
			90 Darmasiswa Scholarship Program for Serbia & Montenegro Students			
			91 Darmasiswa Scholarship Program for Singapore Students			
			92 Darmasiswa Scholarship Program for Slovakia Students			
			93 Darmasiswa Scholarship Program for Slovenia Students			
			94 Postgraduate Scholarship Program for Laos Students			
			95 Darmasiswa Scholarship Program for Spain Students			
			96 Darmasiswa Scholarship Program for Sri Lanka Students			
			97 Darmasiswa Scholarship Program for Solomon Islands Students			
			98 Darmasiswa Scholarship Program for Sudan Students			
			99 Postgraduate Scholarship Program for Lesotho Students			
			100 Darmasiswa Scholarship Program for Suriname Students			
			101 Darmasiswa Scholarship Program for Sweden Students			
			102 Postgraduate Scholarship Program for Madagaskar Students			
			103 Postgraduate Scholarship Program for Malaysia Students			
			104 Postgraduate Scholarship Program for Malawi Students			
			105 Postgraduate Scholarship Program for Mesir Students			
			106 Postgraduate Scholarship Program for Meksiko Students			

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan
			107 Postgraduate Scholarship Program for Muzambe Students			
			108 Postgraduate Scholarship Program for Myanmar Students			
			109 Postgraduate Scholarship Program for Namibia Students			
			110 Darmasiswa Scholarship Program for Swiss Students			
			111 Darmasiswa Scholarship Program for Syria Students			
			112 Darmasiswa Scholarship Program for Tajikistan Students			
			113 Darmasiswa Scholarship Program for Thailand Students			
			114 Postgraduate Scholarship Program for Pakistan Students			
			115 Darmasiswa Scholarship Program for Timor Leste Students			
			116 Darmasiswa Scholarship Program for Turkey Students			
			117 Postgraduate Scholarship Program for Philipina Students			
			118 Darmasiswa Scholarship Program for Ukraina Students			
			119 Postgraduate Scholarship Program for Papua New guinea Students			
			120 Postgraduate Scholarship Program for Senegal Students			
			121 Postgraduate Scholarship Program for Serbia Students			
			122 Postgraduate Scholarship Program for Seychelles Students			
			123 Postgraduate Scholarship Program for Sierra Leone Students			
			124 Postgraduate Scholarship Program for Solomon Island Students			
			125 Postgraduate Scholarship Program for Sri langka Students			
			126 Darmasiswa Scholarship Program for Uzbekistan Students			
			127 Darmasiswa Scholarship Program for Venezuela Students			
			128 Darmasiswa Scholarship Program for Vietnam Students			
			129 Darmasiswa Scholarship Program for Yemen Students	Kementerian Pendidikan Nasional		
			130 Darmasiswa Scholarship Program for Jordan Students			
			131 Darmasiswa Scholarship Program for Greece Students			
			132 Darmasiswa Scholarship Program for Zambia Students			
			133 Postgraduate Scholarship Program for Sudan Students			
			134 Postgraduate Scholarship Program for Suriah Students			
			135 Postgraduate Scholarship Program for SurinameStudents			
			136 Postgraduate Scholarship Program for Tanzania Students			
			137 Postgraduate Scholarship Program for Thailand Students			
			138 Postgraduate Scholarship Program for Turki Students			
			139 Postgraduate Scholarship Program for Uganda Students			
			140 Postgraduate Scholarship Program for Vanuatu Students			
			141 Postgraduate Scholarship Program for Vietnam Students			
			142 Postgraduate Scholarship Program for Yaman Students			
			143 Postgraduate Scholarship Program for Zambia Students			
			144 Postgraduate Scholarship Program for Zanzibar Students			
			145 Postgraduate Scholarship Program for Zimbabwe Students			
			146 Scholarship in education of Indonesian language and culture			
			147 Education Program of Master Degree for Humanities, Science, Agricultural			
			148 Education Program of Master Degree for Humanities, Science, Agricultural			
			149 Postgraduate Scholarship Program for Developing Countries			
			150 Graduate Sandwich Programs Across E-9 Countries for Teachers and Lecturers			
	50	Training	1 Namibia's Visit 2010: Development of Northern Region of Namibia	Ceacos	6	
			2 International Training Program			
			3 In-service Teacher Certification			

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan	
			4	The First International Training Course on TV Program Production and Management	Ceacos		
			5	Continuing Professional Development and Training for In Service Teacher			
			6	E-9 Network on Open and Distance Learning for Teachers			
			<i>Sub total</i>				160
24	Kementerian Pekerjaan Umum	51	Seminar/Workshop	1	The International Advanced Seminar Course on Housing Strategis for Urban Low Income Groups	2	
				2	The development of Road Deterioration model for Paved and Unpaved Roads		
		52	Training	1	The International Advance Course on Earthquake Disaster Prevention for Building Engineer	20	
				2	The International Advance Course on Integrated Technology for Housing Strategis		
				3	The International Advance Course on Earthquake Disaster Prevention for Building Engineer		
				4	The International Advance Course on Earthquake Disaster Prevention for Building Engineer		
				5	The International Advance Course on Integrated Technology for Housing Planning		
				6	The International Advance Course on Integrated Technology for Housing Strategis		
				7	The International Advance Course on Earthquake Disaster Prevention for Building Engineer		
				8	The International Advance Course on Integrated Technology for Housing Strategis		
				9	The First International Training Course in Irrigation Operation and Maintenance		
				10	The International Course on Sustainable Structural Safety Design for Building Engineers		
				11	The International Advanced Course on Integrated Technology for Housing Planning		
				12	Training on Project Cycle (Planning, Appraisal and Management on Infrastructure Project) for The Officials of Palestine		
				13	The International Advanced Course on Integrated Technology for Housing Strategis		
				14	An introductory Course in Teaching and Training Methods for Shelter Planning		
				15	The International Advanced Course on Earthquake Disaster Prevention for Building Engineers		
				16	Seminar on Appropriate Technology for Multi Story Residential Building (MSRB) in Indonesia		
				17	The International Advanced Course on Integrated Technology for Housing Planning		
				18	Road Reconstruction and Rehabilitation Training (Batch II)		

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan	
			19 Road Reconstruction and Rehabilitation Training (Batch I)	Kementerian Pekerjaan Umum			
			20 The International Course on Sustainable Structural Safety Design for Building Engineers (2003)				
			<i>Sub total</i>				22
25	Kementerian Sosial	53	Training				
			1 International Training Course on Vocational Rehabilitation for Persons with Disabilities (2007)	Jurnal ITCP (Sekretariat Negara)	2		
			2 Third Country Training Programme on Vocational Rehabilitation for Persons with Disabilities (2010)	Jurnal ITCP (Sekretariat Negara)			
			<i>Sub total</i>				2
26	Kementerian Perhubungan	54	Seminar/Workshop				
			1 The Conference of Railways of South and South East Asia	Kementerian Perhubungan	1		
			<i>Sub total</i>				1
27	Sekolah Tinggi Multi Media (MMTC) Yogyakarta	55	Training				
			1 Third Country Training Program on TV Documentary Program Production and Management	Ceacos	8		
			2 The Second International Training Course on TV Program Production and Management				
			3 The First International Training Course on TV Program Production and Management				
			4 Third Country Training Program on TV Documentary Program Production				
			5 Third Country Training Program on TV Documentary Program Production and Management				
			6 Third Country Training Program on TV Documentary Program Production and Management				
			7 Third Country Training Program on TV Documentary Program Production and Management				
			8 Third Country Training Program on TV Documentary Program Production and Management				
			<i>Sub total</i>				8
28	NAM CSSTC	56	Evaluasi				
		57	Pengiriman Tenaga Ahli				
			1 Mid-Term Evaluation of TCTP Microfinance: Site Survey to Uganda and Kenya	Ceacos	1		
			1 Participation of NAM CSSTC in the Twenty-Fourth Regular Meeting of CIRDAP Technical Committee			13	
			2 Annual Consultation Meeting on South-South Cooperation for Tsunami and Other Disaster Risk Management				
			3 Inter-Governmental Meeting of Experts to Formulate Psychosocial Programme for Rehabilitation of Tsunami Survivors				
			4 Expert Meeting on Business Incubator and Entrepreneurship Development				
			5 Expert Meeting on Formulating Basic Guideline on Microfinance				
			6 Expert Meeting on Government-Business Collaboration in Addressing WTO-Related Issues				
			7 Expert Group Meeting on Privatization and Public Private Partnership				
			8 Consultative Meeting of NAM Centres on Future Cooperation				
			9 Expert Group Meeting on Harmonizing National E-Commerce Laws				

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan
			10	Expert Meeting on Policies and Programmes towards Competitive Sustainable Development		
			11	Expert Meeting on Establishing E-Linkages among NAM Member Countries		
			12	Expert Group Meeting on Identification of Major Issues in Eradicating Poverty		
			13	Expert Group Meeting on the Establishment of NAM CSSTC Networking System		
		58	Proyek Bersama	1	Starting-up a Business to Business Cooperation in Wood Carving Industry	1
		59	Misi	1	Mission to Tanzania	3
				2	Mission on Assessment for Starting-up Sharia Scheme in Uganda	
				3	Starting-up a Business to Business Cooperation in Wood Carving Industry	
		60	Program Pendukung	1	GCSS XI/GMEF Special Event on Waste Management partnership and Exhibition	11
				2	Exhibition of NAM CSSTC during the Workshop on South-South Technical Cooperation: Indonesian Experiences	
				3	Virtual Information Sharing on Disaster Risk Management	
				4	Public Exhibition on Promotion of NAM CSSTC during UNESCAP Meeting on the Infrastructure and Disaster Areas	
				5	Public Exhibition on Promotion of NAM CSSTC during High Level Consultation on South-South Cooperation in the Context of BSP.	
				6	Public Exhibition on Promotion of NAM CSSTC during Ministerial Regional Meeting on MDGs	
				7	Public Exhibition on Promotion of NAM CSSTC during 1st Summit of NRG4SD	
				8	Public Exhibition on Promotion of NAM CSSTC during UNEP Meeting	
				9	Public Exhibition on Promotion of NAM CSSTC during AASROC Ministerial Meeting I	
				10	Public Exhibition on Promotion of NAM CSSTC during XIII NAM Summit	
				11	Manual Preparation on Development of the Information Network and Database for NAMCSSTC	
		61	Konsultasi Regional	1	Regional Consultation for the Identification of Technical Assistance Needs of Tsunami Affected Coastal Fishing Communities	1
		62	Seminar/Workshop	1	International Workshop on Enhancing South-South Cooperation Roles on Disaster Risk Management in Asia-Pacific: Focusing on Climate Change Adaptation	17
				2	Electoral Justice: A Regional Workshop	
				3	Participation at the Seminar on Poverty Eradication through Human Capital Development and Capacity Building: Financial Inclusion Advisors Programme	
				4	International Workshop on Disaster Risk Management Focusing on Strategic Planning on South-South Cooperation	
				5	Workshop on South-South Technical Cooperation: Indonesian Experiences	

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan
			6	Workshop on Electoral Dispute Resolution		
			7	International Workshop on Enhancing South-South Cooperation Roles on Disaster Risk Management in Asia-Pacific: Focusing on Climate Change Adaptation		
			8	South-South Cooperation Workshop on Waste Management, Law and Governance		
			9	South-South Cooperation Workshop on Waste Management, Law and Governance		
			10	Workshop on Development of Women Centre		
			11	Regional Workshop on South-South Cooperation for Tsunami and Other Disaster Risk Management		
			12	Regional Training Workshop on Enhancing Women's Role in SMEs Development		
			13	Planning Workshop on South-South Cooperation for Tsunami and Other Disaster Risk Management		
			14	Workshop on E-Readiness in Latin America and the Caribbean Region (Bilingual Meeting: English and Spanish)		
			15	Workshop on Micro Credit Schemes		
			16	Media and NGO Workshop on Popular Participation in Formulating Poverty Eradication Strategies and Programmes		
			17	Workshop on Promoting Small and Medium Enterprises through E-Commerce	Ceacos	
	63	Training	1	Third Country Training Programme on Microfinance for African Region: Establishing and Managing Microfinance Institution (MFI)		30
			2	Executive Training Course on Global Health Diplomacy for ASEAN Countries		
			3	Training Operational Management of Microfinance Focusing on Non-Interest Based (Sharia) Microfinance		
			4	Training on Jewelry Production		
			5	International Training Workshop on Local Economic Development through Business Development Services		
			6	Income Generation for Women in Rural Areas through Business Development Services (BDS)		
			7	18th UNCTAD Regional Course: Key Issues on the International Economic Agenda		
			8	Third Country Training Programme on Microfinance for African Region: Establishing and Managing Microfinance Institution (MFI)		
			9	Advanced Training on Wood Carving for Lao Participants		
			10	Third Country Training Programme on Microfinance for African Region: Establishing and Managing Microfinance Institution (MFI)		
			11	Training on Operational Management of Microfinance		
			12	Skill Training on Wood Carving for the LAO People's Democratic Republic		

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan	
			13 Third Country Training Programme on Microfinance for African Region: Establishing and Managing Microfinance Institution (MFI)				
			14 Training on Microfinance: Establishing and Managing Micro Finance Institution				
			15 Training on Renewable Energy: Micro Hydro Power for Rural Development				
			16 Training Workshop on Dispute Settlement Mechanism in Investment				
			17 International Training Programme on Business Incubator to Develop Small and Medium Enterprises for Asia, Africa and Pacific Countries				
			18 Capacity Building Programme for Developing-Eight (D-8) Countries on Microfinance				
			19 Third Country Training Programme on Microfinance for African Region				
			20 International (Asia Pacific) Training Course on Preparation and Analysis of Rural Development Projects				
			21 Third Country Training Programme on Microfinance for African Region				
			22 Training on Micro-Enterprise, Micro-Finance, and Marketing of Rural Products	Ceacos			
			23 Third Country Training Programme on Microfinance for African Region				
			24 Training on Information and Communication Technology Networking Establishment				
			25 IDB/WTO Trade Policy Course				
			26 Training on Appropriate Mechanization and Water Management for Dryland Agriculture				
			27 Regional Training on Microfinance for Practitioners in South and Central Asia Region				
			28 Regional Training on Micro Credit Scheme in Southern Africa Region				
			29 Regional Training on Micro Credit Scheme for East Asia and the Pacific Region				
			30 International Training Course on Information Technology Education Methodology				
			<i>Sub total</i>				77
29	Balai Besar Diklat Agribisnis Persusuan dan Teknologi Hasil Ternak, Batu-Malang, Jawa Timur	64	Training	1 The Third ASEAN Training Course On Dairy Husbandry Technology	Balai Besar Diklat Agribisnis Persusuan dan Teknologi Hasil Ternak	1	
				<i>Sub total</i>			1
30	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional	65	Training	1 Third Country Training Programme on Geoinformation for Decision Support System on Natural Hazard Management	Jurnal ITCP (Sekretariat Negara)	1	
				<i>Sub total</i>			1
31	PT. Perkebunan Nusantara VIII	66	Pertemuan Tenaga Ahli	1 Promotion in Tea Industry	Jurnal ITCP (Sekretariat Negara)	1	
				<i>Sub total</i>			1

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan		
32	Pusat Pelatihan Sabo Yogyakarta	67	Training	1 The International Training Course on Sabo Engineering and Water Induced Disaster Countermeasures	Ceacos	14		
			2 The International Training Course on Sabo Engineering and Water Induced Disaster Countermeasures					
			3 The 12th International Training Course on Sabo Engineering					
			4 The 11th International Training Course on Sabo Engineering					
			5 The 10th International Training Course on Sabo Engineering					
			6 The 9th International Training Course on Sabo Engineering					
			7 The 8th International Training Course on Sabo Engineering					
			8 The 7th International Training Course on Sabo Engineering					
			9 The 6th International Training Course on Sabo Engineering					
			10 The 5th International Training Course on Sabo Engineering					
			11 The 4th International Training Course on Sabo Engineering					
			12 The 3th International Training Course on Sabo Engineering					
			13 The 2nd International Training Course on Sabo Engineering					
			14 The 1st International Training Course on Sabo Engineering					
			<i>Sub total</i>				14	
33	Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	68	Bantuan Peralatan	1 Assistance in form of agricultural machinery: hand tractor, Tanzania : 12 unit, Sudan : 12 unit, Gambia : 12 unit; Tonga:13 unit; Samoa: 12 unit	Kementerian Pertanian	3		
			2 Assistance in form of agricultural machinery for Timor Leste (13 unit hand tractor, 5 unit water pump, dan 3 unit rice milling) and Laos (12 unit hand tractor)					
			3 Assistance in form of agricultural machinery : PNG - hand tractor 15 unit dan power tresher 15 unit, Myanmar - rice milling 10 unit, Cambodia - hand tractor dan power tresher 15 unit					
		69	Pengiriman Tenaga Ahli	1 Dispatch of machinery expert to Tanzania and Sudan		1		
		70	Magang	1 Apprenticeship Program for Asia and african Farmers in Indonesia		1		
		71	Training	1 Promotion of Smallholder Rice Production Development		1		
			<i>Sub total</i>				6	
34	Sekretariat Negara	72	Studi Banding	1 Technical Exchange Study Team on the Community Driven Development and Local Governance from Afghanistan	Ceacos	2		
			2 The Technical Exchange Study Team on Education Administration and Decentralization					
		73	Bantuan Peralatan	1 Intersectoral Support in Mother and Child health through MCH Handbook Implementation			1	
		74	Training	1 Training of Trainer for Participatory Training Program on Agricultural Extension Methodology			22	
				2 Third Country Training Programme on Establishing and Managing Microfinance for African Region				
				3 Third Country Training Programmme on Capacity Building for Poverty Reduction				
				4 The 2nd International Training Course in Information Technology-Based for Electric Engineering Education				

No	Institusi	Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber Data	Jumlah Kegiatan	Sub Total Kegiatan	
			5 International Training Course on Managing Information, Education and Communication for Family Planning/Reproductive Health: Indonesian Experiences				
			6 Third Country Training Course of Artificial Insemination on Dairy Cattle				
			7 TCTP on Tree Improvement for Fast Growing				
			8 TCTP on Integrated Maternal, Neonatal and Child Health Services with Mother and Child Health Handbook in the Era of Decentralization				
			9 ASEAN Training Course on Post Harvest Technology on Fruits and Vegetables				
			10 International Training Course on Geo-Information System for Natural Hazard Management and Disaster Reduction				
			11 Third Country Training Programme on Micro Finance for African Region				
			12 Third Country Training Course of Artificial Insemination on Dairy Cattle				
			13 The ITC on Information Technology-Based for Electric Engineering Education				
			14 The Third Country Training Programme on TV Programme Production Using Digital Technology	Ceacos			
			15 The TCTP on Forest Tree Improvement for fast Growing Species				
			16 Third Country Training Programme on Hatchery and Mariculture Technology on Grouper Species				
			17 International Training Course on Managing Information, Education and Communication for Family Planning/Reproductive Health: Indonesian Experiences				
			18 International Training Course on Quality Assurance of Live Attenuated Polio and Measles Vaccine				
			19 The International Training Course on Advance Veterinary Drug Quality Control				
			20 Third Country Training Programme on Capacity Building for Poverty Reduction (2007)				
			21 The Training programme for Young Leaders JFY 2010				
			22 Third Country Training Programme on Integrated Maternal Neonatal and Child Health (MNCH) Services with Mother and Child Health Handbook (MCH) in The Era of Decentralization (2010)				
			<i>Sub total</i>			25	
	Grand Total					712	

Jumlah Data Kerjasama Ekonomi Terinput

No	Kegiatan Forum
1	2nd East Asia Ministerial Forum on Families
2	Regional Workshop on Family Planning and Reproductive Health)
3	<i>Real-Sharing Workshop for Consultants on Reproductive Health</i>
4	Course in Supply Chain Management
5	The 7th Session of Joint Commission on Economic and Trade Cooperation
6	The 8th Session of Joint Commission on Economic and Trade Coopetion
7	The 9th Session of Join Commission on Economic and Trade Cooperation
8	The Sixth Session of The Joint Commission with Tunisia
9	The Seventh Meeting of Joint Commission with Tunisia
10	The Eight Meeting of The joint Bilateral Commission
11	The Ninth Joint Commission Meeting
12	The First Meeting of The Joint Study Group for Trade and Economic Cooperation
13	The Second Meeting of The Joint study Group For Trade and Economic Cooperation
14	The First Meeting of The Joint Bilateral Commission
15	The First SKB on Ministerial level Indonesia - Sudan
16	The First TNC (Trade Negotiating Committee) Indonesia - Pakistan
17	The Second TNC (Trade Negotiating Committee) Indonesia - Pakistan
18	The Third TNC (Trade Negotiating Committee) Indonesia - Pakistan
19	The Fourth TNC (Trade Negotiating Committee) Indonesia - Pakistan
20	The Fifth TNC (Trade Negotiating Committee) Indonesia - Pakistan
21	The Sixth TNC (Trade Negotiating Committee) Indonesia - Pakistan
22	The 1st Meeting of the India - Indonesia Joint Study Group on the Feasibility Study of Indonesia - India Comprehensive Economic Cooperation Aggrement (II_CECA)
23	The 2nd Meeting of the India-Indonesia Joint Study Group on the Feasibility Study of II_CECA
24	The 3rd Meeting of the India - Indonesia Joint Study Group on the Feasibility Study of II - CECA
25	The 4th Meeting of the India - Indonesia Joint Study Group on the Feasibility Study of II - CECA
26	The 5th (Final) Meeting of The India - Indonesia Joint Study Group on the Feasibility Study of II - CECA
27	The First Indonesia - Bangladesh Joint Commission Meeting
28	The Second Indonesia - Bangladesh Joint Commission Meeting
29	Working Group on Trade and Investment Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation - Sri Lanka
30	The 18th Joint Border Committee PNG
31	The 2nd Meeting on the Review of Basic Agreement on Border Arrangements - Papua New Guinea
32	The 20th Joint Border Committee - Papua New Guinea
33	The 1st Joint Ministerial Commission - Papua New Guinea
34	The 25th Joint Border Committee - Papua New Guinea
35	The 6th Border Liaison Meeting - Papua New Guinea
36	The 26th Joint Border Committee - Papua New Guinea
37	The 7th Border Liaison Meeting - Papua New Guinea
38	The 27th Joint Border Commission - Papua New Guinea
39	The 2nd Joint Minister Commission - Papua New Guinea

No	Kegiatan Forum
40	The 1st Joint Ministerial Commission - Timor Leste
41	The 1st Joint Border Committee - Timor Leste
42	The 2nd Joint Ministerial Commission - Timor Leste
43	Special Meeting of Joint Border Committee - Timor Leste
44	The 3rd Joint Ministerial Commission - Timor Leste
45	The 2nd Joint Border Committee - Timor Leste
46	The 4th Joint Ministerial Commission - Timor Leste
47	Scorecard Senior Official Meeting of The Joint Ministerial Commission - Timor Leste
48	The 6th Indonesia - Australia Ministerial Forum
49	The 3rd Trade ministerial - Australia
50	The 7th Indonesia-Australia Ministerial Forum
51	The 6th Trade Minister Meeting - Australia
52	Working Group on Trade and Investment (WGTII) - Australia
53	The 7th Trade Minister Meeting - Australia
54	The 7th Trade Minister Meeting - Australia
55	The 2nd Joint Feasibility Study Indonesia - Australia Free Trade Agreement
56	the 9th Indonesia - Australia Ministerial Forum
57	The 3rd Joint Feasibility Study Indonesia - Australia Free Trade Agreement
58	The 8th Trade Minister meeting - Australia
59	Working Group on Trade and Investment (WGTII) - Australia
60	The 15th Working Group on Agriculture Food and Forestry Cooperation (WGAFFC) - Australia
61	Bali Congress 2001 - Brazil
62	The 1st SKB Indonesia - Brazil
63	The 3rd Bilateral Consultative Forum Indonesia - Brazil
64	The 2nd SKB Indonesia - Brazil
65	The 1st SKB Indonesia - Argentina
66	The 2nd SKB Indonesia - Argentina
67	The 3rd SKB Indonesia - Argentina
68	The 1st JGS FTA Indonesia - Chile
69	The 2nd JGS FTA Indonesia - Chile
70	The 3rd JGS FTA Indonesia - Chile
71	The 1st SKB Indonesia - Chile
72	Roundtable Discussion, theme : "Doing Business with Columbia"
73	The 1st Indonesia - Peru of Bilateral Consultative Forum
74	The 1st FKB and SKB Indonesia - Ecuador
75	First Meeting of Hight Level Joint Commission antara Indonesia - Venezuela
76	Joint Commission Meeting of Indonesia and Venezuela
77	Second Meeting of High Level Joint Commission between Indonesia - Venezuela
78	The 1st SKB Indonesia - Cuba
79	The 2nd SKB Indonesia - Cuba
80	The 3rd SKB Indonesia - Cuba
81	The 4th SKB Indonesia - Cuba
82	The 5th SKB Indonesia - Cuba
83	SKB Indonesia - Paraguay
84	The 5th SKB Indonesia - Suriname
85	The 4th SKB Indonesia - Suriname

No	Kegiatan Forum
86	The 3rd SKB Indonesia - Suriname
87	The 2nd SKB Indonesia - Suriname
88	The 1st SKB Indonesia - Suriname
89	The 10 Session of Joint Commission on Economic and Trade Cooperation RI-
90	The 1st Trade Negotiating Committee RI-Iran
91	The 6th Session of The Joint Commission RI-Irak
92	The 8th Session of Joint Commission Meeting RI-Arab Saudi
93	The 3th Session of joint commission on Trade and Economic between RI-
94	The 1st Joint Ministerial Commission RI-Yaman
95	Joint commission RI-Kuwait
96	The 1st Session of The Joint Commission (of SOM) RI-Algeria
97	The 1st Joint Ministerial Commission (JCM) RI-Algeria
98	The fifth Meeting of Joint Commission RI-Egypt
99	The 2nd Joint Commission RI-Mozambique
100	Joint Trade Committee RI-South Africa
101	The 1st Joint Trade Committee RI-South Africa
102	The 1st Joint Trade Committee RI-Namibia
103	Joint Commission RI-Kenya
104	Joint commission RI-Swaziland
105	Joint Commission RI-Libya
106	The 9th Joint Commission Meeting RI-Tunisia
107	The 1st Joint Commission RI-Marocco
108	The 1st Joint Commission RI-Sudan
109	RI-Ecuador the 1st of Bilateral Consultative Forum
110	9th Intrenational Furniture & Design Exhibition and Awards 2010

Sumber: Data dari Kementerian Perdagangan

Data Perjanjian Berdasarkan Jenis Kerjasama

No	Jenis Kerjasama	Total	Keterangan
1	Perjanjian Internasional (Kerjasama Bilateral)	657	Sumber: Website Kementerian Luar Negeri (www.kemlu.go.id)
2	Kerjasama Multilateral	9	
3	Kerjasama Triangular		
4	Kerjasama Regional	15	
	Total Jumlah Data	681	

NOTULEN RAPAT

- 1. RUANG RAPAT BAPPENAS, 13 JANUARI 2011**
- 2. BANDUNG, 14 JANUARI 2011**
- 3. HOTEL MANDARIN, JAKARTA, 4 FEBRUARI 2011**
- 4. HOTEL NIKKO, JAKARTA, 16 FEBRUARI 2011**
- 5. HOTEL SANUR PARADISE, BALI, 27 FEBRUARI – 1 MARET 2011**
- 6. HOTEL FOUR SEASON, JAKARTA, 8 MARET 2011**
- 7. HOTEL ASTON, BOGOR, 11 – 12 MARET 2011**
- 8. HOTEL KEMPINSKI INDONESIA, 31 MARET 2011**

NOTULEN RAPAT

PERTEMUAN TIM TEKNIS KSS

Tempat : Ruang Rapat Bappenas
Tanggal : 13 Januari 2011
Waktu : 09.00 -12.00 WIB

- Pertemuan dibuka dan dipimpin oleh Dewo Broto Joko Putranto (Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Bappenas) dengan menjelaskan sejarah pengembangan KSS Indonesia, yang diawali dengan Komitmen Jakarta, kemudian diikuti dengan Deklarasi Paris dengan tujuan penekanan pada efektifitas bantuan, terutama pada Kerjasama Selatan-Selatan, akhirnya Pemerintah memutuskan untuk memasukkan KSS RPJMN 2010-2014. Hanya melalui jalan ini, KSS Indonesia dapat dengan serius dikembangkan.
- Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan JICA telah melaksanakan sebuah studi awal tentang KSS yang dilaksanakan oleh Universitas (CEACoS). CEACoS telah membuat sebuah prototipe database untuk KSS Indonesia dan melakukan kompilasi data dan informasi terkait dengan kegiatan KSS Indonesia.
- Dikarenakan kegiatan-kegiatan terkait KSS tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri, maka data-data tersebut tersebar dan perlu untuk ditata dengan baik. Karenanya diperlukan pelaksanaan langkah-langkah berikut: (i) pengumpulan data mengenai semua aktivitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia maupun yang dilaksanakan oleh Mitra Pemerintah Indonesia; (ii) pengumpulan informasi mengenai program-program unggulan di tiap Kementerian; (iii) menentukan nilai tambah dari program unggulan tersebut untuk mendukung pengembangan KSS Indonesia.
- Sebuah seminar nasional telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2010. Dalam seminar ini disepakati bahwa diperlukan sebuah kerangka hukum yang dapat menjembatani penguatan kerjasama ekonomi dengan bersinergi terhadap kerjasama teknik yang diharapkan dapat berimbas pada peningkatan perdagangan dan diplomasi internasional.
- Pertemuan sebelumnya yang terkait dengan pengembangan KSS Indonesia telah dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2010, 18 dan 30 Nopember 2010; dan 20 Desember 2010, menghasilkan pembentukan Tim Koordinasi KSS Indonesia yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat.
- Tim Koordinasi KSS Indonesia bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi strategis, memfasilitasi, dan mendiseminasi yang terkait dengan upaya penguatan KSS Indonesia dan tidak akan mengambil-alih atau menyaingi program-program yang sudah dikembangkan oleh Kementerian/Lembaga.
- Dengan mengembangkan KSS Indonesia, Pemerintah Indonesia mengharapkan untuk mendapatkan banyak manfaat, khususnya dalam bentuk nilai tambah ekonomi, bukan hanya sekedar berupa donasi dalam pelaksanaan KSS nantinya.

Sesi Diskusi

1. Ahmad Rofi'i (NAM CSSTC Center)

- Diperlukan juga pengumpulan data mengenai tenaga ahli yang pernah terlibat dalam program-program KSS Indonesia.
- Diperlukan sistem database yang bisa diakses secara lintas sektoral sehingga memudahkan bagi para pemangku-kepentingan dalam mengakses informasi KSS tersebut.
- Bagi NAM CSSTC, informasi mengenai sumber pembiayaan akan berbeda dengan Kementerian/Lembaga lainnya karena NAM CSSTC sendiri merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki sistem pendanaan tersendiri yang berbeda dengan pendanaan Kementerian/Lembaga.

Jawaban Pak Dewo:

- Pengumpulan data mengenai tenaga ahli sangat diperlukan dan akan dilakukan sebagai referensi untuk program-program yang akan datang.
- Tim dari Konsultan akan melakukan pembuatan database dan sistem informasi. Sistem Database lintas sektoral akan dilaksanakan secara bertahap.
- Pada kolom anggaran dapat ditambahkan berdasarkan sistem pendanaan masing-masing institusi.

2. Andi (Kementan)

- KSS yang telah dilaksanakan oleh Kementan memberikan banyak sekali dampak positif. Salah satunya dengan memberikan pelatihan dalam hal teknologi pertanian, beberapa negara yang mengikuti pelatihan membeli beberapa peralatan dan mesin pertanian dari Indonesia.
- Pada prinsipnya Kementan akan mendukung Bappenas dalam pengumpulan data dan informasi terkait dengan kegiatan KSS.

3. Theodora (Direktur Kerjasama Internasional - BKKBN)

- BKKBN memiliki 5 program unggulan yaitu Keluarga Berencana terutama terkait dengan peran Kepala Keluarga dalam Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan (Colombo Plan), Keamanan Komoditas Kesehatan Reproduksi dan Monitoring dan Evaluasi Pasca Kelahiran dan Promosi lewat Media TV.
- Tentang anggaran, sangatlah sulit untuk mendapatkan data yang aktual mengenai anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan training, karena sebagian besar didanai oleh Donor.
- BKKBN memberikan perhatian yang lebih terhadap monitoring dan evaluasi yang akan dilaksanakan, jenis evaluasi yang bagaimana yang diperlukan oleh Tim Teknis?
- Berdasarkan pengalaman ke Cina yang selalu memperkenalkan potensi pariwisata mereka di setiap acara dan event, sangatlah penting untuk melibatkan Kementerian Pariwisata dalam KSS Indonesia.

Jawaban Pak Dewo:

- Program unggulan BKKBN dapat lebih dikembangkan dalam kegiatan KSS Indonesia.
- Terkait dengan informasi anggaran untuk kepentingan database, dapat diberikan dalam bentuk estimasi anggaran karena informasi tersebut bukanlah untuk kepentingan audit, tetapi hanya untuk kepentingan estimasi donasi yang diberikan melalui program-program yang sudah terlaksana.
- Monitoring dan evaluasi (monev) diperlukan dalam penilaian sebuah program, apakah program tersebut sukses atau tidak dan untuk mencari strategi yang tepat agar kesinambungan program dapat terjaga, serta untuk mengevaluasi dampak program. Dengan melaksanakan monev, maka berdasarkan *lesson-learned* akan dengan mudah menetapkan program unggulan di masa yang akan datang.
- Terkait dengan melibatkan Kementerian pariwisata, merupakan suatu usulan yang sangat baik, agar semua komponen bangsa dapat dilibatkan dalam rangka mendukung suksesnya KSS Indonesia.

4. Daryanto (Direktorat Kerjasama Teknik, Kemenlu)

- Diperlukan persepsi yang sama mengenai pentingnya KSS, dikarenakan sangat sulit untuk menghitung manfaat ekonomi bantuan yang telah diberikan oleh Indonesia kepada negara-negara Selatan.
- Kemenlu memiliki data kerjasama teknik sejak 2006-2010.

5. Fachrurozi (Sekretariat Negara)

- Beliau setuju dengan konsep baru KSS dimana Pemerintah Indonesia harus mendapatkan manfaat secara ekonomi dari sebuah kerjasama, tidak hanya sekedar kegiatan amal untuk negara-negara Selatan.
- Kementerian/Lembaga yang memiliki program-program yang berpotensi harus dilibatkan seperti Kementerian PU dan Kementerian Pertanian.
- Diperlukan juga format database untuk program-program yang sedang dan akan dilaksanakan, bukan hanya untuk program-program yang telah dilaksanakan.

6. Rendra (Kemenlu)

- ASEAN sudah memiliki Cetak Biru, mungkin beberapa strategi dapat diadopsi dari ASEAN seperti dalam hal pembiayaan dan perencanaan teknis.
- Terkait dengan Konferensi GNB pada 23-27 Mei 2011, akan sulit untuk memasukkan agenda baru ke dalam acara, mengingat acara sudah didesain sedemikian rupa dan padat. Lebih baik untuk melakukan pertemuan paralel untuk KSS. Dari 60 negara peserta yang merupakan partner, ada sekitar 11 negara yang bukan anggota GNB.

7. Junaidi & Edward (Kemendag)

- Apakah yang menjadi visi dan misi kerjasama ini? Apakah fokusnya pada kerjasama ekonomi atau kerjasama politik?
- Diperlukan penguatan dalam hal investasi untuk mengembangkan konsep kerjasama ekonomi pada KSS Indonesia dan untuk mengembangkan pasar pada negara-negara Selatan.
- Apakah Tim Koordinasi bersifat “ad hoc” atau merupakan kelembagaan yang permanen? Jika merupakan Tim “ad hoc”, bagaimana pengembangan KSS Indonesia ke depannya?
- Diperlukan indikator/parameter yang jelas dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu program.

Jawaban Pak Dewo

- KADIN akan dilibatkan untuk mendapatkan informasi tentang kerjasama ekonomi termasuk investasi yang sudah dilakukan di negara-negara selatan, karena kerjasama ekonomi akan menjadi prioritas KSS Indonesia.
- Untuk menyamakan persepsi tentang konsep KSS Indonesia akan difasilitasi dengan melakukan konsensus nasional.
- Indikator diperlukan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan

8. Adik Bantarso

- Akan lebih baik dalam aplikasi database jika NAM Center tidak dimasukkan ke dalam kelompok Kementerian/Lembaga, tetapi dalam kategori Mitra, karena sebagai suatu Lembaga Internasional, NAM Center memiliki fungsi dan sumber pendanaan yang berbeda dengan Kementerian/Lembaga. Walaupun NAM Center merupakan suatu Lembaga Internasional, tetapi Direktornya tetap harus orang Indonesia.
- Konsep pengembangan KSS Indonesia harus diputuskan apakah akan berfokus pada penguatan kerjasama teknik atau kerjasama ekonomi. Dari format yang disiapkan oleh Bappenas, terlihat ditujukan untuk kerjasama teknik. Dapat ditambahkan kolom-kolom untuk jenis program, tenaga ahli, jenis bantuan (pelatihan atau peralatan) dan beasiswa.
- Perlu juga ditambahkan dengan slot tentang pertanyaan terpopuler (FAQ) pada sistem informasi KSS Indonesia.

9. Rendra (MOFA)

- Pengumpulan data tentang tenaga ahli sangat diperlukan.
- Perlu juga dimasukkan tentang kerjasama di bidang sosial budaya dan lingkungan hidup.
- Fokus KSS Indonesia harus ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Pak Dewo:

Pada dasarnya fokus KSS Indonesia adalah penguatan kerjasama teknis yang akan mendukung pengembangan kerjasama ekonomi.

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Januari 2011
 Pukul : 09.00 WIB – selesai
 Tempat : Ruang Rapat Soegijanto Sugijoko 4, Bappenas
 Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta
 Perihal : Pembahasan Koordinasi Pengembangan Kerjasama Selatan - Selatan

No.	Nama	Jenis Kelamin L/P	Instansi	No. Telp./Fax	Email	Paraf
1.	Adik BANDORO	X	—	08161910619		
2.	A, ROFIIE	X	NAM CSSTC	0816900559	achmadrofie@yahoo.com	
3.	RENORA K.	X	Sosbud & Omb Keml	081802715833	renoraswara@indone.com	
4.	Endang Soesilowaty	X	Dit. Kerjasama APEC EOI	081629494821	endangakong@yahoo.com	
5.	Uzaimah.	X	PT. INDOKOEI	08567319530	uzaimah@indokoei.co.id	
6.	Rina	X	PT. Indokoei	085716004446	Rina@indokoei.co.id	
7.	Kostanna.	X	Multitaper Bappenas	2160159	stanipaf.rca@bappenas@gmail.com	
8.	Agustin Yanna	X	Bappenas			
9.	Everdy Sihara	X	Dit. PH, NIPU	3811428		
10.	Dodi R.	X	Dit PH, DA PU	3811428	dodirhd@gmail.com	
11.	Theodora P	✓	Polin, BRKBV	08161584408	doci_p@politeknika.ac.id	
12.						
13.	Sheila K	✓	PKLN, Kemkes	08129186373	pusat-ksn@gmail.com	
14.	Andy Jaya-D.	✓	PKLN, KEMTAN	0818656476	andyjaya@deptan.go.id	
15.	Ratna S	✓	PKLN, Kemtan	08129581834	ratna.s@deptan.go.id	
16.	Fajar Tri Y	✓	PKLN, Kemhut	5730159	fajartriyan@ymail.com	
17.	Depot T. Hananja	✓	PEKES, kemenkeu	345-1090	depot.hananja@gmail.com	
18.	Hendrawan Tri S	✓	BKF, Kominfo	3451090	hendrawan@deptan.go.id	
19.	Davianto H	✓	KST, Kemenuk	3516495		
20.	M. FAHROZI	✓	Dit. KTR, Sahag	3914477	mukhammad.fahrozi@ptcl.com	
21.	M. Iqbal	✓	—	3914477		
22.	Edward	✓	Dit. AOl, Ditjen KPI, Kemendag	3254560 3858195	edward_indonesia2005@yahoo.com	
23.	Junari I. WASKITU	X	Dit. Kerjasama Multilateral	087808692753	waskitodjunari@yahoo.com	
24.	Theresia N	✓	Multi - Bappenas	3160159		
25.	TRI HERU R	✓	Kem Keminfo	3835800	traherrie@keminfo.go.id	

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Januari 2011
 Pukul : 09.00 WIB – selesai
 Tempat : Ruang Rapat Soegijanto Sugijoko 4, Bappenas
 Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta
 Perihal : Pembahasan Koordinasi Pengembangan Kerjasama Selatan - Selatan

No.	Nama	Jenis Kelamin L/P	Instansi	No. Telp./Fax	Email	Paraf
26.	Ary Budi Sulisty	✓	Kemkominfo (Biro Perencanaan)	021-3842383	arbud@psitel.go.id	
27.	Esi B. Swara	✓				
28.	Mulya	✓	Kemen PU (Buletin)	021 726309	infotek@pu.go.id	
29.	Pudjianto	✓	Dit. Ks. AD&S DIC	08121361426	pjyanb@yahoo.com	
30.						
31.						
32.						
33.						
34.						
35.						
36.						
37.						
38.						
39.						
40.						
41.						
42.						
43.						
44.						
45.						
46.						
47.						
48.						
49.						
50.						

Mengetahui
Project Manager ECBAM

Miranda Tahalele

Jakarta, 13 Januari 2011
Dibuat Oleh

Sahidin

NOTULEN RAPAT

PERTEMUAN TIM TEKNIS KSS

Tempat : Hotel Swiss Bell Bandung
Tanggal : 14 Januari 2011
Waktu : 10.00 -24.00 WIB

- Rapat ini dipimpin oleh Dewo Broto Joko Putranto (Direktur Pendanaan Luar Negeri of Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas).
- Dalam pidato pembukaannya, Pak Dewo menjelaskan tentang latar belakang Kerjasama Selatan-Selatan dan sinerginya terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014. Lebih lanjut, Beliau menjelaskan bahwa atas arahan dari Tim Pengarah agar draf *Grand Design* Kerjasama Selatan-Selatan harus selesai dalam 2 bulan ke depan. Namun, Beliau menekankan pentingnya untuk menyelesaikan draf *Grand Design* tersebut sebelum 28 Februari 2011. Hal ini dilakukan agar memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi Tim untuk mempersiapkan Lokakarya Regional Kerjasama Selatan-Selatan yang akan dilaksanakan di Bali tanggal 28 Februari – 1 Maret 2011. Pak Dewo, juga menggaris-bawahi tentang pentingnya sistem informasi dan format awal tentang database yang diperlukan telah dibagikan ke semua anggota Tim Teknis dan meminta agar Kementerian dan Insitutsi terkait agar melengkapi format tersebut hingga akhir Januari 2011.
- Dalam presentasinya sebelum pembahasan mengenai draf *Grand Design* yang telah dibuat oleh Pak Adik Bantarso Bandoro, Beliau menegaskan bahwa fokus dari Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia ini adalah pada penekanan peningkatan kerjasama ekonomi yang akan mendukung program-program pembangunan. Grand Design juga harus mencakup kerangka hukum, kerangka kelembagaan, program-program komperatif, kerangka finansial dan database. Bahan presentasi Beliau seperti terlampir pada Lampiran 1.
- Adik Bantarso Bandoro memulai presentasinya menjelaskan tentang lingkungan strategis Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia, yang disebut Beliau dengan “*Kompas KSS Indonesia*”. Kemudian, Beliau menjelaskan tentang rasional penyusunan draf *Grand Design*/Cetak Biru adalah karena sudah tercantum dalam RPJMN 2010-2014 dan merupakan hasil kajian CEACoS UI tentang “Arah Kebijakan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan” yang didanai oleh JICA.
- Adik Bantarso Bandoro membagi draf tersebut dalam 3 bagian:
 - 1) Bagian 1. Grand Design KSS Indonesia;
 - 2) Bagian 2. Cetak Biru / Rencana Aksi KSS Indonesia; dan
 - 3) Bagian 3. Kerangka Kelembagaan KSS Indonesia.

Untuk memfasilitasi pembahasan, Pak Adik memberikan beberapa alternatif usulan untuk visi dan misi KSS Indonesia.

Ringkasnya, Bagian 1 berisikan penjelasan mengenai skema, kerangka kebijakan, strategi dan lingkup KSS Indonesia. Sementara Bagian 2, memuat tentang rencana aksi KSS Indonesia. Bagian 3 menjelaskan tentang kerangka kelembagaan KSS Indonesia termasuk koordinasi pada periode

transisi yang diusulkan untuk dilaksanakan oleh Forum “Ad Hoc” KSS Indonesia, yang merupakan Tim Koordinasi KSS Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Detil materi presentasi dan ketiga draf tersebut seperti yang tercantum dalam Lampiran 2 dan 3.

- Peserta rapat menyetujui bahwa ketiga draf yang disiapkan oleh Pak Adik lewat penunjukan Tim Konsultan yang didanai oleh JICA tersebut merupakan Studi Empiris dan Latar Belakang (Studi Awal) bagi KSS Indonesia, akan menjadi dokumen inti dan referensi dalam menyiapkan Grand Design KSS Indonesia. Disepakati pula bahwa ketiga draf tersebut akan digabungkan menjadi satu format Grand Design yang telah disepakati dalam pertemuan ini. Pimpinan Sidang (Pak Dewo) meminta Pak Adik dan tim Konsultan untuk bekerja berdasarkan format yang telah disepakati dan menggabungkannya dengan input dan rekomendasi dari para peserta.
- Ibu Siliwati (Bappenas) menyatakan bahwa diperlukan adanya rentetan pertemuan Tim Teknis untuk mengkonsolidasikan lebih lanjut mengenai beberapa isu yang belum sempat dibahas pada pertemuan di Bandung ini serta untuk mengkoordinasikan dan memfinalkan draf ini. Beliau juga merekomendasikan untuk selanjutnya mengundang teman-teman dari Kemenlu sebagai *resource persons*.
- Pak Ronald Manik dari Kemenlu mengusulkan untuk memasukkan isu-isu mengenai lingkungan seperti perubahan iklim, krisis ekonomi dunia dan isu mengenai ketahanan pangan dalam Grand Design dan penekanan tentang perlunya dukungan dana dari Pemerintah dalam Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia.
- Bappenas menyiapkan matrik perbandingan antara draf Grand Design dan Cetak Biru yang disusun oleh Pak Adik Bantarso dan input, masukan dari peserta rapat untuk mempermudah dalam penyempurnaan draf dokumen tersebut. Akhirnya pada pertemuan tersebut, diputuskan visi KSS Indonesia ke depan adalah “Kemitraan yang Lebih Baik untuk Kesejahteraan”, sedangkan misi dari Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia adalah:
 1. Meningkatkan solidaritas dan kemandirian bersama Selatan-Selatan melalui kemitraan dengan memanfaatkan potensi nasional.
 2. Mengembangkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara Selatan.
 3. Mengembangkan kerjasama teknik, sosial budaya dan iptek dengan negara-negara Selatan.
 4. Meningkatkan pelaksanaan diplomasi Indonesia dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral, regional, multilateral dalam berbagai bidang untuk mencapai kepentingan nasional.
- Mr. Ronald Manik dari Kemenlu menginformasikan bahwa akan diadakan Pertemuan Tingkat Pejabat Senior (*Senior Official Meeting/SOM*) terkait dengan Gerakan Non Blok pada bulan Mei 2011 kepada peserta pertemuan. Seperti yang telah disepakati pada pertemuan pertama Tim Teknis bahwa Indonesia akan menggelar sebuah pertemuan meja bundar sebagai event sampingan dari SOM tersebut. Melalui pertemuan meja bundar tersebut, Indonesia diharapkan memiliki kesempatan untuk menjelaskan tentang arah baru Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia yang sekarang sedang dibuat draf nya oleh Tim Teknis. Pertemuan merupakan pertemuan terbuka.

- Di bagian akhir, Pak Choesni dari Task Team-SSC memberi penjelasan singkat kepada peserta mengenai persiapan Semiloka Regional tentang kerjasama Triangular (*Regional Workshop on Triangular Cooperation*) yang dijadwalkan akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 28 Februari – 1 Maret 2011. Dan seperti disarankan oleh beberapa peserta, Pak Choesni akan mempertimbangkan untuk mengundang Tim Teknis untuk hadir pada workshop tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai pengembangan kerjasama.
- Akhirnya Pak Dewo menutup pertemuan dengan menyampaikan rasa terima kasih kepada semua peserta yang hadir serta partisipasi dan input mereka terhadap draf Grand Design. Beliau juga meminta agar semua anggota Tim Teknis memberikan komentar secara tertulis terhadap draf yang telah disusun oleh Pak Adik Bantarso.
- Pertemuan berikutnya dijadwalkan pada 2 minggu kemudian.

Project Title : Enhancing Capacity for Better Aid Management (ECBAM)
 Award Id : 00051205
 Project No. : 00063643, 00063681, 00063682, 00063683

DAFTAR HADIR
KONSINYERING TIM PELAKSANA KERJASAMA SELATAN - SELATAN
ARION SWISS- BELHOTEL, BANDUNG
TANGGAL 15 JANUARI 2011

No.	Nama	Jenis Kelamin		Instansi	Telp. / HP No.	Email	Tanda Tangan
		L	P				
1	Dewo Brotojolo	✓					1.
2	RONARO Y.P. ANAK	✓		KEMLU	0813099720	ronaroad50@yahoo.co	2.
3	WAHDI S.A. YUDHI	✓		KEMDIDIKNAS	0856882325	2_wyudhi@gmail.com	3.
4	SILWANANTI		✓	BAPPENAS			4.
5	Amri K.S.	✓		KTLN, Setreg.	0811 90 2675	amriksawan@gmail.com	5.
6	Ade Kusum	✓		Dxippan	0851030042		6.
7	Sudjiyanto	✓		DITAPC & OIL KEMDAG	08113614267	piyanto@yahoo.com	7.
8	Endang Soesilowaty		✓	PT. APCC & OIL, KEMDAG	0812949821	endangkong@yahoo.com	8.
9	Andy Jaya Dermawati	✓		PKLN, KEMTAN	0818656476	andyjaya.dermawati@gmail.com	9.
10	Agustin Yama		✓	Bappenas		agustinyama@yahoo.com	10.
11	Eddy Slam	✓		BALUBA	0818955100		11.
12	Ratna Siregar		✓	PKLN, Kemtan	08129581834	ratna.siregar@pkln.go.id	12.
13	Meknan	✓		PT IndoKoei	083 828 11591	meknan@yahoo.com	13.
14	Otho H. Hal	✓		Dit Polkem			14.
15	Rosianna		✓	Bappenas	08562217543	siannpar.postan@gmail.com	15.
16	Renda K.	✓		Kemlu	081302415083	mykesmuwardani@gmail.com	16.
17	CERDIKWAN	✓		DITPOLKOM BAPPENAS	08131916466	cerdikwan@gmail.com	17.
18	Uzaimah		✓	PT. INDOKOEI	08567317330	uzaimah@indokoei.co.id	18.
19	Theodora T		✓	BKKBSU	08161384408	theodora@bkkbsu.co.id	19.
20	Budiman Angudin	✓		PT. INDOKOEI	0811009376	bagusay@yahoo.com	20.
21	Wati Pranings	✓		Kemlu	0811 81 2491		21.
22	Musi Dmogi	✓		Kemlu	08138999668	binsaris@yahoo.com	22.
23	Evy Margaretta		✓	BPKLN, Kemdiknas	081398577334	evymargaretta@gmail.com	23.
24	Eli K.	✓		Dit.kest Kemlu	081249201303	edehayanti@gmail.com	24.
25	Hendrawan S.	✓		BK, Kementan	08122021010	hendrawan.edipon@gmail.com	25.
26	Dapot Tua Harijanji	✓		BK, Kementan	081375144846	dapot.harijanja@gmail.com	26.
27	Adik BANDORO	✓		PKLN, INDOKOEI	08161910619		27.
28	Tim B. Swasta	✓		ECBAM	0813 8088 1235		28.
29	Andi BM	✓		ECBAM	081218112993		29.
30	C HOENI	✓		AyDES	0816 113 7603		30.
31	M. Fahrudin	✓		Biro KTLN Setreg	08159471837	muhamed.fahrudin@yahoo.com	31.
32	Rika Kiswardani		✓	Biro KTLN Setreg	0815 8868 256	rika.kiswardani@yahoo.com	32.
33	Zaenal Arifini	✓		multilateral	3160159		33.
34	Sahidin	✓		BAPPENAS	2160159	sehdas@yahoo.com	34.
35	Miranda		✓	ECBAM	3160159		35.

Bandung, 15 Januari 2011

Mengetahui,
Project Manager - EBAM

Miranda

Dibuat oleh,

Sahidin

Project Title : Enhancing Capacity for Better Aid Management (ECBAM)
 Award Id : 00051205
 Project No. : 00063643, 00063681, 00063682, 00063683

DAFTAR HADIR
KONSINYERING TIM PELAKSANA KERJASAMA SELATAN - SELATAN
ARION SWISS- BELHOTEL, BANDUNG
TANGGAL 14 JANUARI 2011

No.	Nama	Jenis Kelamin		Instansi	Telp. / HP No.	Email	Tanda Tangan
		L	P				
36	Sahidin	✓		BAPPENAS	2160153	sahid@eswhotel.com	36. 
37	Susanto	✓		Bappenas	0813 88084843		37. 
38							38.
39							39.
40							40.

Mengetahui,
 Project Manager - EBAM

Miranda Tahalele

Bandung, 14 Januari 2011

Dibuat oleh,

Sahidin